



PEMERINTAH KOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

RAJAWATI 2024

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TUAL PROVINSI MALUKU TAHUN 2024-2026



PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 14 TAHUN 2023

**RENCANA
PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA TUAL
TAHUN 2024-2026**





WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7078);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan aset Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tual untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Tual.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. RPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Tual yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pemuka kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.ka kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN TELAAH

Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024 -2026 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

- (2) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJPN Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pinjaman/hibah luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
 - a. Pedoman Penyusunan RENSTRA; dan
 - b. Pedoman dalam rangka RENJA OPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Kepala Badan melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir RPD mengenai kesesuaiannya dengan OPD, Renstra OPD serta Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD.
- (3) Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.
- (4) Kepala Badan menyusun evaluasi RPJM Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RPD Tahun 2024- 2026.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

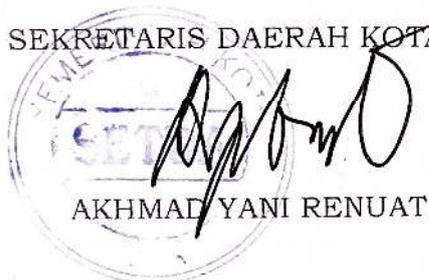
Ditetapkan di Tual
pada tanggal Maret 2023

PARAF AUTENTIFIKASI	
Sekda	
Kabag. Hukum	



Diundangkan di Tual
pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,



KATA PENGANTAR

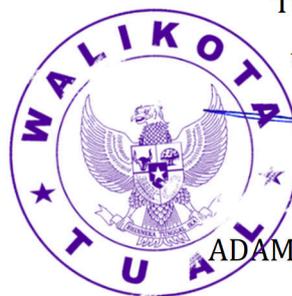
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya Pemerintah Kota Tual dapat merampungkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ini.

Dokumen RPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJP Daerah Kota Tual Tahun 2005 – 2025, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Kepmen 050-5889 Tahun 2021. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan sesuai yang tercantum dalam RPJP Daerah. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah telah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPD Kota Tual Tahun 2024-2026 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kerja kita dalam upaya bersama membangun kota Tual yang kita cintai bersama.

Tual, 30 Maret 2023

WALIKOTA TUAL



ADAM RAHAYAN, S.Ag., M.Si

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPD	I-2
I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.....	I-5
I.3.1 Hubungan RPD Kota Tual dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-5
I.3.2 Hubungan RPD Kota Tual dengan RPJPD Kota Tual	I-5
I.3.3 Hubungan RPD Kota Tual dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)	I-5
I.3.4 Hubungan RPD Kota Tual dengan RTRW Kota Tual	I-6
I.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Sektoral.....	I-6
I.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
I.4.1 Maksud.....	I-6
I.4.2 Tujuan	I-7
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	II-1
II.1.1 Geografi.....	II-1
II.1.2 Topografi.....	II-2
II.1.3 Hidrologi dan Oseanografi.....	II-3
II.1.4 Klimatologi	II-4
II.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-5
II.1.6 Pengembangan Perwilayahan.....	II-11
II.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-15
II.1.8 Wilayah Kawasan Rawan Bencana.....	II-15
II.1.9 Demografi	II-19
II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-21
II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-21
II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-25
II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-29
II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-30
II.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-30
II.3.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Urusan Dasar.....	II-39
II.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-55
II.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-64
II.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-68
II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-68
II.4.2 Fokus Fasilitas wilayah / Infrastruktur	II-72

II.4.3	Fokus Iklim Investasi.....	II-74
II.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-76
II.5	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-79
II.5.1	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-79
II.5.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-87
BAB. III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
III.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU.....	III-1
III.2	KERANGKA PENDANAAN.....	III-8
III.3	PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH.....	III-17
BAB. IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
IV.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	IV-1
IV.1.1	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro.....	IV-2
IV.1.2	Aspek Pelayanan Umum.....	IV-3
IV.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	IV-10
IV.2	ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-10
IV.2.1	Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-12
IV.2.2	Peningkatan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Masyarakat serta Penguatan Kapasitas Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-12
IV.2.3	Percepatan Penurunan Stunting.....	IV-12
IV.2.4	Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-13
BAB. V	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
V.1	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-2
BAB. VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI-1
VI.1	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KOTA TUAL TAHUN 2024 - 2026.....	VI-1
VI.2	PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI-6
VI.2.1	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	VI-6
VI.2.2	Program Perangkat Daerah.....	VI-8
BAB. VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB. VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA.....	VIII-1
VIII.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	VIII-1
VIII.2	INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	VIII-4

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Wilayah Administrasi Kota Tual	II-2
Tabel II-2	Data klimatologi Kota Tual Tahun 2018-2022	II-5
Tabel II-3	Rencana Pengembangan Struktur Ruang Melalui Pembangunan.....	II-9
Tabel II-4	Wilayah Potensi Bencana Gempa Bumi (Tektonik) di Kota Tual.....	II-16
Tabel II-5	Wilayah Potensi Bencana Tsunami di Kota Tual.....	II-17
Tabel II-6	Wilayah Potensi Bencana Gelombang Pasang di Kota Tual.....	II-18
Tabel II-7	Wilayah Potensi Bencana Angin Topan di Kota Tual	II-18
Tabel II-8	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual.....	II-19
Tabel II-9	Tabel Kepadatan Penduduk Tahun.....	II-20
Tabel II-10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Rasio Jenis.....	II-20
Tabel II-11	Pertumbuhan PDRB	II-21
Tabel II-12	Laju Inflasi.....	II-21
Tabel II-13	PDRB Per Kapita	II-22
Tabel II-14	Rasio Gini Kota Tual.....	II-22
Tabel II-15	Tingkat Kemiskinan	II-23
Tabel II-16	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-23
Tabel II-17	Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2018-2022	II-24
Tabel II-18	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-25
Tabel II-19	Angka Melek Huruf.....	II-25
Tabel II-20	Persentase Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-26
Tabel II-21	Persentase Rata-rata Harapan Lama Sekolah di Kota Tual Tahun 2018-2022	II-26
Tabel II-22	Angka Kematian Ibu.....	II-27
Tabel II-23	Angka Kematian Bayi.....	II-27
Tabel II-24	Angka Harapan Hidup.....	II-28
Tabel II-25	IPM Kota Tual Tahun 2018-2022	II-28
Tabel II-26	Jumlah Sanggar Seni Budaya Kota Tual	II-29
Tabel II-27	Jumlah Sanggar Seni Budaya dan Lokasinya	II-29
Tabel II-28	Jumlah Organisasi Olahraga.....	II-30
Tabel II-29	Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan 2018-2022	II-31
Tabel II-30	Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2018-2022	II-33
Tabel II-31	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-33
Tabel II-32	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022	II-34
Tabel II-33	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018-2022.....	II-35
Tabel II-34	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual Tahun 2018-2022	II-35
Tabel II-35	Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Tual 2018-2022.....	II-36
Tabel II-36	Rasio Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Tual Periode 2018-2022.....	II-37
Tabel II-37	Capaian penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tual tahun 2018-2022	II-37
Tabel II-38	Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tual 2018-2022.....	II-38
Tabel II-39	PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022.....	II-39

Tabel II-40	Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2018-2022.....	II-39
Tabel II-41	Persentase Angkatan Kerja Perempuan 2018-2022.....	II-40
Tabel II-42	Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.....	II-41
Tabel II-43	Ketersediaan Pangan Utama Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-42
Tabel II-44	Persentase Luas Lahan (Ha) Bersertifikat Kota Tual 2018-2022	II-43
Tabel II-45	Luas Lahan Milik Pemerintah Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-44
Tabel II-46	Indikator Urusan lingkungan hidup.....	II-44
Tabel II-47	Rasio Penduduk ber-KTP & Cakupan KTP yang diterbitkan, Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-45
Tabel II-48	Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-46
Tabel II-49	Presentasi PKK Aktif, Tahun 2018-2022	II-47
Tabel II-50	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual Tahun 2018-2022	II-47
Tabel II-51	Rasio Akseptor KB Di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-48
Tabel II-52	Arus Penumpang Kapal, Tahun 2018-2022.....	II-48
Tabel II-53	Jumlah Izin Trayek di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel II-54	Jumlah Pelabuhan Dan Terminal Tahun 2018-2022.....	II-49
Tabel II-55	Persentase Layanan Angkutan Darat, Tahun 2018-2022.....	II-50
Tabel II-56	Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tahun 2018-2022	II-50
Tabel II-57	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tual Tahun 2018- 2022	II-51
Tabel II-58	Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Tahun 2018-2022	II-52
Tabel II-59	Persentase Koperasi Aktif Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-52
Tabel II-60	Persentase Usaha Mikro & Kecil Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-53
Tabel II-61	Indikator Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-53
Tabel II-62	Ketersediaan Data Statistik.....	II-54
Tabel II-63	Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan, Tahun 2018-2022	II-54
Tabel II-64	Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022.....	II-55
Tabel II-65	Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2018-2022	II-56
Tabel II-66	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-57
Tabel II-67	Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Kota Tual 2018-2022.....	II-57
Tabel II-68	Rasio Kawasan Lindung Perairan dan Proporsi Tangkapan Ikan Tahun 2018-2022.....	II-58
Tabel II-69	Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018-2022	II-58
Tabel II-70	Indikator urusan pariwisata Kota Tual tahun 2018-2012	II-59
Tabel II-71	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, Tahun 2018-2022.....	II-60
Tabel II-72	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Tahun 2018-2022.....	II-61
Tabel II-73	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) 2018-2022.....	II-61
Tabel II-74	Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Per Hektar Tahun 2018-2022.....	II-62
Tabel II-75	Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2018-2022.....	II-63
Tabel II-76	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022	II-63
Tabel II-77	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.....	II-64
Tabel II-78	Ruang Fiskal Daerah Kota Tual Tahun 2019-2022	II-64
Tabel II-79	Tabel Pendapatan Daerah.....	II-65
Tabel II-80	Persentase PAD terhadap pendapatan	II-65
Tabel II-81	Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	II-66
Tabel II-82	Persentase Penduduk Menurut Ijazah Terakhir.....	II-67

Tabel II-83	Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan oleh Masyarakat Kota Tual.....	II-67
Tabel II-84	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-67
Tabel II-85	Pendapatan Asli Daerah Kota Tual	II-68
Tabel II-86	Pendapatan Pajak Daerah Kota Tual.....	II-68
Tabel II-87	Retribusi Daerah.....	II-69
Tabel II-88	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Tual Tahun 2018-2022	II-69
Tabel II-89	Pengeluaran Non Pangan per Kapita Kota Tual Tahun 2018-2022	II-70
Tabel II-90	Produktivitas Total Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-71
Tabel II-91	Rasio Panjang Jalan per Kendaraan Kota Tual Tahun 2018-2022	II-72
Tabel II-92	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Tual Tahun 2018-2022	II-73
Tabel II-93	Luas Wilayah Perkotaan Kota Tual Tahun 2018-2022	II-73
Tabel II-94	Luas Wilayah RTH Kota Tual Tahun 2018-2022	II-73
Tabel II-95	Data Kelistrikan Kota Tual Tahun 2018-2022	II-74
Tabel II-96	Angka Kriminalitas Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-74
Tabel II-97	Perizinan Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-75
Tabel II-98	Pajak Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-99	Retribusi Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022	II-76
Tabel II-100	IPM Kota Tual Tahun 2018-2022	II-77
Tabel II-101	Komponen Pembentuk IPM Kota Tual 2018-2022	II-77
Tabel II-102	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-78
Tabel II-103	Rasio Ketergantungan Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-78
Tabel II-104	Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan 2018-2022	II-79
Tabel II-105	Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2018-2022	II-81
Tabel II-106	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-81
Tabel II-107	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022	II-82
Tabel II-108	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Tahun 2018-2022	II-83
Tabel II-109	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual Tahun 2018-2022	II-83
Tabel II-110	Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Tual 2018-2022.....	II-84
Tabel II-111	Rasio Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Tual Periode 2018-2022.....	II-85
Tabel II-112	Capaian penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tual tahun 2018-2022	II-85
Tabel II-113	Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tual 2018-2022.....	II-86
Tabel II-114	PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022	II-87
Tabel II-115	Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel II-116	Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2018-2022	II-89
Tabel II-117	Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Kota Tual 2018-2022.....	II-89
Tabel II-118	Rasio Kawasan Lindung Perairan dan Proporsi Tangkapan Ikan Tahun 2018-2022	II-90
Tabel II-119	Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel II-120	Indikator urusan pariwisata Kota Tual tahun 2018-2012.....	II-91
Tabel II-121	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, Tahun 2018-2022	II-92
Tabel II-122	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Tahun 2018-2022	II-92

Tabel II-123	Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) 2018-2022.....	II-93
Tabel II-124	Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Per Hektar Tahun 2018-2022.....	II-94
Tabel II-125	Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2018-2022.....	II-94
Tabel II-126	Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022	II-95
Tabel II-127	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.....	II-95
Tabel III-1	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022 (milyar).....	III-3
Tabel III-2	Realisasi Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022	III-5
Tabel III-3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022	III-7
Tabel III-4	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Tual Tahun 2024-2026.....	III-18
Tabel V-1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026.....	V-5
Tabel VI-1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tual Tahun 2024-2026.....	VI-2
Tabel VI-2	Program Pembangunan Daerah	VI-10
Tabel VII-1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Tual Tahun 2024-2026.....	VII-2
Tabel VII-2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-3
Tabel VIII-1	Indikator Kinerja Utama Kota Tual Tahun 2024-2026.....	VIII-2
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tual Tahun 2024-2026.....	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tual	II-1
Gambar II-2	Peta Kemiringan Lereng.....	II-3
Gambar II-3	Ruang Fiskal Daerah Kota Tual Tahun 2019-2022	II-65
Gambar VI-1	Fokus RPD Tahun 2024-2026.....	VI-7



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, diinstruksikan kepada Walikota agar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024– 2026.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Tual. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024– 2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tual sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Tual Tahun 2018– 2023;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi berlaku.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPD

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 17. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 23. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Nomor 050/3499/SJ; Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
34. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2012-2032.
35. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005-2025.
36. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tual Tahun 2018-2023.

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

I.3.1 Hubungan RPD Kota Tual dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang tercantum Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

I.3.2 Hubungan RPD Kota Tual dengan RPJPD Kota Tual

Penyusunan RPD Kota Tual berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tual Tahun 2005–2025 yang memuat Visi dan Misi Kota Tual 20 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024–2026 didasarkan pada visi RPJPD Kota, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

I.3.3 Hubungan RPD Kota Tual dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, dimana Renstra–PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024–2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Kota Tahun 2024–2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kota Tahun 2024– 2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024–2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota dan Renstra PD Kota agar memperhatikan:

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2023;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

I.3.4 Hubungan RPD Kota Tual dengan RTRW Kota Tual

Penyusunan RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 memperhatikan RTRW Kota Tual Tahun 2012–2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual Tahun 2012–2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Kota Tual dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

I.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar;
2. Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals (SDG's)*;
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kota Tual;

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1 Maksud

Penyusunan RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Tual Tahun 2024–2026 dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penyesuaian nomenklatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tual. Dokumen hasil RPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama.

I.4.2 Tujuan

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024–2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kecamatan maupun desa/kelurahan;
- b. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2024–2026;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Maluku, dan Kota Tual;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD ini;
- f. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024–2026;
- g. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tual Tahun 2024–2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum, (3) Hubungan antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan serta (5) Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang Gambaran Umum selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing Daerah; dan (4) Aspek Pelayanan Umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data serta analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu terdiri atas Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah; (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu terdiri atas Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan; serta (3) Kerangka Pendanaan 3 (tiga) tahun yang terdiri atas Proyeksi Pendapatan dan Belanja serta Penghitungan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi: (1) Permasalahan Pembangunan; dan (2) Isu Strategis yang memperhatikan isu/kebijakan global, nasional, regional, daerah sekitar dan kebijakan Kota Tual

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini berisi penyajian terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2024–2026

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab ini berisi tentang: (1) Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran; serta (2) Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah Penanggung Jawab berdasarkan bidang urusan yang terdiri dari

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode.

BAB IX PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan Penjabat Kepala Daerah. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPD dijadikan pedoman bagi setiap kepala PD dalam menyusun Renstra-PD dan setelah ditetapkannya RPD maka Renstra Perangkat Daerah akan menyesuaikan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

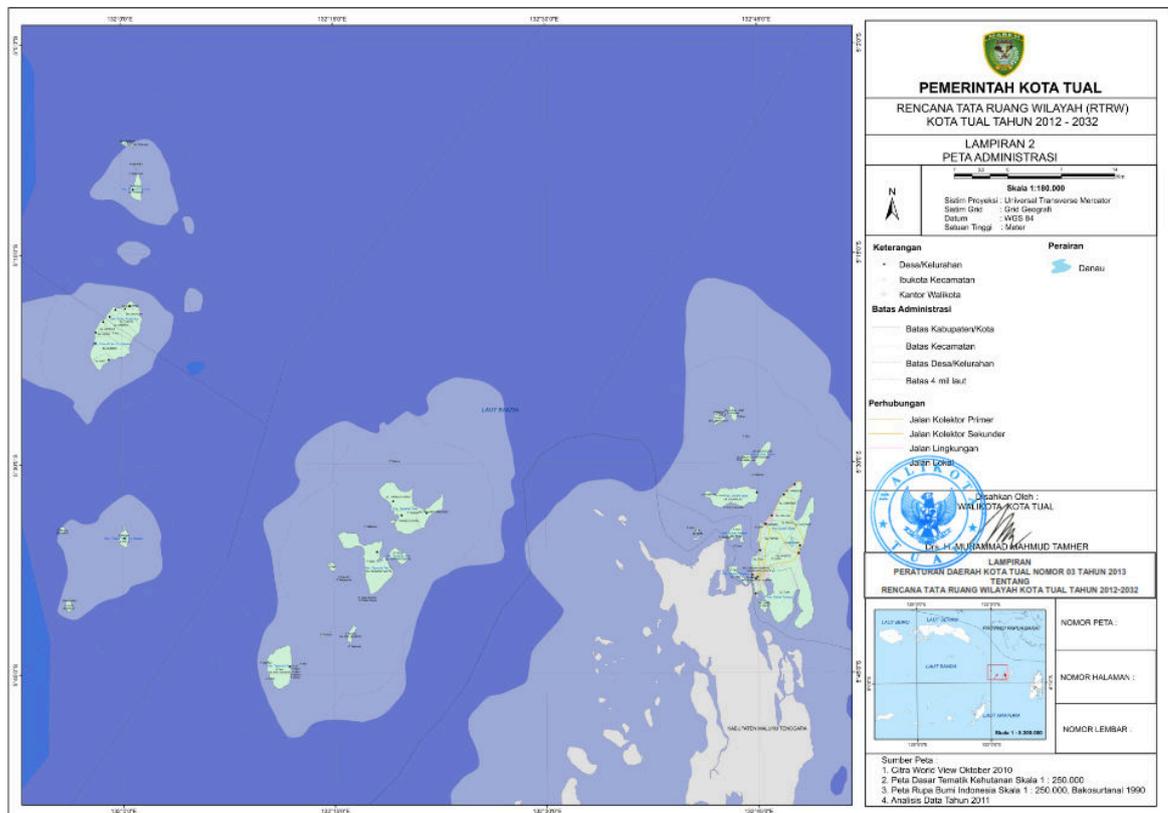
II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

II.1.1 Geografi

Kota Tual merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku yang beribukota di Tual, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Ambon) sekitar ±552 km. Secara Geografi Kota Tual terletak pada posisi astronomi 5°-6,5° Lintang Selatan dan 131° -133,5° Bujur Timur. Luas wilayah ±19.342,39 Km² dengan luas daratan ±254,39 Km² dan luas perairannya ±19.088 Km². Secara administrasi, Kota Tual memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Laut Banda
Sebelah timur	: Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong
Sebelah selatan	: Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Laut Arafura
Sebelah barat	: Laut Banda

Gambar II-1 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Tual



Kota Tual secara administratif terdiri dari 5 kecamatan, 27 desa, 3 kelurahan dan 11 dusun, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kota Tual merupakan wilayah kepulauan, dengan Pulau Dullah sebagai pulau terbesar di kota ini. Kota Tual terdiri atas 66 pulau, meliputi 3 gugusan pulau yaitu gugus Pulau-pulau Kur, gugus Pulau Tayando Tam, dan gugus Pulau Dullah. Terdapat pulau-pulau tidak berpenghuni yang pada umumnya dipergunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan atau sebagai tempat singgah kapal. Jarak ibukota Tual dengan ibukota kecamatan terjauh, yakni Tubyal di Kecamatan Pulau-pulau Kur sekitar 103 kilometer atau 57 mil laut yang jarak tempuhnya sangat tergantung pada kondisi cuaca. Data Administrasi Kota Tual disajikan dalam Tabel sebagai berikut.

Tabel II-1 Wilayah Administrasi Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan	
1	Pulau Dullah Utara Ibu Kota Kecamatan Namser	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut 3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit	7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan 9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor
2	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon	5. Dusun Pulau Ut 6. Kelurahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum
3	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel	4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom
4	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaimear	4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin
5	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen	6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual (RTRW) 2012–2032,
Kota Tual Dalam Angka 2023.

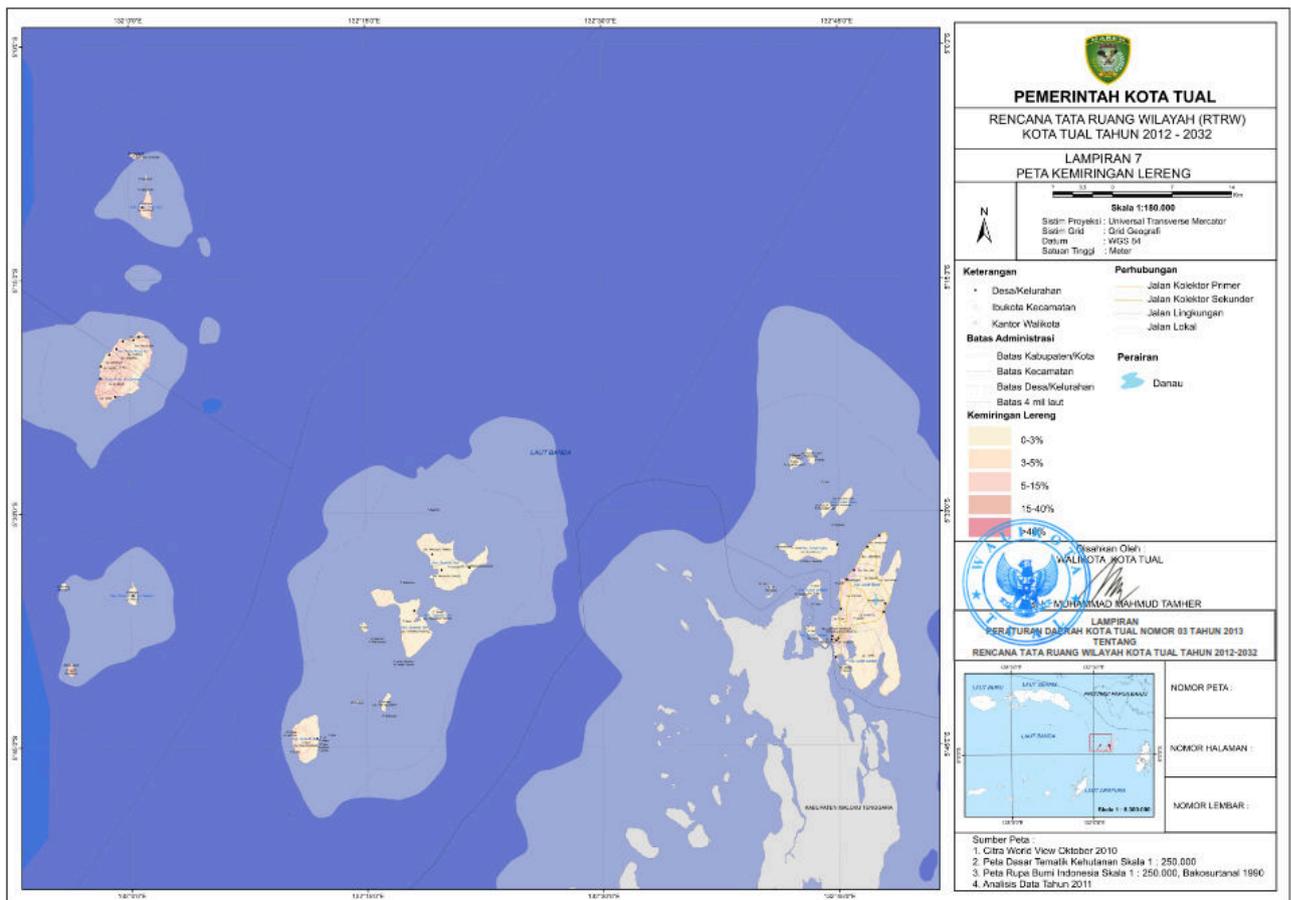
II.1.2 Topografi

Kondisi topografi di Kota Tual cukup beragam mulai dari kondisi datar hingga relatif berbukit. Sekitar 53% wilayah Kota Tual berada pada ketinggian 0-99 m dpl, dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Kota Tual beragam, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%, lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%, lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%, dan

lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12% dari total wilayah. Kota Tual memiliki relief yang beraneka ragam. Ada daerah dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Kota Tual. Menurut ketinggian, wilayah Kota Tual dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Ketinggian antara 0 - 100 m, seluas 44,90%
2. Ketinggian antara 100 - 500 m, seluas 36,10%
3. Ketinggian antara 500 – 1000 m, seluas 13,40%
4. Ketinggian antara > 1000 m, seluas 5,51%

Gambar II-2 Peta Kemiringan Lereng



II.1.3 Hidrologi dan Oseanografi

Kondisi hidrologi kota tual secara garis besar dapat digambarkan terdapat 2 danau air tawar yaitu danau Fanil dan danau Ngadi yang merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat, aktivitas pertanian dan juga dikembangkan menjadi tempat wisata.

Secara oseanografi, Kota Tual dipengaruhi Laut Banda dan Laut Arafura. Gelombang laut dipengaruhi kecepatan angin dan penjarannya searah dengan arah angin, kecuali pada dangkalan yang banyak bertebaran wilayah perairan, arah

gelombang dikendalikan bentuk kontur laut dengan ketinggian gelombang mencapai 1,2 meter hingga 2,4 meter. Kota Tual yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Kei Mempunyai arus laut yang mencapai 1 meter/detik terutama di beberapa selat dan muara teluk antara lain teluk Un di petuanan desa Taar dan Selat Tut yang membatasi desa Fair Kecamatan Dullah Selatan dan Kabupaten Maluku Tenggara. Arus permukaan yang datang ke wilayah perairan Kota Tual dipengaruhi 2 musim yaitu musim Timur (April-Oktober) dan musim Barat (Oktober-April) dengan arah arus umumnya berasal dari timur dan timur laut serta dari arah Barat Laut. Pasang surut perairan wilayah Kota Tual tergolong pasang campuran mirip harian ganda sebagaimana tipe umum di perairan lain Maluku. Tunggang air (tidal range) maksimum umumnya lebih besar dari 2,5 meter dimana pasang tertinggi terjadi pada bulan April dan Desember sedangkan surut terendah terjadi pada bulan Oktober.

II.1.4 Klimatologi

Iklim di Kota Tual sangat dipengaruhi oleh iklim wilayah-wilayah di sekitarnya. Pengaruh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudera Indonesia serta Pulau Papua di Bagian Timur dan Benua Australia di Bagian Selatan, menjadikan iklim di wilayah ini seringkali terjadi perubahan. Berikut kondisi beberapa parameter iklim:

- a. Keadaan musim teratur, musim Timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim Kemarau. Musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras terjadi pada bulan Desember dan Februari;
- b. Musim Pancaroba berlangsung dalam bulan Maret/April dan Oktober/November;
- c. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora;
- d. Bulan April sampai September dominan bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan serta angin Tenggara;
- e. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin Barat Laut dan angin Barat Laut.

Kondisi iklim di Kota Tual berdasarkan peta Zona Agroklimat Provinsi Maluku (LTA - 72, 1986) dan Klasifikasi Oldeman (1980) secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) zona Agroklimat yaitu:

- 1) Zona II.5 : Curah hujan tahunan 3.000- 4.000 mm,tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Pulau Dullah dsk);

- 2) Zona IV.1: Curah hujan tahunan 3.000 – 1.000 mm, tercakup di dalamnya zone A2 (> 9 BB, < 2 BK) menurut Oldeman, termasuk wilayah Kecamatan Tayando Tam.

Suhu rata-rata sepanjang tahun 2022 adalah 28,0°C dengan suhu minimum 22.3°C

Rata-rata Curah Hujan di Kota Tual secara keseluruhan yaitu sebesar 2.902,67 mm, untuk Kelembaban rata-rata 87,2 persen dan penyinaran matahari rata-rata 218 persen dan tekanan udara rata-rata 1.008,8 milibar. Data Komponen cuaca ini berdasarkan data Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur. Data iklim Kota Tual disajikan dalam table di bawah ini.

Tabel II-2 Data klimatologi Kota Tual Tahun 2018-2022

Data Klimatologi		2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Suhu(°c)	Minimal	23,3	23,6	-	20,1	22,3	22,3
	Maksimal	30,9	30,6	30,9	30,5	31,6	30,27
	Rata-rata	26,7	26,7	27,1	26,9	26,9	26,82
Kelembaban (%)	Rata-rata	85	85	89	89	88	87,2
Tekanan Udara (mb)	Rata-rata	1008,2	1008,6	1008,1	1007,5	1008,5	1008,8
Curah Hujan (mm)	Rata-rata	220,7	192,4	227,4	268	290	239,4
Penyinaran (%)	Rata-rata	45	48	43	922	32	218

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023; Data diolah, 2023.

II.1.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032, potensi pengembangan wilayah di Kota Tual dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Struktur Ruang Kota

a. Sistem pusat pelayanan kota yang meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang terdiri dari pusat pelayanan Kota dengan fungsi pelayanan pemerintahan di kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan pusat pelayanan Kota dengan fungsi Perdagangan & jasa di Kelurahan Masrum dan Kelurahan Ketsoblak
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) yang terdiri dari:
 - Sub PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pertanian & pariwisata di desa Tubyal Kecamatan Pulau- pulau Kur dan Desa Warkar Kecamatan Kur Selatan;
 - Sub PPK dengan fungsi Pelayanan Pemerintahan serta perdagangan & jasa di desa Dullah Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam.

- 3) Pusat Lingkungan (PL) yang meliputi fungsi pelayanan Pemerintahan serta perdagangan dan jasa di di Desa Tayando Ohoiel dan Desa Tam Ngurhir Kecamatan Tayando Tam, Desa Niela Kecamatan Kur Selatan, Desa Kaimear Kecamatan Pulau-pulau Kur, desa Dullah Laut dan Desa Tamedan Kecamatan Pulau Dullah Utara.
- b. Sistem prasarana wilayah kota salah satunya terdiri dari system Prasarana Utama yang meliputi:
- 1) Sistem jaringan transportasi darat yaitu sistem jaringan jalan dan jaringan angkutan sungai, laut, dan penyeberangan yang meliputi:
- Pengembangan rencana jaringan kolektor sekunder Ruas Lingkar Pulau Kur, Ruas Langgiar-Yamru-Ohoiel, ruas Tam Ngurhir – Tam Ohoitom, ruas lingkaran Fiditan, ruas Tual – Tamedan, & ruas Tual-Ohoitel-Ohoitahit;
 - Jaringan jalan lokal yaitu ruas Labetawi – Difur – Ohoitahit; ruas lingkaran Pulau Fair; ruas Ohoitahit – Nam dan Ruas Watran – Luv
 - Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi terminal tipe B di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan; Terminal Penumpang Tipe C di desa Ohoitel Kecamatan Pulau Dullah Utara; Halte-halte di Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Kecamatan Pulau Dullah Utara; rencana unit pengujian kendaraan bermotor di kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan.
 - Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas & angkutan yaitu pengembangan trayek angkutan umum perkotaan yang melayani perjalanan dalam kota & antar kota meliputi Tual – Ohoitahit, Tual – Fiditan, Tual – Dullah, Tual – Taar, Tual – Langgur, rencana jalur Ohoitahit – Labetawi – Tamedan – Labetawi – Dullah – Ngadi – Ohoitel dan rencana jalur Ohoitel – Watran – Luv – Watran – Ohoitel.
 - Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi dermaga penyeberangan di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau dullah Selatan, Desa Tayando Yamtel di Kecamatan Tayando Tam dan desa Tubyal kecamatan Pulau-pulau Kur dengan alur penyeberangan meliputi Tual-Tayando Yamtel-Tubyal.
- 2) Sistem jaringan transportasi laut meliputi:
- Pengembangan pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Tual di Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan yang melayani alur pelayaran

pengumpul untuk penumpang pulang pergi dari Kota Tual menuju pelabuhan lain di Provinsi Maluku, Provinsi Papua, Pulau Jawa, Sulawesi dan daerah lain di Indonesia; pelayaran pengumpul barang dengan alur pelayaran meliputi Tual – Ambon – Surabaya;

- Pengembangan Pelabuhan pengumpan di desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam dengan alur pelayanan Tual – Tayando – Lokwirin – Geser (Kabupaten Seram Bagian Timur) – Ambon;
- Pelabuhan khusus meliputi pelabuhan bahan bakar minyak di Kelurahan Masrum & Desa Ngadi, Pelabuhan Angkatan Laut di Kelurahan Masrum Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Tual, Rencana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kelvik di desa Taar, Rencana Pelabuhan Penampungan curah cair tidak terbatas di terbatas di desa Ngadi, Rencana Pelabuhan Penampungan gas tidak terbatas di terbatas di desa Ngadi;
- Sistem prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan energi/kelistrikan; sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air kota dan infrastruktur kota lainnya.

2. Pengembangan Kawasan

a. Kawasan budidaya di Kota Tual meliputi

- 1) Kawasan perumahan;
- 2) Kawasan perdagangan dan jasa yaitu pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pertokoan modern kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- 3) Kawasan perkantoran baik perkantoran Pemerintah maupun perkantoran swasta di kecamatan Pulau Dullah Utara & Selatan;
- 4) Kawasan industri untuk industri besar di desa Ngadi Kecamatan Pulau Dullah Utara & Industri rumah tangga/kecil & ringan di seluruh kecamatan Kota Tual;
- 5) Kawasan pariwisata yaitu wisata buatan & wisata alam di seluruh kecamatan Kota Tual;
- 6) Ruang terbuka non hijau yaitu lahan perkerasan dan badan air (danau Ngadi & danau Fanil);
- 7) Ruang evakuasi bencana dengan pembagian sebagai berikut

- Pulau Dullah berpusat di Bukit Iban desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara;
 - Pulau Tayando berpusat pada bukit Tu Ilun Ratan di desa Ohoiel dan Bukit Rubai Un Fit di desa Yamtel;
 - Pulau-pulau Kur berpusat di Gunung Namsar desa Kanara/Yapas Kecamatan Kur Selatan dan gunung Burun di Desa Kaimear kecamatan Pulau-pulau Kur;
- 8) Ruang kegiatan sektor informal berupa kawasan warung dan pedagang kaki lima di kecamatan Pulau Dullah Utara & Pulau Dullah Selatan, terutama di arahkan di Kelurahan Masrum & desa Fiditan ;
- 9) Kawasan peruntukkan lainnya yaitu kawasan peruntukan perikanan, hutan produksi, pertanian, pelayanan umum (pendidikan/kesehatan) dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

b. Kawasan lindung yang meliputi

- 1) Hutan lindung tersebar di kecamatan Pulau Dullah Utara & Tayando Tam;
- 2) Kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Pulau Dullah Utara dan Kecamatan Pulau Dullah Selatan;
- 3) Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar danau;
- 4) Ruang terbuka hijau yang terdiri dari taman kota, lapangan olahraga, hutan mangrove, jalur hijau dan sebagainya;
- 5) Suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- 6) Kawasan rawan bencana alam terhadap gempa bumi, tsunami, dan banjir akibat gelombang pasang;
- 7) Kawasan lindung lainnya berupa pantai berterumbu karang di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 22.949 ha.

Selain pengembangan-pengembangan yang ada, juga ditetapkan kawasan-kawasan strategis yang meliputi kawasan agropolitan di Kecamatan Pulau Dullah Utara, kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan; kawasan minapolitan di semua kecamatan, dan kawasan konservasi penyu di Pulau Woning Kecamatan Kur Selatan.

Dalam mendukung arah dan potensi pengembangan wilayah, diperlukan jaringan prasarana wilayah yang ditekankan pada pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan

keterhubungan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Lokal (PKW dan PKL). Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan jaringan jalan; angkutan umum aglomerasi perkotaan; pelabuhan; terminal; jaringan prasarana energi; dan jaringan prasarana sumber daya air. Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah dilakukan antara lain melalui:

1. Pengembangan sistem transportasi darat, laut, secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
2. Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung kawasan-kawasan strategis;
3. Pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan domestik, sektor industri dan pertanian;
4. Arahan Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang di Kota Tual

Tabel II-3 Rencana Pengembangan Struktur Ruang Melalui Pembangunan Jaringan Prasarana Wilayah

No	Indikasi Program Utama	Instansi Pelaksana	Lokasi
1	Penyusunan dan penetapan RDTR	Kemen Agraria dan Tata Ruang	PKW Tual-Langgur,
2	Peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kemendagri dan/ atau Pemda	PKW Tual-Langgur,
3	Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan Keamanan negara	Kemenhan dan/atau Pemda	PKW Tual-Langgur,
4	Penetapan dan peningkatan pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar, menengah dan atau kejuruan	Kemenhub / pemda	PKW Tual-Langgur,
5	penetapan dan peningkatan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas kesehatan (Rumah Sakit,Puskesmas atau posyandu) dan pelayanan jasa medis	Kemenkes, Pemda / swasta	PKW Tual-Langgur,
6	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Kemendag / pemda/Swasta	PKW Tual-Langgur,
7	Pengembangan pusat kegiatan industri dan pengelolaan hasil perikanan,garam rakyat dan atau rumput laut	Kemen KP /Kemenperin dan atau swasta	PKW Tual-Langgur,
8	Pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan	Kementan,kemenperin , pemda atau swasta	PKW Tual-Langgur,
9	Pengembangan peningkatan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang	Kemenhub, Pemda atau Swasta	PKW Tual-Langgur,
10	Peningkatan prasarana dan saran pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum	Kementerian ESDM, Kementerian Koinfo, Kementerian PUPR, Pemda atau swasta	PKW Tual-Langgur,

11	Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan limbah dan pengelolaan sampah	Kementerian PUPR atau Pemda	PKW Tual-Langgur,
12	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer Tual-Langgur-Ibra	Kementerian PUPR atau Pemda	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual Pada Gugus Kepulauan Kei
13	Pengembangan terminal penumpang Tipe B	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemda atau Swasta	Masrum di kecamatan Dullah Selatan di kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
14	Pengembangan terminal barang	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemda atau Swasta	Masrum di Kecamatan Dullah selatan di kota tual pada gugus Kepulauan Kei
15	Penyeberangan Tayando Yamtel dan Tubyal yang terhubung dengan jaringan transportasi lainya dan dilengkapi dengan Depo BBM	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemda atau Swasta	Kota Tual
16	Penyeberangan Masrum yang terhubung dengan Jaringan Transportasi lainya yang dilengkapi dengan Depo BBM	Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemda atau Swasta	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
17	Pengembangan dan pematapan Lanal Tual	Kementerian Pertahanan/Pemda	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
18	Pengembangan dan pematapan PPN Tual dan PPI Kelvik Taar	Kemen KP, Pemda dan / atau Swasta	Kecamatan Dullah Selatan di Kota Tual pada gugus Kepulauan Kei
19	Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan PKS N Kalabahi(Provinsi NTT) -PKSN Ilwaki-PKSN Saumlaki-PKW Tual-Langgur-PKSN Dobo-Pkw Merauke	Kementerian Perhubungan/Pemda/Swasta	Laut Arafura
20	Lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan PKS N Dobo-Tual-Ambon-Ternate-Daruba-Biak (Provinsi Papua)	Kementerian Perhubungan/Pemda/ Swasta	Laut Arafura
21	Pengembangan lintas penyeberangan lintas kabupaten /kota yang menghubungkan benjina-PKW Tual-Langgur-PKSN Saumlaki	Kementerian Perhubungan/ Pemda/ Swasta	Laut Arafura
22	Pengembangan lintas penyeberangan kabupaten Kota yang menghubungkan Weduar Fer-PKW Tual-Langgur	Kementerian Perhubungan/ Pemda/ Swasta	Selat Nerong
23	Pengembangan lintas penyeberangan kabupaten Kota yang menghubungkan Geser (Kab. Seram Bagian Timur)- PKW Tual Langgur	Kementerian Perhubungan/ Pemda/ Swasta	Laut Banda
24	Pengembangan lintas penyeberangan kabupaten Kota yang menghubungkan PKS N Ilwaki-Woneli-Tomra-Kaiwatu-Tepa-PKSN Saumlaki-Larat-PKW Tual Langgur	Kementerian Perhubungan/ Pemda/ Swasta	Laut Banda
25	Pengembangan lintas penyeberangan Kabupaten/Kota yang menghubungkan PKW Tual-Langgur-Tayando-Tubyal	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda/Swasta	Laut Banda

26	Pengembangan lintas penyeberangan Kabupaten/Kota yang menghubungkan PKW Tual-Langgur-Elat	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda/Swasta	Laut Banda
27	Pengembangan pemantapan pelabuhan Tayando	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda/Swasta	Kecamatan Tayando tam di kota Tual
28	Pengembangan pemantapan pelabuhan Tual	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda/Swasta	Kecamatan Dullah selatan

Sumber: PERPRES 33 TAHUN 2015

II.1.6 Pengembangan Perwilayahan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Kota Tual yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 3 (Tiga) wilayah pengembangan menurut 3 pulau utama yaitu pulau Dullah, Pulau Kur dan Tayando. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan fungsi pelayanan, mengurangi kesenjangan, serta untuk menentukan kawasan-kawasan yang akan dilakukan pengembangan, maka di Kota Tual dilakukan pembagian wilayah dalam unit-unit kawasan fungsional yang lebih kecil. Unit kawasan fungsional yang lebih kecil tersebut dikenal sebagai Sistem Perwilayahan (Regionalisasi Wilayah). Pertimbangan dalam Penetapan Sistem Perwilayahan di Kota Tual berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan wilayah, dimana pengelompokan kegiatan-kegiatan wilayah tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi.
- b) Batasan kemampuan jangkauan pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala wilayah.
- c) Adanya batas wilayah administrasi.
- d) Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan, sehingga tercapai efisiensi .
- e) Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara wilayah pengembangan (efisiensi sistem pergerakan).
- f) Memantapkan peran regionalisasi wilayah dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya (efisiensi pelayanan sarana umum).
- g) Kemudahan dalam pengelolaan masing-masing wilayah fungsional.

A. Pulau Dullah

Secara administrasi Pulau Dullah dibagi menjadi 2 kecamatan yaitu Dullah Utara dan Dullah Selatan.

1. Dullah selatan dibagi menjadi 4 pulau besar yaitu pulau Dullah, Fair, Ut dan Ubur yang diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL, Karakteristik Perwilayahan Kota Tual secara umum adalah kepulauan dan. Fasilitas pelayanan dasar khususnya fasilitas ekonomi dan sosial, tersedia dan tersebar. Kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan rendah-sedang, sehingga dimasa yang akan datang dengan melihat fungsi kawasan harus diantisipasi dalam pola pemanfaatan lahan secara bijaksana untuk keberlanjutan ekonomi, Pulau Dullah selatan, Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). menjadi pusat sektor ekonomi industri dan jasa bagi wilayah *hinterland*, oleh karena itu peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dan peningkatan infrastruktur meliputi jalan antar wilayah, kota Tual dan kecamatan, dan antar kabupaten, kota, fasilitasi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut meliputi

- Ruas Lebetawi-Difur- Ohoitahit, ruas Ohoitahit-Nam, ruas Watran-Tual, Pengembangan terminal tipe B di Kelurahan Masrum
- Pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi ruas lingkaran Tual- Tamedan di Pulau Dullah, ruas Tual-Ohoitel-Ohoitahit
- Pengembangan terminal tipe B di Kelurahan Masrum
- Pembangunan terminal tipe B di kelurahan Lodar el
- Pembangunan Pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) angkutan kota dengan trayek: Tual-Ohoitahit, Tual-Fiditan, Tual-Dullah, Tual-Taar, Tual-Langgur, Ohoitahit-Tamedan-Labetawi Dullah-Ngadi-Ohoitel, Ohoitel-Watran-Luv
- Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tual-Tayando Yamtel- Tubyal di kelurahan Masrum, Desa Tayando Yamtel, Desa Tubyal
- Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut
- Pengembangan Pelabuhan Pengumpul di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Pengumpan di Pelabuhan Lokwirin dan Pelabuhan Yamtel, dan Pelabuhan Khusus di Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Angkutan Laut di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Perikanan Nasional di Desa Tual, dan Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kelwik

Selain itu Pengembangan dan peningkatan fungsi pelayanan lainnya yaitu dengan Pembangunan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik PLTD, PLTG, genset

komunal, dan pengembangan jaringan sistem prasarana telekomunikasi dengan pengembangan jaringan terestrial pada wilayah perkotaan Kecamatan Dullah selatan, Pulau Ut dan Pulau Ubur.

Pemerintah Kota Tual memiliki Program Strategis yaitu Program Tuntas kumuh yang selaras dengan konsep *Water Front City* dalam bentuk Reklamasi pada wilayah pesisir bagian barat Pulau Dullah terutama pada kawasan pantai Kiom-Wearhir Tual dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi, terutama memperbaiki beranda kota, penyediaan Ruang terbuka Hijau, pusat pengembangan ekonomi kreatif, kawasan wisata kuliner, kawasan *water sport centre* dan lokasi pembangunan *Landmark* Kota Tual.

2. Kecamatan Dullah Utara terdiri dari desa Ngadi-Dullah-Dullah Laut (Duroa), Labetawi, Desa Tamedan, sesuai dengan RTRW Kota Tual dan potensi, maka arahan pengembangan Kecamatan Dullah Utara adalah sebagai kawasan wisata dan budidaya. Dalam pengembangan kawasan strategis, kecamatan Dullah Utara akan dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan agropolitan. Dalam konteks itu, maka beberapa strategi dan prioritas dalam pengembangan kawasan antara lain:

- Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut
 - a. Pengembangan jalan lokal meliputi ruas Lebetawi-Difur-Ohoitahit, ruas Ohoitahit-Nam, ruas Watran-Tual
 - b. Pembangunan terminal tipe C di Desa Ohoitel
 - Pengembangan Pelabuhan Pengumpul di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Pengumpan di Pelabuhan Lokwirin dan Pelabuhan Yamtel, dan Pelabuhan Khusus di Pelabuhan Perikanan di Desa Ngadi, Pelabuhan Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Masrum, Pelabuhan Angkatan Laut di Kelurahan Masrum, Pembangunan dan pengembangan jaringan tenaga listrik dan distribusi minyak dan gas bumi
 - a. Pembangunan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik PLTD, PLTMG, genset komunal
 - b. Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi minyak dan gas bumi
 - 1. Pengembangan sistem prasarana sumber daya air
 - a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

- b. Pengendalian/rehabilitasi pengelolaan Danau ngadi
 - c. Pengendalian/rehabilitasi pengelolaan Danau fanill
 - d. Pembangunan dan peningkatan sistem pengamanan pantai pelindung pemukiman di kecamatan Dullah Utara
2. Pengembangan, peningkatan, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan RTH
 - a. Pengembangan dan pengelolaan RTH sempadan danau
 - b. Pengembangan dan pengelolaan RTH sempadan pantai
 - c. Pengembangan dan pengelolaan RTH taman lingkungan pemukiman
 - d. Pengembangan dan pengelolaan RTH lapangan terbuka
 3. Pengembangan kawasan peruntukan industri di desa ngadi
 4. Pengembangan kawasan wisata alam

B. Pulau-Pulau Kur

Dari segi geografis dan potensi alam pulau-pulau Kur diprioritaskan menjadi kawasan agropolitan, dari keseluruhan luas area Kecamatan Kur Selatan sebesar 38,62 Km² (3.862,64 Ha) yang digunakan sebagai Areal Pertanian (pertanian, perkebunan, dan kehutanan) adalah sebesar 17,47 Km² (1.747 Ha) atau sekitar 45% dari luas areal. Sedangkan luas areal pertanian padi palawija sebagai bahan makanan pokok adalah sebesar 42 Ha (0,42 Km²). Produksi dari pertanian padi palawija yang paling dominan di Kecamatan Kur Selatan adalah Ketela Pohon sebesar 61,6 ton selama tahun 2016.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan memiliki komoditi unggulan juga harus perlu pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, jalan, irigasi/pengairan, pelabuhan penyeberangan penunjang transportasi bongkar muat barang dan orang antar pulau dan yang dilengkapi dengan depo BBM, pengembangan jaringan terestrial (telekomunikasi), sarana pengelolaan hasil pertanian dan fasilitas umum lainnya yang dapat dilihat pada tabel 7.1

Selain itu Kecamatan pulau kur dan Kur selatan merupakan wilayah kawasan budidaya dan perikanan tangkap, Pulau Kaimear merupakan kawasan strategis lingkungan hidup dalam pengembangan kawasan konservasi penyu belimbing, maka pengembangan kecamatan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) harus ditunjang dengan sarana-prasarana transportasi laut yang memadai dalam menunjang aktivitas antar pulau PKW-PKN.

C. Pulau Tayando

Secara geografis dan potensi kecamatan Tam-tayando mempunyai kesamaan potensi dan pengembangan sebagai wilayah kawasan budidaya, perikanan tangkap dan kawasan wisata bahari yang penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut yang memadai Pembangunan Dermaga Penyeberangan Tam, sarana telekomunikasi melalui Pembangunan menara telekomunikasi berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) dan perencanaan pengembangan jaringan sistem telekomunikasi berbasis gelombang radio, pada wilayah kepulauan dan pengembangan

II.1.7 Penggunaan Lahan

Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah menunjukkan penggunaan lahan yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual 2012-2032, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kota Tual terdiri dari kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 11.755 hektar dan kawasan Budidaya dengan luas kurang lebih 11.853 hektar. Kawasan Lindung terdiri dari hutan lindung seluas 8.295 hektar, kawasan resapan air seluas 1.419 hektar, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau seluas 2.815 hektar, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas 181 hektar, kawasan rawan bencana alam serta kawasan lindung lainnya seluas 22.949 hektar. Kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan seluas 1.903 hektar, peruntukan perdagangan dan jasa seluas 13 hektar, kawasan perkantoran seluas 76 hektar, peruntukan industri seluas 95 hektar, peruntukkan pariwisata seluas 87 hektar, ruang terbuka non hijau seluas 154 hektar, ruang evakuasi bencana yaitu berupa perbukitan di pulau Dullah, Tayando dan pulau-pulau Kur, peruntukan kegiatan sektor informal seluas 5 hektar dan kawasan peruntukan lainnya seluas 212.832 hektar.

II.1.8 Wilayah Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2012-2032 Kota Tual merupakan wilayah rawan bencana terutama bencana gempa bumi (tektonik), tsunami serta gelombang pasang dan angin topan akibat perubahan iklim. Berikut deskripsi bencana yang berpotensi terjadi di Kota Tual:

1. Daerah rawan gempa bumi (tektonik) meliputi hampir seluruh wilayah Kota Tual
2. Daerah rawan Tsunami meliputi hampir seluruh wilayah Kota Tual
3. Daerah rawan Gelombang Pasang meliputi Pesisir dengan hunian penduduk berjarak kurang dari 50 meter dari garis pasang laut rata-rata seperti desa Dullah Laut dan desa

Ngadi, pesisir dengan kemiringan pantai curam dan tidak memiliki karang penghalang, wilayah-wilayah dengan akses komunikasi rendah seperti di Pulau Kur dan sekitarnya

4. Daerah rawan Angin Topan meliputi daerah pesisir yang menghadap langsung ke laut tanpa vegetasi penghalang, wilayah padat pemukiman dengan dominasi bangunan semi permanen.

II.1.8.1 Bencana Gempa Bumi (Tektonik)

Berdasarkan letak geografisnya hampir seluruh wilayah Kota Tual merupakan daerah dengan resiko gempa bumi yang tinggi. Bencana ini dapat menimbulkan kerusakan sarana & prasarana umum, bangunan penduduk maupun korban jiwa. Gempa bumi yang terjadi di Kota Tual umumnya merupakan gempa bumi dengan episentrum dangkal yang menunjukkan kemungkinan resiko kerusakan cukup besar di permukaan.

Tabel II-4 Wilayah Potensi Bencana Gempa Bumi (Tektonik) di Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan		Tingkat Ancaman
1	Pulau Dullah Utara Ibu Kota Kecamatan Namser	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut 3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit	7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan 9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor	Tinggi
2	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon	5. Dusun Pulau Ut 6. Kelurahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum	Tinggi
3	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel	4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom	Tinggi
4	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaimear	4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin	Tinggi
5	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen	6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol	Tinggi

Sumber: BPBD 2023; Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ada 5 kecamatan di Kota Tual yang memiliki wilayah (desa) yang berpotensi terkena bencana gempa bumi (tektonik).

II.1.8.2 Bencana Tsunami

Kondisi topografi yang landai hampir di seluruh wilayah Kota Tual membuat Kota tual memiliki resiko kejadian Tsunami yang tinggi terutama Kecamatan pulau-pulau Kur dan kecamatan Tayando Tam yang berada di sebelah barat Kota Tual. Beberapa wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana tsunami antara lain adalah:

- a) Daerah-daerah pesisir, terutama pesisir barat wilayah kecamatan Pulau-pulau Kur;
- b) Wilayah pulau dengan morfologi landai dan ketinggian maksimum kurang dari 50 meter;
- c) Wilayah pulau-pulau kecil seperti Pulau Bui, Tengah, Kaimear, woning, Manggi, Fadol, dan pulau-pulau lain sekitarnya;
- d) Wilayah pesisir pulau yang tidak memiliki karang penghalang (*coral reef*).

Tabel II-5 Wilayah Potensi Bencana Tsunami di Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan		Tingkat Ancaman
1	Pulau Dullah Utara Ibu Kota Kecamatan Namser	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut 3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit	7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan 9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor	Rendah
2	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon	5. Dusun Pulau Ut 6. Kelurahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum	Rendah
3	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel	4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom	Tinggi
4	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaimear	4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin	Tinggi
5	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen	6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol	Tinggi

Sumber: BPBD 2023; Data Diolah, 2023

II.1.8.3 Bencana Gelombang Pasang

Perubahan iklim membawa dampak yang besar bagi keadaan bumi dan mendatangkan bencana. Salah satu bencana alam akibat perubahan iklim adalah bencana gelombang pasang yang mengancam kawasan pesisir pantai & mengganggu transportasi antar pulau.

Beberapa wilayah dengan resiko tinggi terhadap bencana gelombang pasang antara lain sebagai berikut:

- Pesisir dengan hunian penduduk berjarak kurang dari 50 meter dari garis pasang laut rata-rata;
- Pesisir dengan kemiringan pantai curam dan tidak memiliki karang penghalang;
- Wilayah-wilayah dengan akses komunikasi rendah seperti di Pulau Kur dan sekitarnya.

Tabel II-6 Wilayah Potensi Bencana Gelombang Pasang di Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan		Tingkat Ancaman
1	Pulau Dullah Utara Ibu Kota Kecamatan Namser	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut 3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit	7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan 9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor	Sedang
2	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon	5. Dusun Pulau Ut 6. Kelurahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum	Tinggi
3	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel	4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom	Sedang
4	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaimear	4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin	Rendah
5	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen	6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol	Tinggi

Sumber: RPJMD Kota Tual 2018-2023, BPBD 2021; Data Olahan, 2023

II.1.8.4 Bencana Angin Topan

Angin Topan merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh adanya pengaruh pola dan kecepatan pergerakan angin. Di Kepulauan Kai termasuk di dalamnya Kota Tual, angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras sedangkan kecepatan angin yang cukup tinggi terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober. Wilayah-wilayah dengan resiko tinggi terhadap bencana angin topan antara lain:

- Daerah pesisir yang menghadap langsung ke laut tanpa vegetasi penghalang;
- Wilayah padat pemukiman dengan dominasi bangunan semi permanen.

Tabel II-7 Wilayah Potensi Bencana Angin Topan di Kota Tual

No.	Kecamatan	Desa/Dusun/Kelurahan		Tingkat Ancaman
1	Pulau Dullah Utara	1. Desa Dullah 2. Desa Dullah Laut	7. Desa Ohoitel 8. Desa Tamedan	Tinggi

	Ibu Kota Kecamatan Namser	3. Desa Fiditan 4. Desa Labetawi 5. Desa Ngadi 6. Desa Ohoitahit	9. Dusun Duroa 10. Dusun Watran 11. Dusun Laerkamor	
2	Pulau Dullah Selatan Ibukota Kecamatan Wearhir	1. Desa Taar 2. Desa Tual 3. Dusun Fair 4. Dusun Mangon	5. Dusun Pulau Ut 6. Kelurahan Ketsoblak 7. Kelurahan Lodar El 8. Kelurahan Masrum	Tinggi
3	Tayando Tam Ibukota Kecamatan Tayando Yamtel	1. Desa Tayando Yamtel 2. Desa Tayando Langgiar 3. Desa Tayando Ohoiel	4. Desa Tayando Yamru 5. Desa Tam Ngurhir 6. Dusun Tam Ohoitom	Tinggi
4	Pulau-Pulau Kur Ibukota Kecamatan Finualen	1. Desa Finualen 2. Desa Tubyal 3. Desa Kaimear	4. Desa Sermaf 5. Desa Lokwirin	Tinggi
5	Kur Selatan Ibukota Kecamatan Kanara	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Hirit 5. Desa Mangur Tiflen	6. Desa Rumoin 7. Desa Mangur Niela 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol	Tinggi

Sumber: BPBD 2022; Data Olahan, 2023

II.1.9 Demografi

Kondisi penduduk suatu daerah secara keseluruhan perlu untuk diketahui dalam perencanaan pembangunan sebagai data untuk pengolahan dan analisis perkembangan pembangunan daerah atau sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan serta berfungsi sebagai informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Tual adalah sebesar 88.269 jiwa dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 89.460 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Pulau Dullah Selatan sebanyak 50.983 jiwa dan terendah pada kecamatan Pulau-pulau Kur sebanyak 2.809 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada lima tahun terakhir adalah 0,34 persen dengan laju pertumbuhan tertinggi terdapat di kecamatan Pulau Dullah Utara yaitu sebesar 1,42 persen dan terendah Kecamatan PP Kur sebesar -0,37 persen.

Tabel II-8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk 2018- 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
PP. Kur	2.851	2.861	2.784	2.794	2.809	-0,37
Kur Selatan	3.658	3.677	3.609	3.652	3.757	0,67
Tayando Tam	7.567	7.745	7.821	7.827	7.837	0,88
P. Dullah Utara	22.753	23.281	23.697	24.089	24.074	1,42
P. Dullah Selatan	51.440	51.071	51.088	50.909	50.983	-0,22
Kota Tual	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,34
Laju pertumbuhan penduduk Kota Tual	2,61	2,68	0,41	2,31	3,13	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, 2023.

Kepadatan penduduk di Kota Tual pada tahun 2022 adalah sebesar 352 jiwa per kilometer persegi yang meningkat dari tahun 2018 sebesar 347 jiwa per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Dullah Selatan yaitu sebesar 1.251 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kecamatan Tayando Tam yaitu sebesar 106 jiwa per kilometer persegi.

Tabel II-9 Tabel Kepadatan Penduduk Tahun

Kecamatan	Luas	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2018	2019	2020	2021	2022
PP. Kur	19,61	145	146	142	142	143
Kur Selatan	28,72	127	128	126	127	131
Tayando Tam	73,74	103	105	106	106	106
P. Dullah Utara	91,57	248	254	259	263	263
P. Dullah Selatan	40,75	1.262	1.253	1.254	1.249	1.251
Kota Tual	254,39	347	348	350	351	352

Sumber: Olahan Bappeda (2023)

Pada tahun 2020, terdapat 44.360 jiwa penduduk laki-laki dan 44.639 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 99,37. Data tersebut menunjukkan terdapat lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki pada hampir seluruh kecamatan Kota Tual, yang juga ditandai dengan rasio jenis kelamin di bawah 100. Rasio jenis kelamin Kecamatan Kur Selatan mencapai 101,73 yang berarti terdapat lebih banyak penduduk laki-laki yaitu sebanyak 1.820 dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 1.789 jiwa. Adapun komposisi penduduk Kota Tual berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Rasio Jenis

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022 (Jiwa)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
PP. Kur	2.809	1.386	1.423	97,40
Kur Selatan	3.757	1.900	1.857	102,32
Tayando Tam	7.837	3.886	3.951	98,35
P. Dullah Utara	24.089	11.991	12.083	99,24
P. Dullah Selatan	50.983	25.440	25.543	99,60
Kota Tual	89.460	44.603	44.857	99,43

Sumber: Olahan Bappeda (2023)

II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Tabel II-11 Pertumbuhan PDRB

No	Tahun	PDRB atas Dasar Harga Konstan (persen)
1	2018	5,98
2	2019	5,87
3	2020	-0,18
4	2021	3,46
5	2022	5,68

Sumber: BPS 2023.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2018 yang semula sebesar 5,98 persen turun menjadi 5,68 persen di tahun 2022.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian Kota Tual memiliki tren penurunan selama periode tahun 2018 -2019 dan kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi *Covid-19*, dimana hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali Jasa Kesehatan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sedangkan pada tahun 2022 kondisi perekonomian berangsur pulih dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah mendapatkan vaksin dan meningkatnya mobilitas masyarakat.

B. Laju Inflasi

Tabel II-12 Laju Inflasi

No	Tahun	Laju Inflasi
1	2018	9,41
2	2019	1,62
3	2020	2,34
4	2021	2,06
5	2022	3,45

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Laju inflasi Kota Tual pada tahun 2018-2022 mengalami trend yang fluktuatif. Inflasi terendah di Kota Tual terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,62 dan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 9,41 persen. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Tual menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istilah tarikan dari sisi permintaan (demand pull inflation) ataupun dari sisi penawaran

(pelaku usaha) atau dikenal dengan istilah dorongan dari sisi penawaran (cost push inflation).

C. PDRB Per Kapita

Tabel II-13 PDRB Per Kapita

No	Tahun	PDRB Atas Harga Konstan (juta rupiah)	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
1	2018	19.262,14	30.912,14
2	2019	20.338,42	33.296,08
3	2020	17.114,62	28.458,16
4	2021	17.162,20	29.025,97
5	2022*	17.588,68	31.101,62

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022.

**) angka sementara*

PDRB per Kapita Kota Tual di tahun 2018 Atas Harga Konstan sebesar Rp 19.262,14 juta naik menjadi Rp 20.338,42 juta dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 17.114,62 juta dan pada tahun 2021 menjadi Rp 17.162,20 juta. Kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi Rp 17.588,68 juta.

PDRB Per Kapita Kota Tual mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi *Covid-19*, dimana hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali Jasa Kesehatan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Sedangkan pada tahun 2020 kondisi perekonomian berangsur pulih sehingga PDRB Per Kapita pun terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022.

D. Indeks Gini (Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini adalah suatu ukuran ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Indeks Gini diperoleh dengan mengukur seberapa jauh distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi dari distribusi yang sempurna, di mana setiap individu memiliki pendapatan atau kekayaan yang sama. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan sedangkan nilai 1 berarti ada ketimpangan yang maksimum. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam populasi tersebut.

Tabel II-14 Rasio Gini Kota Tual

No	Tahun	Rasio Gini
1	2018	0,30
2	2019	0,27
3	2020	0,26
4	2021	0,23
5	2022	0,26

Sumber: BPS, 2023.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Gini Kota Tual pada tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami trend penurunan, yakni 0,30 di Tahun 2018 dan terus menurun hingga 0,23 di Tahun 2021. Namun di Tahun 2022 angkanya kembali naik walaupun tidak signifikan di angka 0,26. Penurunan indeks gini menunjukkan angka yang terus mendekati nol yang artinya kesenjangan pendapatan di Kota Tual sangat kecil bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang terlalu menonjol.

E. Tingkat Kemiskinan

Tabel II-15 Tingkat Kemiskinan

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
1	2018	23,42	17.130
2	2019	22,68	17.030
3	2020	22,51	17.360
4	2021	23,26	17.760
5	2022	20,56	16.010

Sumber : Kota Tual dalam Angka, 2023.

Persentase Penduduk miskin di Kota Tual menunjukkan tingkat penurunan yang signifikan pada periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 adalah 23,42% kemudian turun menjadi 22,68% di tahun 2019 dan menurun lagi menjadi 22,51% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 meningkat 0,75 % dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 23,26 % dan pada tahun 2022 menurun ke angka 20,56 % lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

F. Pengangguran

Pengangguran merupakan isu serius yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia, tingginya angka pengangguran pastinya akan berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi yang harus diatasi dengan efektif. Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada beberapa masalah sosial lainnya di masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan sosial, melambatnya proses pembangunan, meningkatnya tingkat kejahatan, dan sebagainya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tual dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II-16 Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	2018	27.118	22.644	4474	16,49%
2	2019	28.643	25.519	3124	10,91%
3	2020	28.558	25.903	2655	9,29%
4	2021	33.034	30.160	2874	8,70%
5	2022	33.024	30.148	2876	8,70%

Sumber : Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa banyak penduduk usia kerja yang tidak diserap dunia kerja. Trend Penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga terjadi Kota Tual yang semakin baik selama 2018-2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kota Tual terus naik tiap tahunnya.

G. Angka Partisipasi Kerja

Analisis capaian pembangunan bidang urusan ketenagakerjaan di Kota Tual dilakukan terhadap komponen data sebagaimana tercantum pada tabel selanjutnya.

Tabel II-17 Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	70,3 %	N/A	74,38 %	58,33 %	36,02%	11,44
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	28.643	28.588	33.034	33.024	33.002	3,82
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	16,49%	10,91%	9,29%	8,70%	8,70%	-13,76
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58,79 %	57,00%	62,04 %	60,61 %	59,21	0,30
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0

Sumber: BPS & Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2023.

Menurut Badan Pusat Statistik, Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bekerja, dan atau sementara tidak bekerja dan atau sedang menganggur (tidak punya pekerjaan). Pertumbuhan rata-rata Jumlah penduduk angkatan kerja meningkat 3,82 persen pada lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 27.118 jiwa menjadi 33.024 jiwa pada tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi yaitu yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan yang diukur dengan persentase perbandingan angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual selama 2018-2022 mengalami trend penurunan ke arah yang lebih baik selama 5 tahun dengan mencatat

Pertumbuhan rata-rata -13,75%. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 16,49 persen penganggur terbuka dan jumlah tersebut turun menjadi 8,70 persen pada tahun 2022.

II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Indonesia merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah:

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan
- 3) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel II-18 Indeks Pembangunan Manusia

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2018	67,21
2	2019	67,74
3	2020	67,96
4	2021	68,16
5	2022	68,60

Sumber : Kota Tual dalam Angka, 2023.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tual mengalami kenaikan yang konstan yaitu pada tahun 2018 sebesar 67,21 dan pada tahun 2022 menjadi 68,60.

B. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel II-19 Angka Melek Huruf

No	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2018	99,43
2	2019	99,70
3	2020	99,96
4	2021	99,96
5	2022*	99,97
Rata-Rata		99,90

Sumber : Kota Tual dalam angka 2018-2022

**) angka sementara*

Berdasarkan tabel 2.16 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Tual pada tahun 2018-2022 terus meningkat. Secara rata-rata, perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh sebesar 99,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kota Tual sudah sangat baik dari sisi literasi. Nyaris tidak ada penduduk Kota Tual yang tidak mampu baca tulis. Ini menunjukkan sistem pendidikan dasar 9 Tahun yang dijalankan di Kota Tual telah berjalan efektif.

C. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendidikan dalam suatu wilayah atau populasi. Semakin tinggi angka ini, berarti semakin lama pendidikan formal diikuti oleh masyarakat yang ada dalam populasi tersebut. Angka ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan dan memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut. Angka tersebut juga merupakan salah satu aspek pembentuk dari nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Tabel II-20 Persentase Rata-rata Lama Sekolah di Kota Tual Tahun 2018-2022

No	Tahun	Rata-rata lama sekolah
1	2018	10,50
2	2019	10,26
3	2020	10,52
4	2021	10,53
5	2022*	10,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual

**) angka sementara*

Rata-rata lama sekolah di Kota Tual periode tahun 2018-2022 mengalami perubahan kenaikan yang tidak terlalu signifikan tiap tahunnya. Pencapaian angka pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tersebut masih belum memenuhi target pencapaian nasional rata-rata yakni 12 tahun. Namun Pencapaian Kota masih lebih baik dari Rata-rata Kabupaten Kota di wilayah Maluku.

D. Harapan lama sekolah

Tabel II-21 Persentase Rata-rata Harapan Lama Sekolah di Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Harapan lama sekolah	13,89	13,90	13,97	13,98	13,99	0,18

Sumber : Kota Tual dalam angka 2018-2022

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Dari tabel di atas terlihat bahwa, angka harapan lama sekolah di Kota Tual terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14 tahun atau sampai dengan D-II atau Ahli Muda. Pencapaian ini masih harus terus ditingkatkan.

E. Angka Kematian Ibu

Tabel II-22 Angka Kematian Ibu

No	Tahun	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup
1	2018	4
2	2019	2
3	2020	2
4	2021	5
5	2022	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tual, 2023.

Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup setiap tahunnya bervariasi. Angka kematian menurun di tahun 2018-2020 dan meningkat pada tahun 2020-2021 dan menurun lagi di tahun 2021-2022. Namun Nilai ini masih tergolong besar sehingga diperlukan Perhatian pihak-pihak terkait agar bisa terus menekan nilai tersebut.

F. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara periode setelah bayi dilahirkan hingga bayi berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang terkait dengan fluktuasi tingkat kematian bayi.

Tabel II-23 Angka Kematian Bayi

No	Tahun	Angka Kematian Bayi
1	2018	15
2	2019	20
3	2020	22
4	2021	23
5	2022	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tual, 2023.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka kematian Bayi di Kota Tual masih sangatlah tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pihak-pihak terkait agar dapat menekan nilai tersebut di waktu mendatang.

G. Angka Harapan Hidup

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Angka Harapan hidup di Kota Tual mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan ini berarti adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk akses dan kualitas layanan kesehatan.

Tabel II-24 Angka Harapan Hidup

No	Tahun	Angka Harapan Hidup
1	2018	64,89
2	2019	65,21
3	2020	65,47
4	2021	65,68
5	2022	65,81

*Sumber : Kota Tual dalam angka 2018-2022
) angka sementara

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Tual terus membaik selama periode Tahun 2018-2022.

H. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yaitu dalam memperoleh komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar mencakup Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Tual ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-25 IPM Kota Tual Tahun 2018-2022

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kota Tual	67,21	67,74	67,96	68,16	68,60	0,51
Provinsi Maluku	68,87	69,45	69,49	69,71	70,02	0,30
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,53

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2023

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM Kota Tual selama 2018-2022 termasuk dalam kategori sedang yaitu berada antara kisaran nilai 60 sampai kurang dari 70.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup sejak waktu lahir karena komponen ini menunjukkan bahwa panjang usia hidup mengindikasikan kualitas kesehatan penduduk. Selanjutnya untuk mengukur dimensi Indeks pendidikan diukur

dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Tabel II-26 Jumlah Sanggar Seni Budaya Kota Tual

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sanggar Seni Budaya	8	3	4	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, 2023.

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Dan dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa sanggar seni di Kota Tual terus berkurang dengan sangat signifikan dalam periode 2018-2022. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pihak-pihak terkait agar seni budaya tidak ditinggalkan oleh generasi-generasi muda di Kota Tual. Lokasi dari sanggar seni ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-27 Jumlah Sanggar Seni Budaya dan Lokasinya

No	Sanggar Seni Budaya	Lokasi
1	Sanggar Nuhu Evav (SD Neg. 30 Tual)	Jl. Baldu Wahadat, Fiditan
2	Sanggar Fangnan Bok-Bok (SMP Neg.2 Tual)	Jl. Pattimura, Lodar El
3	Sanggar SMP Dullah (SMP Neg. 5 Tual)	Dullah
4	Sanggar Sitanala (SMP Kristen Tual)	Jl Dharma Wanita, Lodar El
5	Sanggar Smansa (SMA Neg. 1 Tual)	Jl. Pattimura, Lodar El
6	Sanggar Mayek (SMA Neg. 5 Tual)	Jl. Pattimura, Lodar El
7	Sanggar Romel	Jl. Pemuda, Lodar El
8	Sanggar Ekal	Jl. Soekarno Hatta, Lodar El
9	Sanggar Umel	Mangon
10	Sanggar Fangnanan Art	Taar
11	Sanggar Manwain Kalle	Finua Tubyal
12	FM Production	Jl. Hi. Moh. Tamher, Tual
13	ESL Sine Arts	Jl. Karel Sadsuitubun, Lodar El
14	Kel. Seni Debus	Ohoi Yamtel
15	Kel. Seni Rasa Peduli (Dan-dan)	Ohoi Langgiar

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, 2023.

Jumlah Kesenian Aktif dan terdaftar di Kota Tual adalah sebanyak 15 Sanggar Seni Budaya pada periode tahun 2018-2022.

B. Olahraga

Tabel II-28 Jumlah Organisasi Olahraga

No	Organisasi Olahraga	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bola Voli	-	-	-	-	9
2	Bola Basket	-	-	-	-	-
3	Sepakbola	35	35	35	35	35
4	Futsal	36	36	38	42	72
5	Sepak Takraw	12	-	-	-	-
6	Tennis	-	-	-	-	-
7	Tenis Meja	-	-	-	-	-
8	Bulutangkis	2	2	2	2	3
9	Billiard	-	-	-	-	-
10	Bowling	-	-	-	-	-
11	Renang	-	-	-	-	-
12	Tinju/Karate/Silat	3	3	3	3	13
13	Sepeda	-	-	-	-	2
14	Binaraga	-	-	-	-	-
15	Panahan	-	-	-	-	-
16	Olahraga Lainnya (<i>e-sport</i>)	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual, 2023.

Organisasi Olahraga sepanjang periode 2018-2022 adalah pada tahun 2018 terdapat 88 Organisasi, pada 2019 terdapat 76 Organisasi, pada tahun 2020 terdapat 78 organisasi, pada tahun 2021 terdapat 82 organisasi dan 2022 terdapat 132 Organisasi Olahraga. Masih sangat diperlukan perhatian pihak-pihak terkait dalam melaksanakan event-event olahraga di Kota Tual, agar terus tumbuh generasi muda dengan komunitas olahraga yang semakin beragam yang diharapkan dapat berprestasi di Tingkat yang lebih prestisius.

II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disajikan secara rinci berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan Angka partisipasi murni digunakan untuk mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang ideal ditempuh pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Perkembangan capaian pelayanan pada bidang urusan pendidikan Kota Tual selama 2018-2022 dapat diikuti pada tabel berikut:

Tabel II-29 Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
<i>Angka Partisipasi Kasar Sekolah</i>						
SD/MI/Paket A (%)	121,42	121,45	116,03	114,05	124,62	0,78
SMP/MTs/Paket B (%)	79,90	74,71	80,68	81,63	123,30	13,43
SMA/MA (%)	88,10	108,80	120,06	119,47	123,93	9,27
<i>Angka Partisipasi Murni Sekolah</i>						
SD/MI/Paket A (%)	97,97	99,74	98,96	98,52	93,59	-1,11
SMP/MTs/Paket B (%)	69,10	69,15	70,65	70,89	73,36	1,52
SMA/MA (%)	68,33	68,18	69,79	79,47	71,22	1,41
Persentase Pendidikan Anak Usia dini (%)	121,86	119,15	107,15	107,54	104,87	-3,60
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan	0,16	0,15	0,13	0,07	0,08	-12,86
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	57,5	68,71	86,52	97,32	97,22	14,45

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, 2023.

Dari tabel capaian di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka partisipasi kasar sekolah dasar Kota Tual pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu 124,62 persen. Nilai APK SD 2018-2022 juga menunjukkan hasil yang baik yaitu 100 persen. APK SMP pada tahun 2019 sebesar 74,71 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 79,90 persen. Sedangkan APK SMA/MA Kota Tual terus mengalami peningkatan dalam periode 2018-2022.

APM SD tahun 2019 dapat dikatakan sangat baik yaitu mencapai 99,74 persen namun capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 93,59 persen. APM SMP dari tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan.

Persentase anak usia dini merupakan indikator yang diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa TK, Rombongan anak, Kelompok bermain dan penitipan anak terhadap seluruh anak usia 4-6 tahun. Indikator ini sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak anak yang disiapkan untuk menerima pendidikan dasar selanjutnya. Persentase PAUD pada tahun 2020 adalah sebesar 97,85 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,81 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penduduk usia pra sekolah telah mengikuti pendidikan anak usia dini di Kota Tual.

Perbandingan guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar di Kota Tual selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan memadai karena berkisar antara 13-15 orang dimana interval tersebut masih di bawah target maksimal yaitu 1:23. Rasio guru terhadap murid dilandasi dengan pemikiran bahwa dengan semakin sedikitnya jumlah murid yang dihadapi seorang guru diharapkan perhatian guru dalam proses pembelajaran tiap individu semakin baik sehingga kualitas pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Guru berkualifikasi SI-D-IV merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mana bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya sekolah serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Persentase guru berijazah SI-D-IV Kota Tual tahun 2020 adalah sebanyak 49,96 persen dari total seluruh guru yang ada. Capaian tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 73,22 persen .

B. Kesehatan

1. Sarana & Prasarana Kesehatan

- Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dimana pelayanan kesehatan dasar anak merupakan target utama operasionalnya. Penyelenggaraan posyandu dilakukan bersama dengan partisipasi masyarakat guna memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Rasio Posyandu menunjukkan kualitas daya pelayanan fasilitas tersebut dalam

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan Balita dimana semakin tinggi rasio Posyandu mengindikasikan semakin baik daya pelayanannya.

Tabel II-30 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan(%)
Jumlah Posyandu (unit)	90	92	92	92	94	0,83
Jumlah Balita (Balita)	5720	5533	5022	4722	4373	-6,47
Rasio Posyandu	15,73	16,63	18,32	19,48	20,78	7,22

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022; Hasil Olahan, 2023.

**) angka sementara*

Perkembangan rasio posyandu 2018-2022 mengalami pertumbuhan meningkat. Pada tahun 2018 rasio posyandu adalah sebesar 15,73 yang berarti terdapat 15-16 posyandu bagi setiap 1000 jiwa balita kemudian pada tahun 2022 rasio ini menjadi 20,78 yang berarti terdapat 20-21 posyandu yang melayani atau setiap 1 unit posyandu melayani 50-53 balita.

2. Kebidanan

- Cakupan Komplikasi Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Indikator ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap kesakitan dan permasalahan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dangi dalam masa nifas yang mengancam jiwa ibu dan atau bayi. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tual tahun 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II-31 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Komplikasi yang ditangani	18	58	43	45	58	57,2
Jumlah ibu dengan komplikasi	18	58	43	45	58	57,2
Cakupan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100	0

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023.

Pada tahun 2018 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 100 persen atau sebanyak 18 orang dari total 18 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif. Selanjutnya jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan meningkat yaitu mencapai 58 pada tahun 2019 dan ditangani 58 ibu sehingga persentase cakupan penangan 100 persen. Pada tahun 2020 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 100 persen atau data menunjukkan bahwa sebanyak 43 orang dari total 43 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif. Hal ini setiap tahunnya ini terus dipertahankan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Data penolong kesehatan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan pada saat persalinan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan merupakan persentase jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022 ditunjukkan tabel berikut.

Tabel II-32 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	194	1.233	1.088	1.065	1.126	131,85

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022; Kota Tual Dalam Angka, 2022; Hasil Olahan 2023.

Tabel diatas menunjukkan selama 2018-2022 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan fluktuatif, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan namun, pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan.

3. Bayi & Balita

- Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Indikator ini merupakan persentase Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari total jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada. Semakin besar persentase cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-33 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	7	10	4	2	0	-41,79
Jumlah seluruh balita gizi buruk	7	10	4	2	0	-41,79
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	7	10	4	2	0	-41,79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023; Hasil Olahan, 2023.

Berdasarkan data tersaji, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tual selama 2018-2022 seluruhnya mendapatkan perawatan. Data ini menunjukkan adanya keberhasilan penanganan perawatan Balita Gizi Buruk oleh Pemerintah Kota Tual melalui berbagai program dan kegiatan terkait.

- Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tercapainya imunisasi pada bayi secara lengkap (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar yang meliputi Dosis BCG, 3 Dosis DPT,3 Dosis Polio, 5 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak pada bayi; 2 Dosis TT pada ibu hamil & wanita usia subur; dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 Dosis TT pada anak usia sekolah. Pemberian imunisasi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mempunyai dampak bagi peningkatan usia harapan hidup yang juga berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Adapun persentase Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel II-34 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah desa/kelurahan	30	30	30	30	30	0%
Jumlah desa/kelurahan UCI	25	25	24	19	21	-3,58

Cakupan desa/kelurahan UCI	83,3 %	83,3 %	80 %	63 %	70 %	-3,52
----------------------------	--------	--------	------	------	------	-------

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023; Hasil Olahan, 2023.

Berdasarkan data pada tabel 2.52. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang tidak begitu berbeda berkisar antara 80-83.3 persen dengan perkembangan rata-rata tahunan 5 tahun terakhir sebesar -3,52 persen. Ini berarti bahwa sekitar 3,5 persen dari seluruh desa maupun kelurahan yang ada di Kota Tual sudah termasuk dalam Desa/kelurahan UCI. Kondisi tersebut cukup baik karena telah mencakup sebagian besar desa/kelurahan yang ada sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat melayani seluruh desa/kelurahan.

C. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

1. Pekerjaan umum

- Proporsi jalan dalam kondisi baik

Jalan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam keseharian sehingga kondisi yang baik dapat menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran berbagai aktivitas. Kondisi tersebut merupakan salah satu pendukung pengembangan wilayah secara infrastruktur maupun secara ekonomi. Proporsi jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan seluruhnya. Perkembangan jalan dalam kondisi baik Kota Tual 2018-2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-35 Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jalan dalam kondisi baik (Km)	202,252	207,750	213,377	216,988	233,159	3,64
Panjang jalan seluruhnya (Km)	330,601	330,601	330,601	330,601	330,601	0
Persentase jalan dalam kondisi baik	61,18%	62,84%	64,54%	65,63%	70,53%	3,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2023.

Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Kota Tual selama tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 3,64 persen. Persentase jalan dalam kondisi baik

terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,18 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2022 mencapai 70,53 persen.

- Rasio Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah. indikator ini berguna untuk melihat tingkat kemudahan akses ke semua bagian kota. Perkembangan rasio jalan per satuan penduduk di Kota Tual periode 2018-2022 ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel II-36 Rasio Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Tual Periode 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Panjang jalan seluruhnya (Km)	330,601	330,601	330,601	330,601	330,601	0
Jumlah Penduduk (jiwa)	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,34
Rasio panjang jalan per satuan penduduk	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2023.

Berdasarkan tabel 2.54 rasio panjang jalan per satuan penduduk Kota Tual tidak mengalami perubahan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 rasio jalan per satuan penduduk sebesar 0.004 km/jiwa dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2022.

D. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-37 Capaian penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tual tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio rumah layak huni (unit/orang)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0
Rasio permukiman layak huni (ha)	0,90	0,99	1	0,98	0,94	-0,43
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	75	75	75	75	76	0,33
Presentasi lingkungan pemukiman kumuh	93,7	95,7	97,7	97,7	94,7	0,29
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	90	92	93	92	98	2,19

Persentase rumah tinggal bersanitasi	58,86	60,25	NA	NA	NA	2,36
--------------------------------------	-------	-------	----	----	----	------

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tual, 2023.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-38 Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	30	24	18	15	12	-20,42
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	31,43	36,52	28,32	28,88	29,78	-0,29
Persentase Penegakan Perda	75	78	80	84	86	3,49

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual, 2023.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami penurunan dari 30 kasus menjadi 12 kasus. Rasio polisi pamong praja Kota Tual tahun 2022 adalah 29,78 per 1000 penduduk, yang berarti setiap 1000 jiwa penduduk terdapat 30 orang petugas polisi pamong praja. Persentase penegakan Perda mengalami perkembangan dari tahun 2018 hingga 2022 dari angka 75 persen menjadi 86 persen. Capaian tersebut perlu untuk ditingkatkan guna menjamin suasana kondusif dan tertib.

F. Sosial

1. PMKS tertangani

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah kelompok atau individu karena hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi & kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani & sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan tersebut antara lain kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Memajukan taraf hidup PMKS yang ada di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi- instansi

teknis terkait. Perkembangan cakupan PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-39 PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah PMKS tertangani (orang)	93	66	153	106	1.516	350,56
Jumlah PMKS seluruhnya (orang)	38.154	37.998	1.008	1.481	1.626	-10,26
Persentase PMKS tertangani (%)	0,24	0,17	15,18	7,16	93,23	2487,37

Sumber: Dinas Sosial Kota Tual, 2023; data olahan, 2023.

Jumlah PMKS tertangani mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan selama 5 tahun mencapai 350,56 persen namun jumlah PMKS seluruhnya sebaliknya mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -10,26 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan jumlah PMKS yang cukup signifikan pada tahun 2020 ke 2022. Persentase PMKS Kota Tual pada tahun 2022 adalah sebesar 93,23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,24 persen. Persentase terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,17 persen dengan jumlah PMKS tertangani sebanyak 66 orang dari total 37.998 orang PMKS yang ada saat itu. Hal tersebut terjadi karena tidak terdapat dukungan dana APBN melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dan dukungan dana APBD untuk bantuan modal usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi.

II.3.2 Fokus Layanan Wajib Bukan Urusan Dasar

A. Tenaga kerja

Analisis capaian pembangunan bidang urusan ketenagakerjaan di Kota Tual dilakukan terhadap komponen data sebagaimana tercantum pada tabel selanjutnya.

Tabel II-40 Indikator Ketenagakerjaan Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	70,3 %	0 %	74,38 %	58,33 %	36,02%	11,44
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	28.643	28.588	33.034	33.024	33.002	3,82
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	39,59%	37,78%	37,41%	36,01%	N/A	0,48

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	16,49%	10,91%	9,29%	8,70%	N/A	-18,35
Presentasi Keselamatan dan Perlindungan Kerja (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2023.

Menurut Badan Pusat Statistik, Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bekerja, dan atau sementara tidak bekerja dan atau sedang menganggur (tidak punya pekerjaan). Pertumbuhan rata-rata Jumlah penduduk angkatan kerja meningkat 3,82 persen pada lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 28.643 jiwa menjadi 33.002 jiwa pada tahun 2022. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah Keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi yaitu yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan yang diukur dengan persentase perbandingan angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah penganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa banyak penduduk usia kerja yang tidak diserap dunia kerja. Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka Kota Tual selama 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang baik yaitu mengalami penurunan -18,35 persen. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 16,49 persen penganggur terbuka dan jumlah tersebut turun menjadi 8,70 persen pada tahun 2021.

B. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

- Persentase angkatan kerja perempuan

Persentase angkatan kerja perempuan merupakan persentase rasio jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perempuan angkatan kerja yang bekerja secara aktif. Perkembangan Persentase angkatan kerja perempuan 2018-2022 di Kota Tual sebagaimana digambarkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-41 Persentase Angkatan Kerja Perempuan 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)

Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan (jiwa)	8.697	8.787	8.797	8.897	8.983	0,81
Angkatan kerja perempuan (jiwa)	10.219	10.234	10.267	10.280	10.309	0,23
Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	85,11	85,86	85,86	86,55	87,14	0,59

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Tual, 2022; Data Olahan 2023

Dari data tercatat, Perkembangan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Tual periode 2018 sampai 2022 terus meningkat setiap tahunnya. Dan rata-rata perkembangan tahunan mencapai 0,59 persen. Pekerja perempuan yang aktif bekerja selama lima tahun belakangan sebanyak 10.219 sampai 10.309 jiwa. Angka tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat peran perempuan yang juga penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga.

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak di Kota Tual Selama 2018-2022 dapat diikuti pada tabel berikut ini:

Tabel II-42 Indikator Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	83,58	91,52	99,46	107,4*	115,34*	8,39*
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	0,05	0,1	0,15	0,2*	0,25*	52,08*
Rasio KDRT	0,04	0,12	0,12	0,12*	0,12*	50*
Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan di unit pelayanan	100	100	100*	100*	100*	0
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	-	-	2	1	0,6 %
Cakupan penegakan hukum atas kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (%)	15	15	10	35	38	25,6 %

Sumber: DP3AP2KB 2022; Data Olahan Bappeda 2023

*) angka sementara

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2018-2022 dari angka 83,58% ke 115,34 % hal ini menunjukkan partisipasi perempuan di Kota Tual mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Rasio KDRT pada tahun 2018-2022 sebesar 0,04 kemudian konstan pada angka 0,12. Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan di unit pelayanan sangat baik dimana semua perempuan dan anak korban kekerasan seluruhnya mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu yang ditunjukkan dengan persentase 100 persen.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2021 ke 2022 dari 2 kasus menjadi 1 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

C. Pangan

1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Penyediaan pangan adalah salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang mana erat kaitannya dengan perbaikan gizi yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan terutama dari sisi kesehatan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta terjamin stabilitasnya. Ketersediaan pangan utama merupakan persentase perbandingan rata-rata ketersediaan pangan tahunan terhadap jumlah penduduk suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komoditi pangan utama yang merupakan kebutuhan dasar penduduk Kota Tual berupa beras, ketela pohon, jagung dan ubi-ubian. perkembangan ketersediaan pangan utama Kota Tual Kurun waktu 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-43 Ketersediaan Pangan Utama Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	2.836.967	4.130.457	8.035.520	26.725.689	34.154.770	100,13

Jumlah penduduk (Jiwa)	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,34
Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa)	32,14	46,60	90,29	299,38	381,79	99,46

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, 2023.

Dari data pada tabel menunjukkan ketersediaan pangan utama Kota Tual umumnya terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 99,46 persen. Pada tahun 2018 jumlah ketersediaan pangan Kota Tual adalah sebesar 32,14 kg/jiwa yang berarti untuk setiap 1 orang penduduk terdapat sebanyak 32,14 kg ketersediaan bahan pangan utama yang dikonsumsi selama setahun. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2018 dimana persentase ketersediaan pangan meningkat menjadi 381,79 kg/jiwa/tahun di tahun 2022.

2. Ketersediaan energi dan protein Kota Tual tahun 2018-2022

Indikator ketersediaan energi per kapita dan protein per kapita menunjukkan angka kecukupan energi dan protein sebagai salah satu kebutuhan dasar kecukupan pangan. Perkembangan konsumsi energi dan protein perkapita perhari ditunjukkan pada tabel berikut:

D. Pertanian

1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat merupakan persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah. Untuk konteks Kota Tual, mengingat Luas wilayahnya sebagian besar adalah wilayah perairan laut maka angka pembanding yang dijadikan penyebut luas wilayah darat agar mendapatkan angka yang rasional. Persentase luas lahan bersertifikat Kota Tual ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel II-44 Persentase Luas Lahan (Ha) Bersertifikat Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas lahan bersertifikat	1475,77	1563,39	1813,01	1969,78	2126,18	9,62
Luas wilayah	20227,45	20227,45	20227,45	20227,45	20227,45	0
Persentase Luas lahan bersertifikat	17,52	18,56	21,52	23,38	25,24	9,62

Sumber: Badan Pertanahan dan Penataan Ruang Maluku Tenggara, 2023.

2. Luas Lahan Milik Pemerintah Kota

Luas lahan milik pemerintah Kota Tual adalah lahan-lahan yang terdaftar sebagai hak milik Pemerintah Kota Tual yang digunakan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan, taman, hutan kota, sekolah dan sebagainya. Persentase Luasan tanah bersertifikat milik Pemerintah Kota Tual pada tahun 2018 adalah sebesar 20 persen dari total luas wilayah darat Kota Tual dan pada tahun 2020 menurun menjadi 5,16 persen dari total luas wilayah darat Kota Tual. Data tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-45 Luas Lahan Milik Pemerintah Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas lahan bersertifikat milik pemerintah Kota Tual (m2)	20.000	16.746	5.157	-	-	-42,74
Luas wilayah darat Kota Tual (km2)	24.118	25.656	138.882	19.500		65,44
Presentasi luas lahan milik pemerintah kota	82,93	65,27	3,71	-	-	-57,81

Sumber: Bagian Pemerintahan SETDA Kota Tual, 2023.

3. Penerbitan izin lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal perusahaan bersangkutan yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.

E. Lingkungan Hidup.

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup di kota Tual menurut data rinci terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-46 Indikator Urusan lingkungan hidup

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah sampah tertangani (ton)	13.464,4	13.738,24	14011,7	14.284,34	14.560,28	1,98
Persentase Cakupan area pelayanan terhadap luas wilayah (%)	52,01	52,01	52,01	52,01	52,01	0

Sumber: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Tual, 2023.

Penanganan sampah di Kota Tual pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 1,98 persen. Persentase cakupan area

pelayanan terhadap luas wilayah selama lima tahun terakhir mencapai 52,01 persen dari total luas wilayah seluruhnya.

F. Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil

1. Rasio penduduk ber-KTP & cakupan KTP yang diterbitkan

Rasio penduduk ber-KTP & cakupan KTP ber-NIK yang diterbitkan merupakan merupakan indikator yang membandingkan jumlah penduduk ber-KTP usia 17 tahun atau lebih dari itu terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun atau lebih dari itu atau telah menikah. Indikator cakupan penerbitan KTP ber-NIK adalah indikator penerbitan ataupun kepemilikan KTP ber-NIK terhadap jumlah penduduk wajib KTP. Perkembangan kedua indikator ini ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-47 Rasio Penduduk ber-KTP & Cakupan KTP yang diterbitkan, Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun yang Ber-KTP (jiwa)	42.445	45.709	46.084	47.292	45.028	1,59
Jumlah Penduduk Usia > 17 Tahun atau telah Menikah (Wajib KTP) (jiwa)	60.174	61.463	62.289	63.384	64.567	1,78
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,71	0,74	0,74	0,75	0,70	-0,19
Cakupan penerbitan KTP (%)	70,54	74,37	73,98	74,61	69,74	-0,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023; data olahan 2023

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami penurunan dengan pertumbuhan -0,19 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebesar 0,71 atau penerbitan KTP-nya mencakup 70,54 persen dimana terdapat 42.445 KTP yang diterbitkan dari total 60.174 penduduk wajib KTP. Pada tahun 2022 sebesar 0,70 atau penerbitan KTP-nya mencakup 69,74 persen dimana terdapat 45.028 KTP yang diterbitkan dari total 64.567 penduduk wajib KTP. Rasio dan cakupan tersebut perlu ditingkatkan lagi agar mencakup seluruh penduduk Kota Tual yang mana mempunyai dampak yang sangat penting bagi pembangunan.

2. Indikator Kependudukan lainnya

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan pelayanan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan terhadap komponen data seperti Jumlah penduduk berakte kelahiran, Jumlah pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala Kota, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Data tersebut sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-48 Indikator Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah penduduk berakte kelahiran	26.495	29.274	31.484	34.316	27.102	1,50
Jumlah pasangan berakte nikah	28.248	26.739	25.501	24.471	9.815	-18,47
Ketersediaan database kependudukan skala Kota (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	Ada	-
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023; data olahan 2023

Ketersediaan database kependudukan skala Kota dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah tersedia dan diterapkan selama periode 2018-2022. Jumlah penduduk berakte kelahiran mengalami peningkatan 26.495 jiwa meningkat menjadi 27.102 jiwa pada tahun 2022. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap kelahiran ke pemerintah setempat yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Demikian juga dengan jumlah pasangan berakte nikah yang pada tahun 2018 sebanyak 28.248 pasangan menurun menjadi 9.815 pasangan pada tahun 2022. Database kependudukan skala Kota telah tersedia dan digunakan selama 2018-2022 sampai saat ini kemudian KTP nasional berbasis NIK juga telah diterapkan di Kota Tual selama periode 2018-2022.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Indikator sarana prasarana Pemerintahan Desa diperoleh dengan mencari persentase perbandingan sarana-prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik terhadap jumlah seluruh pemerintahan desa. Pada tahun 2018 terdapat 15 persen kantor pemerintahan desa dalam kondisi baik dari total 27 desa yang ada. Pada tahun 2022 mencapai 80 persen dari total 27 desa yang ada di Kota Tual.

2. Persentase PKK Aktif

Pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK adalah kegiatan kelompok perempuan yang umumnya adalah ibu rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan di tingkat keluarga dimana peran PKK sangat strategis untuk mengimplementasikan visi misi pembangunan di lingkungan yang sangat kecil. Presentasi PKK aktif merupakan indikator yang membandingkan jumlah PKK aktif

terhadap total seluruh kelompok PKK. Perkembangan persentase PKK aktif ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-49 Presentasi PKK Aktif, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah PKK aktif (Kelompok)	35	35	35	35	35	0%
Jumlah PKK (Kelompok)	35	35	35	35	35	0%
Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	0%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, 2022; data olahan 2022

Persentase PKK aktif Kota Tual selama 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang stagnan. Pada tahun 2018-2022 terdapat 35 kelompok PKK aktif dari total seluruhnya sebanyak 35 kelompok.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tolok ukur kependudukan untuk menunjukkan perubahan perkembangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nilai negatif pada indikator ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk dan sebaliknya nilai positif menunjukkan peningkatan jumlah penduduk. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kota Tual mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah sebesar 1,42 persen di Kecamatan Dullah Utara & Laju pertumbuhan terendah terdapat di Kecamatan Pulau-pulau Kur yaitu sebesar -12,76 persen. Laju pertumbuhan penduduk dapat diamati dalam table berikut :

Tabel II-50 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tual Tahun 2018-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan 2018-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
PP. Kur	2,851	2,861	2,784	2,794	2,809	-12,76
Kur Selatan	3,658	3,677	3,609	3,652	3,757	0,68
Tayando Tam	7,567	7,745	7,821	7,827	7,837	0,88
P. Dullah Utara	22,753	23,281	23,697	24,089	24,074	1,42
P. Dullah Selatan	51,440	51,071	51,088	50,909	50,983	-0,22
Kota Tual	88,269	88,635	88,999	89,271	89,460	0,34

Sumber: Dinas kependudukan & Catatan sipil, 2023; data olahan 2023.

2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah persentase perbandingan jumlah akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur. Indikator ini digunakan untuk mengetahui cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana. Rasio akseptor KB di Kota Tual selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 7,28 persen. Rasio tertinggi sebesar 41 persen terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 6125 jiwa terhadap total seluruh pasangan usia subur sebanyak 14893 pasangan. Rasio terendah sebesar 30 persen terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah akseptor KB sebanyak 5523 jiwa terhadap total seluruh pasangan usia subur sebanyak 14125 pasangan. Data rasio akseptor KB di Kota Tual selama kurun 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-51 Rasio Akseptor KB Di Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah akseptor KB	6,155	5,523	5,693	5,863	6,125	6,38
Jumlah pasangan usia subur	13,723	14,125	14,425	14,598	14,893	2,03
Rasio akseptor KB	32%	30%	39,4%	40%	41 %	7,28

Sumber: DPPK & PA Kota Tual, 2023;

I. Perhubungan.

1. Jumlah Arus penumpang kapal

Indikator jumlah arus penumpang kapal menunjukkan besaran pergerakan penduduk yang dilakukan melalui pelabuhan penumpang kapal di Kota Tual. Jumlah arus penumpang kapal di Kota Tual selama 2018-2022 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 35,30 persen setiap tahunnya. Jumlah arus penumpang kapal yang masuk ke Kota Tual pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.345 jiwa yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 4.100 jiwa kemudian jumlah arus penumpang Kapal yang Keluar dari Kota Tual mengalami pertumbuhan mencapai 47,19 persen setiap tahunnya. Jumlah arus penumpang kapal yang keluar pada tahun 2018 sebanyak 789 jiwa dan pada tahun 2022 berjumlah 3.500 jiwa. Perkembangan jumlah arus penumpang kapal 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-52 Arus Penumpang Kapal, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)

Jumlah arus penumpang Kapal yang masuk ke Kota Tual (Jiwa)	1345	1412	2400	3800	4100	35,30
Jumlah arus penumpang Kapal yang Keluar dari Kota Tual (Jiwa)	789	1125	2100	3000	3500	47,19

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tual, 2023.

2. Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek dimana Trayek diartikan sebagai lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Tabel II-53 Jumlah Izin Trayek di Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	3	3	3	3	3	0%
Rasio izin trayek	0,08	0,09	0,09	0,09	0,11	0,09

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tual, 2023.

3. Jumlah Uji Kir

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pertumbuhan jumlah uji Kir di Kota Tual pada tahun 2018 sebanyak 85 kendaraan sedangkan pada 4 tahun terakhir tidak dilaksanakan Uji Kir.

4. Jumlah Pelabuhan dan Terminal

Jumlah pelabuhan dan terminal di Kota Tual menunjukkan perkembangan yang stagnan. Pertumbuhan jumlah pelabuhan laut sebesar 0 persen. Jumlah terminal angkutan darat sebanyak 2 unit yang seluruhnya terletak di kelurahan Masrum merupakan terminal kendaraan tipe c.

Data jumlah pelabuhan terminal dan pelabuhan dicantumkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-54 Jumlah Pelabuhan Dan Terminal Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Pelabuhan Laut	9	9	9	9	9	0%

Jumlah Dermaga lainnya	11	11	11	11	11	0%
Jumlah terminal angkutan darat	2	2	2	2	2	0%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tual, 2023.

5. Persentase layanan angkutan darat

Persentase layanan angkutan darat merupakan persentase perbandingan jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Indikator ini menunjukkan kemampuan angkutan darat dalam melaksanakan fungsi transportasi melayani kebutuhan yang ada. Perkembangan persentase layanan angkutan darat ditunjukkan dalam tabel

Tabel II-55 Persentase Layanan Angkutan Darat, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Angkutan Darat	394	437	437	440	535	8,3
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	15.546	16.123	17.567	18.720	20.520	7,21
Persentase Layanan Angkutan Darat	2,55	2,71	2,49	2,35	2,61	0,90

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tual, 2023.

Persentase layanan angkutan darat selama periode 2018-2022 rata-rata sebesar 0,90 persen. Pada tahun 2018 terdapat 394 angkutan darat yang beroperasi melayani 15.546 jiwa penumpang dengan cakupan pelayanan hanya sebesar 2,55 persen. Pada tahun 2022 terdapat 535 angkutan darat yang beroperasi melayani 20.520 jiwa penumpang dengan cakupan pelayanan meningkat menjadi 2,61 persen. Kecilnya cakupan pelayanan angkutan darat diasumsikan karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan meningkatnya jumlah kendaraan sewa roda dua yang beroperasi di Kota Tual.

6. Cakupan pemasangan Rambu-rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu komponen yang menunjang kelancaran berlalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan sehingga keberadaannya diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan. Perkembangan cakupan pemasangan rambu lalu lintas Kota Tual selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-56 Cakupan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Rambu-Rambu Yang tersedia	43	83	75	81	95	27,17
Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	50	100	100	100	150	37,5
Presentase Cakupan Pemasangan Rambu-rambu	86	83	75	81	63	-6,84

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tual, 2023.

Cakupan pemasangan rambu lalu lintas mengalami penurunan dari 86 persen pada tahun 2018 menjadi 63 persen di tahun 2022. Pada tahun 2018 terdapat 43 rambu yang tersedia dari total 50 rambu yang seharusnya ada sesuai kebutuhan. Cakupan tersebut menurun menjadi 63 persen pada tahun 2022 dimana terdapat 95 rambu dari total 150 rambu yang dibutuhkan. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan agar cakupannya mencapai 100 persen demi menjaga keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat seberapa luas jangkauan jaringan telekomunikasi pada luasan wilayah suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari perbandingan luas wilayah tercover pelayanan jaringan telekomunikasi dengan luas wilayah daerah tersebut. Perkembangan cakupan layanan telekomunikasi ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-57 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tual Tahun 2018- 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Luas wilayah ter- coverage (km ²)	206,06	206,06	230,11	230,11	230,11	2,92
Luas wilayah (km ²)	254,39	254,39	254,39	254,39	254,39	0
Cakupan layanan telekomunikasi (%)	81	81	90,5	90,5	90,5	2,93

Sumber: Kantor Cabang Telekomunikasi Kota Tual, 2023; Kota Tual Dalam Angka 2023 [BPS].

2. Persentase Penggunaan Telepon

Persentase penggunaan telepon adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk pengguna HP/Telepon terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Perkembangan persentase penduduk pengguna HP/Telepon di Kota Tual ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-58 Persentase Penduduk Pengguna HP/Telepon Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Penduduk pengguna HP/telepon (jiwa)	1.965	2.953	3.681	6.414	6.230	36,58
Jumlah penduduk (jiwa) (DISDUKCAPIL Kota Tual)	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,34
Persentase penduduk pengguna HP/telepon	2,23	3,33	4,14	7,18	6,96	36

Sumber : Kota Tual dalam angka Tahun 2023 [BPS]; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, 2023.

K. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah organisasi perekonomian rakyat yang dioperasikan untuk kepentingan bersama anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Perkembangan persentase koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-59 Persentase Koperasi Aktif Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah Koperasi aktif (unit)	229	229	169	105	107	-15,54
Jumlah seluruh koperasi (unit)	348	348	352	355	358	0,71
Persentase Koperasi aktif	65,8	65,8	48	29,6	29,9	-16,09

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tual, 2023.

Persentase Koperasi aktif selama tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 persentase koperasi aktif sebesar 65,8 persen dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 229 unit dari total 348 koperasi yang ada. Pada tahun 2022 persentase jumlah koperasi aktif menurun menjadi 29,9 persen yaitu terdapat 107 unit koperasi aktif dari total seluruh koperasi sebanyak 358 unit.

2. Persentase usaha mikro kecil

Persentase usaha kecil dan mikro selama tahun 2018-2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai 90,2 persen. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 jumlah usaha mikro dan kecil bertambah dari 8.576 unit menjadi 9.671 unit dan diikuti dengan kenaikan jumlah seluruh UKM dari 10.280 unit menjadi 11.986 unit, hal ini mengakibatkan persentase usaha Mikro dan Kecil menurun dari tahun 2021 sebesar 83,4 persen menjadi 80,7 persen.

Uraian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-60 Persentase Usaha Mikro & Kecil Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah usaha mikro & kecil (unit)	5.430	6.257	6.374	8.576	9.671	16,10
Jumlah seluruh UKM (unit)	6.919	7.050	7.065	10.280	11.986	245.65
Persentase Usaha Mikro & kecil (%)	78,5	88,8	90,2	83,4	80,7	0,98

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tual, 2023.

L. Penanaman Modal

Penanaman Modal mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu wilayah karena mempengaruhi pendapatan dari daerah bersangkutan. Analisis Pencapaian Pembangunan bidang urusan Penanaman Modal Kota Tual dilakukan terhadap indikator jumlah investor, Nilai Investasi dan perubahan nilai investasi sebagaimana tercantum pada tabel selanjutnya.

Tabel II-61 Indikator Pelaksanaan Bidang Urusan Penanaman Modal Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	585	632	678	581	396	-7,71
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar Rupiah)	163.450.600	170.245.300	172.674.500	202.148.000	39.179.800.000	19,33
Kenaikan/ Penurunan nilai Realisasi PMDN	170.503.558	152.821.000	163.554.500	98.180.000	714.000.000	125,98

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Tual, 2022; data olahan 2022

Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Tual saat ini adalah sebanyak 582 investor sesuai data terlampir. Jumlah investor terbanyak ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 678 investor, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan adalah -7,71 persen selama lima tahun terakhir. Jumlah imvestasi berskala nasional mengalami pertumbuhan selama 5 tahun terakhir dan puncaknya menjadi 39.179.800.000 di tahun 2022.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi olahraga yang tercatat pada tahun 2018 menurut data Dinas Pemuda & Olahraga adalah sebanyak 89 organisasi, tahun 2019 berjumlah 77 organisasi, tahun 2020 berjumlah naik menjadi 79 organisasi olahrag, pada tahun 2021 naik menjadi 83 organisasi dan tahun 2022 menjadi 126 organisasi olahraga. Hal ini menunjukkan minat dari masyarakat Kota Tual di bidang olahraga.

N. Statistik

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan data statistik sebagai dasar dalam analisis pelaksanaan pembangunan maupun perumusan kebijakan pembangunan. Data statistik Kota Tual mengacu pada Publikasi dari Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara meliputi publikasi seperti Kota Tual Dalam Angka, PDRB Kota Tual dan sebagainya. Perkembangan penyelenggaraan urusan statistik Kota Tual ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-62 Ketersediaan Data Statistik

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tual Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PDRB Kota Tual	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual, 2023

O. Persandian

Belum ada Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

P. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kota Tual ditunjukkan melalui data pada tabel berikut ini:

Tabel II-63 Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah grup sanggar budaya (kelompok)	8	4	5	1	1	-26,25
Jumlah Seluruh Sanggar Budaya	15	15	15	15	15	0
Persentase sanggar budaya aktif	53,33	26,67	33,33	6,67	6,67	14,98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari data pada tabel 2.101 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah sanggar seni budaya aktif sebanyak 8 grup, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah grup sanggar seni budaya terus mengalami penurunan. Jumlah sanggar seni budaya selama lima tahun terakhir sebanyak 15 sanggar. Penyelenggaraan bidang urusan kebudayaan perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencakup keempat indikator yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan ini.

Q. Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan di daerah penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan umum dan meningkatkan *soft skill* individu melalui berbagai pengetahuan disajikan dalam bahan bacaan yang dikelolanya. Perkembangan penyelenggaraan bidang urusan perpustakaan ditunjukkan melalui analisis data indikator berikut ini

Tabel II-64 Indikator Penyelenggaraan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	5812	6225	217	1175	240	68,12
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	8260	8260	8260	4455	4455	-11,52
Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku (unit OPD)	8	8	8	8	8	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Berdasarkan data terlampir diketahui bahwa pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 68,12 persen selama lima tahun terakhir.

R. Kearsipan

Arsip merupakan rekaman peristiwa dalam berbagai media sesuai perkembangan teknologi dapat menjadi aset berharga yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Bidang urusan Kearsipan adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan arsip yang dapat menunjang kegiatan administrasi, perencanaan, pengendalian dan lain sebagainya. Penyelenggaraan bidang urusan kearsipan di Kota Tual dapat diketahui dengan melihat indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan. Selama lima tahun OPD yang mengelola arsip ada sebanyak 8 OPD.

II.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Kota Tual merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut yaitu sebesar kurang lebih 19.088 km² dari total luas wilayah sebesar kurang lebih 19.342,39 km². Ini mengindikasikan bahwa sektor kelautan & perikanan seyogyanya merupakan sektor andalan dalam menjalankan roda perekonomian. Produksi perikanan Kota Tual selama kurun waktu 2018-2021 mengalami fluktuasi

dengan kecenderungan meningkat namun hal tersebut masih cukup jauh dari target daerah yang ditetapkan. Perkembangan produksi perikanan Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-65 Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah produksi Ikan (Ton)	33.192,28	30.638,72	28.736,88	29.839,03	30.088,17	-2,31
Target daerah	66.330,00	66.992,00	67.665,00	68.338,00	69.021,00	1,01
Persentase Produksi perikanan	50,04	45,73	42,47	43,66	43,59	-3,28

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2023; data olahan 2022

Selama kurun waktu dimaksud, produksi ikan mengalami penurunan sebesar -2,31 persen setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan dengan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 33.192,28 Ton dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah produksi sebesar 28.736,88 Ton. Walaupun demikian, jumlah tersebut belum mencapai target daerah untuk produksi perikanan yang ditetapkan setiap tahunnya. Persentase produksi menunjukkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan terhadap target daerah pada tahun berkenaan. Persentase produksi perikanan tertinggi di Kota Tual terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 50,04 persen dengan jumlah produksi ikan sebanyak 33.192,28 Ton dari target daerah 66.330,00 Ton sedangkan persentase produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,47 persen dengan produksi perikanan sebesar 28.736,88 Ton dari total target daerah sebesar 67.665,00 Ton.

2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Salah satu indikator penyelenggaraan bidang kelautan & perikanan adalah Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat menunjukkan dampak penyelenggaraan bidang urusan Kelautan & Perikanan kepada masyarakat. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase perbandingan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah terhadap jumlah kelompok nelayan yang ada pada daerah tersebut. Cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual mengalami fluktuasi dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 464 dan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 223. Jumlah kelompok nelayan Kota Tual terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,24 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 2201 Kelompok nelayan dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022

terdapat 3085 kelompok nelayan sedangkan jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah mengalami perubahan dengan kecenderungan menurun. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II-66 Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan pemerintah	78	41	47	33	30	-17,92
Jumlah kelompok nelayan	2201	2750	2781	2795	3085	9,24
Cakupan bina Kelompok Nelayan	223	335	369	391	464	21,25

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2023; Data Olahan 2023.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah persentase perbandingan Jumlah produksi ikan kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan daerah. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi hasil kelompok nelayan di daerah terhadap jumlah produksi ikan yang ada di daerah pada kurun waktu tertentu. Produksi perikanan Kota Tual sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana kelompok nelayan juga mempunyai kontribusi dalam pencapaian target tersebut. Adapun hasil produksi kelompok nelayan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-67 Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Produksi ikan kontribusi kelompok nelayan	2.117,55	2.021,32	1.716,73	1.926,82	3.008,81	12,19
Jumlah Produksi ikan daerah	33.192,28	30.638,72	28.736,88	29.839,03	30.008,17	-2,37
Produksi Perikanan kelompok nelayan	6,38	6,60	5,97	6,64	10,03	14,04

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023.

Pada tahun 2018, Jumlah Produksi ikan kelompok nelayan sebanyak 2.117,55 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 6,38 persen dari hasil seluruh produksi ikan daerah saat itu yaitu sebanyak 33.192,28 Ton. Pada tahun 2019 produksi ikan nelayan mengalami penurunan menjadi 2.021,32 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 6,60 persen dari produksi ikan daerah. Di tahun 2020 produksi ikan nelayan mengalami penurunan menjadi 1.716,73 Ton yang memberikan kontribusi sebesar

5,97 persen dari hasil produksi ikan daerah. Namun di tahun 2022 produksi ikan nelayan mengalami kenaikan menjadi 3.008,81 Ton dari 30.008,17 Ton produksi ikan daerah.

4. Rasio Kawasan Lindung Perairan & Proporsi Tangkapan Ikan.

Rasio Kawasan lindung perairan adalah indikator yang menunjukkan persentase perbandingan Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan suatu wilayah. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial selama lima tahun terakhir adalah sebesar 0,93 persen. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 83,60 persen selama lima tahun terakhir. Kedua indikator ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-68 Rasio Kawasan Lindung Perairan dan Proporsi Tangkapan Ikan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60	0

Sumber: Dinas Kelautan & perikanan, 2023; Data Olahan 2023.

B. Pariwisata

Sebagai daerah kepulauan, Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Tual khususnya wisata bahari dan ekosistem pulau-pulau kecil. Kota Tual mempunyai pantai pasir dan karang unik yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, serta beberapa titik selam menarik di sekitar kepulauan Dullah. Selain itu terdapat beberapa obyek wisata budaya seperti tradisi tarian Debus, Masjid Tua Tayando dan sebagainya. Obyek-obyek wisata ini perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi sehingga dapat memberi nilai tambah pada sektor pariwisata di Kota Tual. Adapun objek wisata Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-69 Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018-2022

Kecamatan	Obyek Wisata	Lokasi
P. Dullah Utara	Bunker Pantai Tamedan Pantai Difur Pantai Dullah Pantai Nam Indah Danau Waren Danau Fanil Pantai Duroa Meriam dan benteng Pertahanan Duroa	Desa Tamedan Desa Labetawi Desa Dullah Desa Ohoitahit Desa Ngadi Desa Ohoitel Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut

	Danau Tahit Ko Pulau Adranan Pulau Ramadan Pulau Bair Pulau Ohoimas Museum Belan Pulau Burung	Desa Dullah Laut Desa Dullah Desa Dullah Laut
P. Dullah Selatan	Teluk Un Fid Bangir Jembatan Gantung Fair Taman Kota Tual Pulau Ut Alat Musik Tradisional Ekal	Desa Taar Desa Taar Desa Tual Kelurahan Lodar El Desa Tual Desa Taar
Tayando Tam	Pulau Varat Neu Pulau Nusreen Pulau Ree Goa TengkorakKepala Tujuh Tarian Tradisional Debus Masjid Tua dan Kuburan Tua Goa Kapal Kandas Vat Laai (Batu Timbul) Met Vait (Meti Panjang)	Ds.Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamtel
P.p Kur	Pulau Kaimear Meriam dan Benteng Pertahanan Kaimear Pulau Bui Pulau Tubur Pantai Werajo Fat Amfina Pit (Batu Perempuan Tujuh) Pantai Namaselap	Pulau Kaimear Pulau Kaimear Pulau Bui Desa Lokwirin Desa Lokwirin Desa Lokwirin Desa Tubyal
Kur Selatan	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Tebing Batu, Goa, dan Pantai Telaga Werwari	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Desa Pasir Panjang dan Desa Hirit

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Beberapa indikator yang menunjukkan capaian penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Tual dapat ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel II-70 Indikator urusan pariwisata Kota Tual tahun 2018-2012

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kunjungan wisata (jiwa)	2135	2678	1425	3756	3691	35,12
Lama kunjungan wisata	0,5	0,5	NA	NA	NA	0
Persentase PAD Sektor Pariwisata	NA	NA	NA	NA	NA	0

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2023

Jumlah kunjungan wisata yaitu persentase perbandingan realisasi jumlah kunjungan wisata terhadap jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan. Jumlah kunjungan wisata Kota Tual tahun 2018 sebesar 2135 jiwa dari target yang ditetapkan yaitu 2241 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 86 persen pada tahun 2022 dimana

terdapat 3.691 kunjungan wisata di Kota Tual dari total target 3827 kunjungan yang diperkirakan.

C. Pertanian

1. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi pertanian/perkebunan terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan pada total PDRB suatu daerah.

Tabel II-71 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor pertanian (Juta Rupiah)	45.113,35	46.998,90	48.065,01	48.081,35	49.557,18	2,39
Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (%)	3,18	3,13	3,21	3,10	3,12	-0,48

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2022; data olahan 2023

**) angka sementara*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap nilai PDRB Kota Tual selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -0,48 persen. Pada tahun 2018 sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,18 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp 45.113,35 juta dari total PDRB sebesar Rp.1.417.790 juta. Pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,12 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp 49.557,18 juta dari total PDRB sebesar Rp 1.590.370 juta. Dari gambaran ini, dapat diasumsikan bahwa lapangan usaha sektor pertanian cukup fluktuatif.

2. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sektor perkebunan (tanaman keras) pada total PDRB suatu daerah.

Tabel II-72 Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor perkebunan (Juta rupiah)	10.324,76	11.064,59	11.606,06	11.899,95	12.540,60	4,99
Kontribusi perkebunan terhadap PDRB (%)	0,73	0,74	0,77	0,77	0,79	2,01

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2023; Data Olahan, 2023.

*) angka sementara

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar 2,94 persen atau dengan kata lain pertumbuhan pada sektor ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor perkebunan sebesar Rp 10.324,76 juta atau 0,73 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp 1.417.790 juta. Pada tahun 2022 proporsi tersebut mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 0,79 persen atau senilai 12.540,60 terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp 1.590.370 juta.

3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sektor perkebunan (tanaman pangan) pada total PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah.

Tabel II-73 Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor perkebunan tanaman pangan (Juta Rupiah)	28.169,30	28.922,53	29.195,18	28.570,20	29.083,14	0,82
Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	1,99	1,93	1,95	1,84	1,83	-2,04

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2023; Data Olahan 2023.

*) angka sementara

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar 0,82 persen atau dengan kata lain sektor ini mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor

perkebunan sebesar Rp 28.169,30 juta atau 1,99 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp 1.417.790 juta. Pada tahun 2022 proporsi tersebut mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 1,83 persen atau senilai Rp.29.083,14 juta terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp. 1.590.370 juta.

4. Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar

Produktivitas pangan utama lokal adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pasokan kebutuhan bahan pangan utama lokal. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan hasil panen atau hasil produksi bahan pangan utama lokal dengan luas areal tanam bahan pangan utama lokal tersebut. Perkembangan produktivitas bahan pangan utama lokal Kota Tual selama 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-74 Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Per Hektar Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Produksi bahan pangan utama lokal (ton)	211,08	365	558,75	2.022,3	1.669,4	92,62
Luas Areal bahan pangan utama lokal (ha)	96	229	146	148	133	23,38
Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar (ton/hektar)	2,20	1,59	3,83	13,66	12,77	90,82

Sumber: Dinas Pertanian, 2023; Data Olahan 2023.

Produktivitas bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 92,62 persen. Pada tahun 2018, produktivitas bahan pangan utama lokal sebanyak 2,20 ton/ha yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,77 ton/ha. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hasil produksi pertanian khususnya bahan pangan lokal. Perlu diketahui bahwa Bahan pangan utama lokal di Kota Tual antara lain berupa ketela pohon dan ubi-ubian.

5. Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok tani adalah indikator yang memberi gambaran seberapa besar pendampingan Pemerintah terhadap kelompok petani pada suatu daerah. Indikator ini diperoleh dengan menghitung persentase kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah terhadap kelompok petani. Tabel selanjutnya menunjukkan perkembangan cakupan bina kelompok tani Kota Tual selama tahun 2018-2022

Tabel II-75 Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan binaan (kelompok)	85	200	23	50	40	36,05
Jumlah kelompok tani (kelompok)	307	333	347	384	434	9,09
Cakupan bina kelompok tani (%)	27,69	60,06	6,63	13,02	9,22	23,78

Sumber: Dinas Pertanian, 2023; Data Olahan 2023

Cakupan bina kelompok tani menunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 23,78 persen. Pada tahun 2018 cakupan bina kelompok tani sebesar 27,69 persen atau terdapat 85 kelompok binaan dari total 307 kelompok tani yang ada. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 40 kelompok tani yang mendapatkan binaan dari total 434 kelompok yang ada atau mencakup 9,22 persen.

D. Perdagangan

Perkembangan pelayanan bidang urusan perdagangan di Kota Tual dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel II-76 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Cakupan bina kelompok pedagang (%)	83,94	50	NA	NA	NA	0
Nilai ekspor bersih perdagangan (US\$)	33.768	119.900	341.687	332.144	148.000	95,45

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, 2023

Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2019 hanya mencakup 50 persen dari total seluruh kelompok pedagang yang memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah, jumlah tersebut turun dari cakupan tahun sebelumnya sebesar 83,94 persen. Nilai ekspor bersih perdagangan adalah indikator menunjukkan selisih nilai ekspor dan nilai impor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Tual pada tahun 2022 adalah sebesar US\$148.000, dan pertumbuhan rata-rata tahunan menunjukkan tren positif.

E. Perindustrian

Perkembangan pelayanan umum bidang Perindustrian dapat dilihat melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-77 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kelompok Pengrajin yang Mendapat Bantuan Binaan Pemerintah	24	20	14	0	3	-40,54

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, 2023

Perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir.

II.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

A. Keuangan

1. Ruang Fiskal Daerah.

Ruang fiskal (fiscal space) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Tual.

Pada tahun 2019-2022 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kota Tual fluktuatif yaitu pada tahun 2019 sebesar 34,41%, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 54,10% namun menurun pada tahun 2021 di angka 44,79% dan kemudian meningkat lagi di Tahun 2022 menjadi 52,42 %. Sehubungan itu kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Kota Tual. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kota Tual tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-78 Ruang Fiskal Daerah Kota Tual Tahun 2019-2022

Tahun	Total Pendapatan	Dana Alokasi Khusus	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal
2019	571,332,966,114	83.259.867.377	41.841.723.080	149.648.370.309	296.583.005.348	34,41%
2020	564,324,383,792	81.507.780.296	30.479.212.000	147.020.852.200	305.316.539.296	54,10%
2021	718,344,281,652.	233.781.464.200	14.232.924.220	148.583.238.609	321.746.654.623	44,79%
2022	632,083,750,939	130.663.088.10	24.435.301.625	145.652.646.950	331.332.714.263	52,42%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2023

Gambar II-3 Ruang Fiskal Daerah Kota Tual Tahun 2019-2022



2. Persentase PAD terhadap pendapatan

Tabel II-79 Tabel Pendapatan Daerah

No	Tahun	Pendapatan Daerah
1	2018	589.336.239.356,21
2	2019	571,332,966,114.76
3	2020	564,324,383,792.85
4	2021	718,344,281,652.52
5	2022	632,083,750,939.00

Sumber : BPKAD Kota Tual, 2023.

Tabel II-80 Persentase PAD terhadap pendapatan

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)
2018	4,426,990,156	6,195,524,252	0	8,486,779,652	19,109,294,060	3.24
2019	4,445,851,128	8,052,386,344	0	8,235,756,341	20,733,993,813	3.63
2020	5,670,891,542	6,171,568,508	1.533.630.999	6,140,775,118	19,516,866,167	3.46
2021	7,806,191,253	11,619,030,753	1.623.552.847	3,570,105,050	24,618,879,902	3.43
2022	7.610.216.000	10.545.792.500	2.089.915.000	13.552.631.800	33.798.555.300	5.35

Sumber : BPKAD Kota Tual, 2023.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai

keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Tual digambarkan dalam tabel diatas.

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tabel II-81 Opini BPK atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini BPK atas Laporan Keuangan
1	2018	WTP
2	2019	WTP
3	2020	WTP
4	2021	WTP
5	2022	WTP

Sumber : BPKAD Kota Tual, 2023.

Laporan Keuangan Kota Tual tahun 2018 – 2021 sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah Kota Tual telah menindaklanjuti kelemahan pengendalian sistem pada pengelolaan piutang pajak dan piutang lainnya, sehingga pada tahun tersebut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

B. Birokrasi dan Pelayanan

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tual dan pelayanan kepada masyarakat digunakan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Nilai AKIP Kota Tual belum optimal hal ini bisa dilihat dari Nilai AKIP Kota Tual masih CC. Hal ini dikarenakan adanya ketidakselarasan dalam fungsi-fungsi perangkat daerah yang menghambat penataan kelembagaan pemerintahan yang optimal dan pelayanan publik yang maksimal. Untuk kedepannya hal ini penting untuk membangun sinergi antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik agar Indeks Reformasi Birokrasi dapat meningkat dan masyarakat merasakan manfaat dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan. Selain itu terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dan diperbaiki yaitu Optimalisasi pengelolaan website pemerintah Kota Tual, dokumentasi tentang seluruh pelaporan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penganggarannya.

C. Penduduk

Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia Kota Tual, salah satunya dapat diukur melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan

Tabel II-82 Persentase Penduduk Menurut Ijazah Terakhir

No	Jenjang	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak memiliki Ijazah	21.62	22.60	23.09	24.46	25.83
2	SD dan Sederajat	19.21	18.54	18.43	17.88	17.31
3	SMP dan Sederajat	13.72	13.40	13.22	13.14	12.72
4	SMA dan Sederajat	25.35	24.73	24.64	24.23	24.15
5	Diploma I, II	0.73	0.69	0.71	0.68	0.64
6	Diploma III, IV,S1	5.58	6.36	6.32	6.44	6.56
7	S2, S3	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, 2023.

D. Jaminan Kesehatan

Tabel II-83 Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan oleh Masyarakat Kota Tual

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penduduk Yang mengikuti Program jaminan Kesehatan	70.376	75.108	51.162	42.755	64.319
2	Jumlah penduduk Yang memanfaatkan kartu jaminan kesehatan	28.892	30.678	20.176	16.843	16.953

Sumber : BPJS, 2023.

Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan oleh masyarakat Kota Tual periode 2018-2022 mengalami kenaikan yang variatif dimana terendahnya adalah pada tahun 2020 untuk jumlah penduduk yang memanfaatkan kartu jaminan kesehatan dan tahun 2021 untuk jumlah penduduk yang mengikuti program jaminan kesehatan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel II-84 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Tahun	Angkatan Kerja	Usia Kerja	Bekerja	Menganggur	TPAK
1	2018	27.118	47.340	22.644	4474	57 %
2	2019	28.643	48.718	25.519	3124	59 %
3	2020	28.558	28.558	25.903	2655	100%
4	2021	33.034	33.034	30.160	2874	100%
5	2022	33.024	-	30.148	2876	-

Sumber : Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi

TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Kota Tual terus naik tiap tahunnya.

II.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dalam mencapai peningkatan kualitas, hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kota Tual ditinjau dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah (infrastruktur), iklim berinvokusestasi dan sumber daya manusia.

II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Total Pendapatan Asli Daerah

Tabel II-85 Pendapatan Asli Daerah Kota Tual

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2018	19.109.294.060,35
2019	20.733.993.813,76
2020	19.516.866.167,85
2021	24.618.879.902,50
2022	23.663.582.663,54

Sumber : BPPKAD Kota Tual, 2023 (Data diolah)

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Asli Daerah Kota Tual menunjukan kondisi yang baik walaupun fluktuatif yakni Rp.19.109.294.060,35 pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.23.663.582.663,54 pada tahun 2022.

B. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel II-86 Pendapatan Pajak Daerah Kota Tual

Tahun	Total Pendapatan Pajak Daerah
2018	4.426.990.156,00
2019	4.445.851.128,00
2020	5.670.891.542,00
2021	7,806.191.253,00
2022	8.425.777.659,00

Sumber : BPPKAD Kota Tual, 2023 (Data diolah)

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah Kota Tual adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak mineral bukan logam, PBB P2, BPHTB. Pendapatan Pajak Daerah Kota Tual mengalami kenaikan yang konstan tiap tahunnya.

C. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel II-87 Retribusi Daerah

Tahun	Total Pendapatan Retribusi Daerah
2018	6.195.524.252,00
2019	8.052.386.344,00
2020	6.171.568.508,00
2021	11.619.030.753,00
2022	10.545.792.500,00

Sumber : BPPKAD Kota Tual, 2023 (Data diolah)

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

D. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan kemampuan & daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Hal ini mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi Kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Semakin tinggi nilai pengeluaran konsumsi mengindikasikan keadaan perekonomian yang baik. Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per Kapita dan Pengeluaran konsumsi Rumah tangga non pangan per Kapita Kota Tual sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-88 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Pengeluaran Makanan (Rp)	432.716	444.284	468.484	442.133	460.017	1,64
Pengeluaran Non makanan (Rp)	467.098	508.465	500.981	508.968	525.910	3,08
Pengeluaran per kapita per bulan (Rp)	899.814	952.749	969.465	951.101	985.927	2,35

Sumber: Kota Tual dalam Angka, 2022.

**) angka sementara*

Selama tahun 2018-2022, pengeluaran per kapita Kota Tual mengalami pertumbuhan yang cukup baik dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,64 persen; pada tahun 2018 pengeluaran per kapita sebesar Rp 899.814 per bulan meningkat menjadi Rp 985.927 pada tahun 2022. Dari data tersaji, dapat dikatakan pengeluaran rumah tangga terbesar umumnya adalah kelompok pengeluaran non makanan dan memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 3,08 persen setiap tahunnya daripada rata-rata pertumbuhan pengeluaran makanan sebesar 1,64 persen.

E. Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita

Konsumsi non pangan adalah pengeluaran untuk membiayai item belanja konsumsi rumah tangga selain makanan yang terdiri dari 6 kebutuhan utama antara lain (1) perumahan, (2) barang & jasa, (3) pakaian, (4) barang tahan lama, (5) pajak & asuransi dan (6) Keperluan pesta & Upacara dimana kesehatan dan pendidikan juga tercakup di dalamnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, tercatat nilai Konsumsi non pangan per kapita Kota Tual mengalami pertumbuhan positif sehingga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini dapat memberi gambaran bahwa karakteristik pengeluaran Penduduk Kota Tual semakin kompleks karena berbagai perkembangan dan kemajuan yang mulai merambah sehingga menyebabkan semakin pentingnya berbagai kebutuhan lain selain kebutuhan dasar makanan. Perkembangan konsumsi non pangan perkapita Kota Tual 2018-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,07 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2018 pengeluaran non pangan sebesar 467.098 dari total pengeluaran, meningkat menjadi 525.909 dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2022. Jenis konsumsi non pangan tertinggi adalah dari kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian disusul dengan kelompok barang dan jasa. Selanjutnya perkembangan pengeluaran non pangan per kapita Kota Tual 2018-2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-89 Pengeluaran Non Pangan per Kapita Kota Tual Tahun 2018-2022

Jenis	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air	260.819	303.475	273.845	297.319	303.832	4,34
Barang & Jasa	105.602	110.507	115.767	112.791	117.874	2,84
Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala	32.104	31.053	26.594	25.558	22.803	-8,08
Barang Tahan lama	23.511	28.473	15.104	13.940	9.737	-15,93
Pajak Pemakaian & Asuransi	31.359	30.679	57.765	56.688	69.891	26,89

Keperluan pesta & Upacara	13.703	4.278	11.905	2.672	1773	-0,42
Jumlah pengeluaran Non pangan	467.098	508.465	500.980	508.968	525.909	3,07
Jumlah pengeluaran	899.814	952.748	969.465	951.101	129.927	-11,48
Presentase	51,91	53,36	51,67	53,51	53,39	0,74

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023.

F. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah berguna untuk memberikan gambaran tentang kinerja sektor perekonomian di daerah. Indikator ini didapat dari perbandingan nilai sektor tertentu dengan jumlah angkatan kerja yang ada pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Produktivitas daerah Kota Tual dihitung menurut lapangan usaha yang terlebih dahulu dikelompokkan dalam 3 sektor yaitu agrikultur, manufaktur & jasa. Sektor agrikultur terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian sektor Manufaktur terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi kemudian sektor jasa terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; dan jasa-jasa lainnya. Adapun nilai produktivitas total daerah Kota Tual 2018-2022 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel II-90 Produktivitas Total Kota Tual Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Juta Rp.)					Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Agrikultur	519.797,69	548.148,98	556.411,03	574.547,86	612.793,37	4,22
Manufaktur	22.481,76	23.321,02	22.690,39	22.827,94	25.189,41	2,99
Jasa	198.461,20	212.460,41	214.264,67	221.244,00	149.858,53	-5,28

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa lapangan usaha paling produktif adalah pada sektor jasa yang salah satunya mencakup jasa sektor perdagangan dan jasa-jasa yang lainnya yang dimana meningkat dari tahun ke tahun. Mengacu pada data olahan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar sektor agrikultur merupakan kontributor utama dalam struktur ekonomi Kota Tual dengan pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 4,22 persen.

G. Data Jumlah Investasi Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)

Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	585	632	678	581	396	-7,71
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (milyar Rupiah)	163.450.600	170.245.300	172.674.500	202.148.000	39.179.800.	-19,33
Kenaikan/ Penurunan nilai Realisasi PMDN	170.503.558	152.821.000	163.554.500	98.180.000	714.000.000	125,98

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tual 2023

Untuk saat ini, belum ada Investor asing yang berinvestasi di Kota Tual yang ada hanya investasi berskala nasional jumlah investor yang berinvestasi di Kota Tual saat ini adalah sebanyak 396 investor sesuai data terlampir pada tahun 2022. Jumlah investor terbanyak ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 678 investor, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan adalah -7,71 persen selama lima tahun terakhir. Jumlah investasi berskala nasional mengalami pertumbuhan selama 4 tahun terakhir namun mengalami penurunan dari angka 202.148.000.000 di tahun 2021 menjadi 39.179.800.000 di tahun 2022. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah investor yang berinvestasi di Kota Tual. Hal ini berpengaruh terhadap PAD Kota Tual.

II.4.2 Fokus Fasilitas wilayah / Infrastruktur

A. Perhubungan

- Rasio Jalan per Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses kepada setiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Data rasio jalan per kendaraan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel II-91 Rasio Panjang Jalan per Kendaraan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang jalan (km)	353,91	356,16	358,12	360,13	361,78
Jumlah kendaraan (unit)	5.717	6.207	7.946	9.127	10.400
Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit)	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Pada tahun 2018, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2021 dan 2022 yang sama-sama sebesar 0.03 km/unit. Pada tahun 2018 sebesar 0,06 km/unit kemudian rasio tersebut menurun menjadi 0,03 pada tahun 2022.

B. Penataan Ruang

Tabel II-92 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Luas Wilayah Produktif	6.776	6.763	6.752	6.742	6.731	-0,16
Luas Seluruh Wilayah Budidaya	11.629	11.613	11.596	11.579	11.562	-0,14
Presentase Luas Wilayah Produktif	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0

Dinas PUPR Kota Tual, 2023.

Tabel II-93 Luas Wilayah Perkotaan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	2.585,9	2.613	2.640,1	2.667,2	2.694,3	1,03

Dinas PUPR Kota Tual, 2023.

Tabel II-94 Luas Wilayah RTH Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Luas Wilayah Ruang Terbuka Hijau (Ha)	3.38	3.38	3.38	4,68	4,68	9,62

Dinas PUPR Kota Tual, 2023.

C. Fasilitas Penunjang Perekonomian

1. Bank yang beroperasi

Bank adalah lembaga keuangan pemerintah maupun swasta yang mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah. berbagai sirkulasi keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui perantara dan bantuan perbankan. Adapun Bank yang beroperasi di Kota Tual antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Maluku.

2. Restoran dan Hotel

Restoran atau rumah makan merupakan tempat menjual, membeli dan menyantap makanan dan minuman yang disediakan dalam bangunan tetap dengan pembeli yang membayar pajak. Keberadaan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah sekaligus menunjang-nya. Pada tahun 2022 terdapat 37 unit restoran yang meningkat dari tahun sebelum 2021 sebanyak 36 unit. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan

minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel atau penginapan merupakan salah satu fasilitas yang sangat menunjang berbagai kegiatan ekonomi salah satunya pariwisata. Hotel dan penginapan yang ada di Kota Tual hanya berupa penginapan & hotel. Di Kota Tual terdapat 5 penginapan, 2 hotel, 1 *cottage*.

D. Komunikasi & informatika

1. Daya listrik

Sebagian besar kebutuhan listrik Kota Tual dilayani oleh PT. PLN Wilayah IX cabang Tual. yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan mempunyai 2 sub cabang. Data kelistrikan Kota Tual Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel II-95 Data Kelistrikan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Kapasitas terpasang (KW)*	770	790	660	1470	1650
Daya mampu (KW)*	290	320	320	790	590
Beban puncak (KW)*	120	115	140	214	240
Jumlah mesin (unit)	7	7	7	10	13

Sumber: PLN UP3 Tual, 2023.

2. Desa Terakses Internet

Hingga tahun 2022 hanya 42,47 % daerah Kota Tual yang sudah terakses Internet, sebagian besar wilayah yang terakses internet berada di wilayah Kecamatan Dullah Utara dan Dullah Selatan serta sebagian kecil desa yang ada di pulau-pulau, karena kondisi geografis yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari desa di pulau-pulau yang mendapatkan akses internet.

II.4.3 Fokus Iklim Investasi

A. Angka Kriminalitas

Mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif merupakan salah satu tantangan dalam mewujudkan iklim investasi yang ideal. Keadaan yang aman, tertib dan terkendali dapat memberikan daya tarik dan jaminan bagi perkembangan iklim investasi. Angka kriminalitas Kota Tual disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-96 Angka Kriminalitas Kota Tual Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal Tertangani (kasus)	Angka kriminalitas
2018	125	449
2019	109	401
2020	148	447

2021	111	370
2022	271	93

Sumber : Kepolisian Resort Tual, 2023.

Merujuk data tabel diatas, Angka kriminalitas Kota Tual mengalami fluktuasi dengan titik tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 449 kasus dan titik terendah terjadi pada tahun 2022 sebanyak 93 kasus. Tinggi dan rendahnya angka kriminalitas sangat mempengaruhi daya tarik investasi karena terkait stabilitas keamanan. Untuk itu, dibutuhkan upaya berbagai pihak di Kota Tual untuk menekan jumlah tindak kriminal.

B. Demonstrasi

Demonstrasi merupakan kegiatan menunjukkan sikap mendukung ataupun protes yang dilakukan di tempat-tempat publik di hadapan umum. Hal tersebut menunjukkan kehidupan demokrasi di Negara kita yang semakin berkualitas. Namun disisi lain kegiatan ini sering menimbulkan gangguan dan mengancam ketertiban. Selama tahun 2018-2022 terjadi peningkatan demonstrasi di Kota Tual. Pada tahun 2018 terjadi 4 kali demonstrasi kemudian meningkat menjadi 5 kali pada tahun 2019, kemudian terjadi 6 kali demonstrasi pada tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi 8 kali demonstrasi dan selanjutnya pada tahun 2022 terjadi 9 kali demonstrasi.

C. Perizinan

Uraian cakupan penyelesaian izin lokasi berlaku pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Namun pada tahun 2020 dan 2022 tidak ada izin lokasi yang dikeluarkan dengan alasan :

1. Tidak ada izin lokasi pada tahun 2020, karena Izin Lokasi hanya diterbitkan melalui pemenuhan komitmen pada aplikasi Oss.go.id. dan di tahun 2020 tidak ada permohonan Izin Lokasi.
2. Izin Lokasi terbit di tahun 2021 yang merupakan Izin Lokasi untuk Bangunan Pemerintah.
3. Di tahun 2022 Izin Lokasi baik untuk Bangunan Pemerintah maupun Pelaku Usaha tidak lagi diterbitkan. Dasar hukum izin lokasi telah dicabut oleh Undang- undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tabel II-97 Perizinan Kota Tual Tahun 2018-2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan penyelesaian izin lokasi	1	6	NA	4	NA
2	Jumlah izin lokasi	1	6	NA	4	NA
3	Permohonan izin lokasi	11	6	NA	4	NA

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tual 2023

D. Pajak Daerah

Pajak daerah Kota Tual Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dan di tahun 2022 mencapai kenaikan tertinggi yaitu sebesar Rp. 8.536.467.493,- Rata – rata total pajak daerah Kota Tual 22,46 Persen. Pajak daerah kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II-98 Pajak Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022

Jenis Pajak Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan
Pajak Hotel	63.024.200	64.270.000	29.014.500	59.680.300	48.293.000	8,43
Pajak Restoran/Rumah Makan	172.633.500	411.783.695	879.555.690	1.452.665.315	1.728.623.939	84,07
Pajak Hiburan	19.677.150	39.261.500	10.085.700	14.186.05	12.545.620	13,58
Pajak Reklame	164.232.120	173.891.432	151.700.753	171.509167	173.967.364	1,90
Pajak Penerangan Jalan	1.724.611.711	1.826.711.455	1.931.424.075	2.245.606.567	2.495.396.788	9,76
Pajak PBB	637.914.607	656.296.057	767.677.552	961.392.292	1.531.003.263	26,08
Pajak BPHTB	523.679.950	561.833.150	299.330.922	412.866.600	365.176.300	- 3,26
Pajak Galian C	1.101.337.793	731.352.964	1.602.102.350	2.404.074.028	2.181.461.2219	31,57
Total Pajak Daerah	4.407.111.031	4.465.400.253	5.670.891.542	7.721.979.043	8.536.467.493	22,46

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kota Tual, 2023.

E. Retribusi Daerah

Retribusi daerah Kota Tual Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dari tiga tahun terakhir ini menunjukkan retribusi semakin meningkat. Namun perlu dilakukan pengawasan untuk menjaga stabilitas Retribusi Daerah. Pertumbuhan rata-rata di tahun 2018-2022 mencapai 21,21 persen. Retribusi daerah Kota Tual dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-99 Retribusi Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Retribusi Daerah	6.560.155.000	8.462.455.000	6.229.955.000	12.198.132.300	10.545.792.500	21,21

Sumber : BPKAD Kota Tual, 2023.

II.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yaitu dalam memperoleh komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar mencakup Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Perkembangan indeks pembangunan manusia Kota Tual ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-100 IPM Kota Tual Tahun 2018-2022

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kota Tual	67,21	67,74	67,96	68,16	68,60	0,51
Provinsi Maluku	68,87	69,45	69,49	69,71	70,02	0,30
Indonesia	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,53

Sumber: Kota Tual Dalam Angka 2023

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM Kota Tual selama 2018-2022 termasuk dalam kategori sedang yaitu berada antara kisaran nilai 60 sampai kurang dari 70.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup sejak waktu lahir karena komponen ini menunjukkan bahwa panjang usia hidup mengindikasikan kualitas kesehatan penduduk. Selanjutnya untuk mengukur dimensi Indeks pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Adapun data komponen pembentuk IPM Kota Tual 2018-2022 ditampilkan dalam tabel selanjutnya.

Tabel II-101 Komponen Pembentuk IPM Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Angka harapan hidup	65,89	65,21	65,47	65,68	65,47*	-0,16
Harapan lama sekolah	13,89	13,90	13,97	13,98	13,99	0,18
Rata-rata lama sekolah	10,18	10,26	10,52	10,53	10,70*	1,26
Pengeluaran perkapita	899.81	952.74	969.46	951.10	985.92*	2,35

Sumber : Statistik Daerah Kota Tual 2022 dan Kota Tual Dalam Angka 2022.

**) angka sementara*

B. Tenaga Kerja

1. Rasio S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penggerak roda pembangunan. Untuk mencapai hasil pembangunan yang ditentukan dengan baik dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM adalah dengan melihat tingkat pendidikannya. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah perbandingan jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk total untuk setiap 10.000 jiwa penduduk. Perkembangan Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual selama 2018-2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II-102 Rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Lulusan S1	4438	4421	4544	4673	4729	1,60
Jumlah Lulusan S2	152	151	152	157	157	0,82
Jumlah Lulusan S3	10	9	8	8	8	- 5,28
Jumlah penduduk	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,33
Rasio Lulusan S1/S2/S3	5,21	5,13	5,41	5,57	5,53	5,37

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2023; data olahan, 2023

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini bertujuan untuk melihat beban tanggung jawab penduduk usia kerja terhadap penduduk non produktif. Perkembangan rasio ketergantungan Kota Tual 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel II-103 Rasio Ketergantungan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Penduduk berusia < 15 tahun	23,278	18,148	22,082	22,084	21,921	- 0,28
Penduduk berusia < 64 tahun	84,081	79,476	81,754	84,073	84,626	0,23
Penduduk 15-64 tahun	60,803	61,328	62,215	62,025	62,705	0,78
Rasio ketergantungan	1,77	1,60	1,67	1,72	1,70	1,69

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, 2023; data olahan, 2023

Dari tabel, Tercatat rasio ketergantungan Kota Tual mempunyai pertumbuhan rata-rata tahunan positif sebesar 1,69 persen yang berarti beban tanggung jawab penduduk usia kerja atas penduduk bukan usia kerja di Kota Tual dapat dikatakan semakin besar setiap tahunnya. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,77 persen. Sedangkan Rasio ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan besaran rasio sekitar 1,60 persen.

II.5 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disajikan secara rinci berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Perkembangan capaian pelayanan pada bidang urusan pendidikan Kota Tual selama 2018-2022 dapat diikuti pada tabel berikut

Tabel II-104 Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan rata-rata tahunan (%)
Angka Partisipasi Kasar Sekolah						
SD/MI/Paket A (%)	121,42	121,45	116,03	114,05	124,62	0,78
SMP/MTs/Paket B (%)	79,90	74,71	80,68	81,63	123,30	13,43
Angka Partisipasi Murni Sekolah						
SD/MI/Paket A (%)	97,97	99,74	98,96	98,52	93,59	-1,11
SMP/MTs/Paket B (%)	69,10	69,15	70,65	70,89	73,36	1,52
Persentase Pendidikan Anak Usia dini (%)	121,86	119,15	107,15	107,54	104,87	-3,60
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan	0,16	0,15	0,13	0,07	0,08	-12,86
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV (%)	57,5	68,71	86,52	97,32	97,22	14,45

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, 2023.

Dari tabel capaian di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka partisipasi kasar sekolah dasar Kota Tual pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu 124,62 persen. Nilai APK SD 2018-2022 juga menunjukkan hasil yang baik yaitu 100 persen. APK SMP pada tahun 2019 sebesar 74,71 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 79,90 persen.

APM SD tahun 2019 dapat dikatakan sangat baik yaitu mencapai 99,74 persen namun capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 93,59 persen. APM SMP dari tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan.

Persentase anak usia dini merupakan indikator yang diperoleh dengan membandingkan jumlah siswa TK, Rombongan anak, Kelompok bermain dan penitipan anak terhadap seluruh anak usia 4-6 tahun. Indikator ini sangat penting untuk mengetahui seberapa banyak anak yang disiapkan untuk menerima pendidikan dasar selanjutnya. Persentase PAUD pada tahun 2020 adalah sebesar 97,85 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,81 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penduduk usia pra sekolah telah mengikuti pendidikan anak usia dini di Kota Tual.

Perbandingan guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar di Kota Tual selama 5 tahun terakhir dapat dikatakan memadai karena berkisar antara 13-15 orang dimana interval tersebut masih di bawah target maksimal yaitu 1:23. Rasio guru terhadap murid dilandasi dengan pemikiran bahwa dengan semakin sedikitnya jumlah murid yang dihadapi seorang guru diharapkan perhatian guru dalam proses pembelajaran tiap individu semakin baik sehingga kualitas pendidikan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Guru berkualifikasi SI-D-IV merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mana bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya sekolah serta pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Persentase guru berijazah SI-D-IV Kota Tual tahun 2020 adalah sebanyak 49,96 persen dari total seluruh guru yang ada. Capaian tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 73,22 persen .

2. Kesehatan

a. Sarana & Prasarana Kesehatan

- Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dimana pelayanan kesehatan dasar anak merupakan target utama operasionalnya. Penyelenggaraan posyandu dilakukan bersama

dengan partisipasi masyarakat guna memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Rasio Posyandu menunjukkan kualitas daya pelayanan fasilitas tersebut dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan Balita dimana semakin tinggi rasio Posyandu mengindikasikan semakin baik daya pelayanannya.

Tabel II-105 Rasio Posyandu per Satuan Balita Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan(%)
Jumlah Posyandu (unit)	90	92	92	92	94	0,83
Jumlah Balita (Balita)	5720	5533	5022	4722	4373	-6,47
Rasio Posyandu	15,73	16,63	18,32	19,48	20,78	7,22

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022; Hasil Olahan, 2023.

**) angka sementara*

Perkembangan rasio posyandu 2018-2022 mengalami pertumbuhan meningkat. Pada tahun 2018 rasio posyandu adalah sebesar 15,73 yang berarti terdapat 15-16 posyandu bagi setiap 1000 jiwa balita kemudian pada tahun 2022 rasio ini menjadi 20,78 yang berarti terdapat 20-21 posyandu yang melayani atau setiap 1 unit posyandu melayani 50-53 balita.

b. Kebidanan

- Cakupan Komplikasi Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani merupakan persentase jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Indikator ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap kesakitan dan permasalahan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, dangi dalam masa nifas yang mengancam jiwa ibu dan atau bayi. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tual tahun 2018-2022 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II-106 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Komplikasi yang ditangani	18	58	43	45	58	57,2
Jumlah ibu dengan komplikasi	18	58	43	45	58	57,2

Cakupan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100	0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023.

Pada tahun 2018 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 100 persen atau sebanyak 18 orang dari total 18 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif. Selanjutnya jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan meningkat yaitu mencapai 58 pada tahun 2019 dan ditangani 58 ibu sehingga persentase cakupan penangan 100 persen. Pada tahun 2020 cakupan komplikasi yang ditangani sebesar 100 persen atau data menunjukkan bahwa sebanyak 43 orang dari total 43 ibu dengan komplikasi kebidanan mendapat penanganan definitif. Hal ini setiap tahunnya ini terus dipertahankan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan Kompetensi Kebidanan

Data penolong kesehatan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pelayanan kesehatan pada saat persalinan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan merupakan persentase jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu terhadap jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022 ditunjukkan tabel berikut.

Tabel II-107 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dengan kompetensi Kebidanan di Kota Tual selama 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	194	1.233	1.088	1.065	1.126	131,85

Sumber: Dinas Kesehatan, 2022; Kota Tual Dalam Angka, 2022; Hasil Olahan 2023.

Tabel diatas menunjukkan selama 2018-2022 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan fluktuatif, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan namun, pada tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami penurunan.

c. Bayi & Balita

- Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Indikator ini merupakan persentase Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari total jumlah seluruh balita gizi buruk yang ada. Semakin besar persentase cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-108 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	7	10	4	2	0	-41,79
Jumlah seluruh balita gizi buruk	7	10	4	2	0	-41,79
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	7	10	4	2	0	-41,79

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023; Hasil Olahan, 2023.

Berdasarkan data tersaji, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tual selama 2018-2022 seluruhnya mendapatkan perawatan. Data ini menunjukkan adanya keberhasilan penanganan perawatan Balita Gizi Buruk oleh Pemerintah Kota Tual melalui berbagai program dan kegiatan terkait.

- Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tercapainya imunisasi pada bayi secara lengkap (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar yang meliputi Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 3 Dosis Polio, 5 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak pada bayi; 2 Dosis TT pada ibu hamil & wanita usia subur; dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 Dosis TT pada anak usia sekolah. Pemberian imunisasi diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mempunyai dampak bagi peningkatan usia harapan hidup yang juga berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Adapun persentase Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel II-109 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah desa/kelurahan	30	30	30	30	30	0%

Jumlah desa/kelurahan UCI	25	25	24	19	21	-3,58
Cakupan desa/kelurahan UCI	83,3 %	83,3 %	80 %	63 %	70 %	-3,52

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023; Hasil Olahan, 2023.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang tidak begitu berbeda berkisar antara 80-83.3 persen dengan perkembangan rata-rata tahunan 5 tahun terakhir sebesar -3,52 persen. Ini berarti bahwa sekitar 3,5 persen dari seluruh desa maupun kelurahan yang ada di Kota Tual sudah termasuk dalam Desa/kelurahan UCI. Kondisi tersebut cukup baik karena telah mencakup sebagian besar desa/kelurahan yang ada sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi agar dapat melayani seluruh desa/kelurahan.

3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

a. Pekerjaan umum

- Proporsi jalan dalam kondisi baik

Jalan memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam keseharian sehingga kondisi yang baik dapat menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelancaran berbagai aktivitas. Kondisi tersebut merupakan salah satu pendukung pengembangan wilayah secara infrastruktur maupun secara ekonomi. Proporsi jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang jalan seluruhnya. Perkembangan jalan dalam kondisi baik Kota Tual 2018-2022 disajikan dalam tabel 2.53. sebagai berikut.

Tabel II-110 Perkembangan Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jalan dalam kondisi baik (Km)	202,252	207,750	213,377	216,988	233,159	3,64
Panjang jalan seluruhnya (Km)	330,601	330,601	330,601	330,601	330,601	0
Persentase jalan dalam kondisi baik	61,18%	62,84%	64,54%	65,63%	70,53%	3,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2023.

Perkembangan jalan dalam kondisi baik di Kota Tual selama tahun 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 3,64 persen. Persentase jalan

dalam kondisi baik terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,18 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2022 mencapai 70,53 persen.

- Rasio Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan merupakan perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah. indikator ini berguna untuk melihat tingkat kemudahan akses ke semua bagian kota. Perkembangan rasio jalan per satuan penduduk di Kota Tual periode 2018-2022 ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel II-111 Rasio Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Tual Periode 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Panjang jalan seluruhnya (Km)	330,601	330,601	330,601	330,601	330,601	0
Jumlah Penduduk (jiwa)	88.269	88.635	88.999	89.271	89.460	0,34
Rasio panjang jalan per satuan penduduk	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, 2023.

Berdasarkan tabel 2.54 rasio panjang jalan per satuan penduduk Kota Tual tidak mengalami perubahan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 rasio jalan per satuan penduduk sebesar 0.004 km/jiwa dan tidak mengalami peningkatan hingga tahun 2022.

4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-112 Capaian penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tual tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio rumah layak huni (unit/orang)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0
Rasio permukiman layak huni (ha)	0,90	0,99	1	0,98	0,94	-0,43
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	75	75	75	75	76	0,33
Presentasi lingkungan pemukiman kumuh	93,7	95,7	97,7	97,7	94,7	0,29
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	90	92	93	92	98	2,19

Persentase rumah tinggal bersanitasi	58,86	60,25	NA	NA	NA	2,36
--------------------------------------	-------	-------	----	----	----	------

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tual, 2023.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Perkembangan pelayanan umum bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan

Tabel II-113 Capaian Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	30	24	18	15	12	-20,42
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	31,43	36,52	28,32	28,88	29,78	-0,29
Persentase Penegakan Perda	75	78	80	84	86	3,49

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual, 2023.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami penurunan dari 30 kasus menjadi 12 kasus. Rasio polisi pamong praja Kota Tual tahun 2022 adalah 29,78 per 1000 penduduk, yang berarti setiap 1000 jiwa penduduk terdapat 30 orang petugas polisi pamong praja. Persentase penegakan Perda mengalami perkembangan dari tahun 2018 hingga 2022 dari angka 75 persen menjadi 86 persen. Capaian tersebut perlu untuk ditingkatkan guna menjamin suasana kondusif dan tertib.

6. Sosial

a. PMKS tertangani

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah kelompok atau individu karena hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi & kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani & sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan tersebut antara lain kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Memajukan taraf hidup PMKS yang ada di suatu daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui instansi- instansi teknis terkait. Perkembangan

cakupan PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-114 PMKS tertangani di Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah PMKS tertangani (orang)	93	66	153	106	1.516	350,56
Jumlah PMKS seluruhnya (orang)	38.154	37.998	1.008	1.481	1.626	-10,26
Persentase PMKS tertangani (%)	0,24	0,17	15,18	7,16	93,23	2487,37

Sumber: Dinas Sosial Kota Tual, 2023; data olahan, 2023.

Jumlah PMKS tertangani mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan selama 5 tahun mencapai 350,56 persen namun jumlah PMKS seluruhnya sebaliknya mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -10,26 persen. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan jumlah PMKS yang cukup signifikan pada tahun 2020 ke 2022. Persentase PMKS Kota Tual pada tahun 2022 adalah sebesar 93,23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,24 persen. Persentase terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,17 persen dengan jumlah PMKS tertangani sebanyak 66 orang dari total 37.998 orang PMKS yang ada saat itu. Hal tersebut terjadi karena tidak terdapat dukungan dana APBN melalui bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dan dukungan dana APBD untuk bantuan modal usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi.

II.5.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Kota Tual merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut yaitu sebesar kurang lebih 19.088 km² dari total luas wilayah sebesar kurang lebih 19.342,39 km². Ini mengindikasikan bahwa sektor kelautan & perikanan seyogyanya merupakan sektor andalan dalam menjalankan roda perekonomian. Produksi perikanan Kota Tual selama kurun waktu 2018-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat namun hal tersebut masih cukup jauh dari target daerah yang ditetapkan. Perkembangan produksi perikanan Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-115 Produksi Perikanan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah produksi Ikan (Ton)	33.192,28	30.638,72	28.736,88	29.839,03	30.088,17	-2,31
Target daerah	66.330,00	66.992,00	67.665,00	68.338,00	69.021,00	1,01
Persentase Produksi perikanan	50,04	45,73	42,47	43,66	43,59	-3,28

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2023; data olahan 2022

Selama kurun waktu dimaksud, produksi ikan mengalami penurunan sebesar - 2,31 persen setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan dengan nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 33.192,28 Ton dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah produksi sebesar 28.736,88 Ton. Walaupun demikian, jumlah tersebut belum mencapai target daerah untuk produksi perikanan yang ditetapkan setiap tahunnya. Persentase produksi menunjukkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan terhadap target daerah pada tahun berkenaan. Persentase produksi perikanan tertinggi di Kota Tual terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 50,04 persen dengan jumlah produksi ikan sebanyak 33.192,28 Ton dari target daerah 66.330,00 Ton sedangkan persentase produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 42,47 persen dengan produksi perikanan sebesar 28.736,88 Ton dari total target daerah sebesar 67.665,00 Ton.

2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Salah satu indikator penyelenggaraan bidang kelautan & perikanan adalah Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat menunjukkan dampak penyelenggaraan bidang urusan Kelautan & Perikanan kepada masyarakat. Cakupan bina kelompok nelayan merupakan persentase perbandingan jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah terhadap jumlah kelompok nelayan yang ada pada daerah tersebut. Cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual mengalami fluktuasi dengan cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 464 dan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu hanya sebesar 223. Jumlah kelompok nelayan Kota Tual terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,24 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 2201 Kelompok nelayan dan terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 terdapat 3085 kelompok nelayan sedangkan jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah mengalami perubahan dengan kecenderungan menurun. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan Kota Tual ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-116 Perkembangan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kota Tual Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat bantuan pemerintah	78	41	47	33	30	-17,92
Jumlah kelompok nelayan	2201	2750	2781	2795	3085	9,24
Cakupan bina Kelompok Nelayan	223	335	369	391	464	21,25

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan, 2023; Data Olahan 2023.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah persentase perbandingan Jumlah produksi ikan kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan daerah. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi hasil kelompok nelayan di daerah terhadap jumlah produksi ikan yang ada di daerah pada kurun waktu tertentu. Produksi perikanan Kota Tual sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana kelompok nelayan juga mempunyai kontribusi dalam pencapaian target tersebut. Adapun hasil produksi kelompok nelayan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II-117 Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Kota Tual 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Produksi ikan kontribusi kelompok nelayan	2.117,55	2.021,32	1.716,73	1.926,82	3.008,81	12,19
Jumlah Produksi ikan daerah	33.192,28	30.638,72	28.736,88	29.839,03	30.008,17	-2,37
Produksi Perikanan kelompok nelayan	6,38	6,60	5,97	6,64	10,03	14,04

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023.

Pada tahun 2018, Jumlah Produksi ikan kelompok nelayan sebanyak 2.117,55 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 6,38 persen dari hasil seluruh produksi ikan daerah saat itu yaitu sebanyak 33.192,28 Ton. Pada tahun 2019 produksi ikan nelayan mengalami penurunan menjadi 2.021,32 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 6,60 persen dari produksi ikan daerah. Di tahun 2020 produksi ikan nelayan mengalami penurunan menjadi 1.716,73 Ton yang memberikan kontribusi sebesar 5,97 persen dari hasil produksi ikan daerah. Namun di tahun 2022 produksi ikan nelayan mengalami kenaikan menjadi 3.008,81 Ton dari 30.008,17 Ton produksi ikan daerah.

4. Rasio Kawasan Lindung Perairan & Proporsi Tangkapan Ikan.

Rasio Kawasan lindung perairan adalah indikator yang menunjukkan persentase perbandingan Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan

suatu wilayah. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial selama lima tahun terakhir adalah sebesar 0,93 persen. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 83,60 persen selama lima tahun terakhir. Kedua indikator ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-118 Rasio Kawasan Lindung Perairan dan Proporsi Tangkapan Ikan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	83,60	83,60	83,60	83,60	83,60	0

Sumber: Dinas Kelautan & perikanan, 2023; Data Olahan 2023.

B. Pariwisata

Sebagai daerah kepulauan, Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Tual khususnya wisata bahari dan ekosistem pulau-pulau kecil. Kota Tual mempunyai pantai pasir dan karang unik yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, serta beberapa titik selam menarik di sekitar kepulauan Dullah. Selain itu terdapat beberapa obyek wisata budaya seperti tradisi tarian Debus, Masjid Tua Tayando dan sebagainya. Obyek-obyek wisata ini perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi sehingga dapat memberi nilai tambah pada sektor pariwisata di Kota Tual. Adapun objek wisata Kota Tual dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-119 Obyek wisata di Kota Tual Tahun 2018-2022

Kecamatan	Obyek Wisata	Lokasi
P. Dullah Utara	Bunker Pantai Tamedan Pantai Difur Pantai Dullah Pantai Nam Indah Danau Waren Danau Fanil Pantai Duroa Meriam dan benteng Pertahanan Duroa Danau Tahit Ko Pulau Adranan Pulau Rumadan Pulau Bair Pulau Ohoimas Museum Belan Pulau Burung	Desa Tamedan Desa Labetawi Desa Dullah Desa Ohoitahit Desa Ngadi Desa Ohoitel Desa Dullah Laut Desa Dullah Laut
P. Dullah Selatan	Teluk Un Fid Bangir Jembatan Gantung Fair Taman Kota Tual	Desa Taar Desa Taar Desa Tual

	Pulau Ut Alat Musik Tradisional Ekal	Kelurahan Lodar El Desa Tual Desa Taar
Tayando Tam	Pulau Varat Neu Pulau Nusreen Pulau Ree Goa TengkorakKepala Tujuh Tarian Tradisional Debus Masjid Tua dan Kuburan Tua Goa Kapal Kandas Vat Laai (Batu Timbul) Met Vait (Meti Panjang)	Ds.Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamtel Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamru Ds. Tayando Yamtel
P.p Kur	Pulau Kaimear Meriam dan Benteng Pertahanan Kaimear Pulau Bui Pulau Tubur Pantai Werajo Fat Amfina Pit (Batu Perempuan Tujuh) Pantai Namaselap	Pulau Kaimear Pulau Kaimear Pulau Bui Desa Lokwirin Desa Lokwirin Desa Lokwirin Desa Tubyal
Kur Selatan	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Tebing Batu, Goa, dan Pantai Telaga Werwari	Pulau Mangur Pulau Woning Pulau Fadol Desa Pasir Panjang dan Desa Hirit

Sumber: Kota Tual Dalam Angka, 2023.

Beberapa indikator yang menunjukkan capaian penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Tual dapat ditunjukkan pada tabel selanjutnya.

Tabel II-120 Indikator urusan pariwisata Kota Tual tahun 2018-2012

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah Kunjungan wisata (jiwa)	2135	2678	1425	3756	3691	35,12
Lama kunjungan wisata	0,5	0,5	NA	NA	NA	0
Persentase PAD Sektor Pariwisata	NA	NA	NA	NA	NA	0

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tual, 2023

Jumlah kunjungan wisata yaitu persentase perbandingan realisasi jumlah kunjungan wisata terhadap jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan. Jumlah kunjungan wisata Kota Tual tahun 2018 sebesar 2135 jiwa dari target yang ditetapkan yaitu 2241 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 86 persen pada tahun 2022 dimana terdapat 3.691 kunjungan wisata di Kota Tual dari total target 3827 kunjungan yang diperkirakan.

C. Pertanian

- Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi pertanian/perkebunan terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa

besar proporsi nilai PDRB sektor pertanian/perkebunan pada total PDRB suatu daerah.

Tabel II-121 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan, Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor pertanian (Juta Rupiah)	45.113,35	46.998,90	48.065,01	48.081,35	49.557,18	2,39
Kontribusi Pertanian terhadap PDRB (%)	3,18	3,13	3,21	3,10	3,12	-0,48

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2022; data olahan 2023

**) angka sementara*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap nilai PDRB Kota Tual selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar -0,48 persen. Pada tahun 2018 sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,18 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp 45.113,35 juta dari total PDRB sebesar Rp.1.417.790 juta. Pada tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi sebesar 3,12 persen terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tual atau senilai Rp 49.557,18 juta dari total PDRB sebesar Rp 1.590.370 juta. Dari gambaran ini, dapat diasumsikan bahwa lapangan usaha sektor pertanian cukup fluktuatif.

- Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sektor perkebunan (tanaman keras) pada total PDRB suatu daerah.

Tabel II-122 Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor perkebunan (Juta rupiah)	10.324,76	11.064,59	11.606,06	11.899,95	12.540,60	4,99
Kontribusi perkebunan terhadap PDRB (%)	0,73	0,74	0,77	0,77	0,79	2,01

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2023; Data Olahan, 2023.

**) angka sementara*

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar 2,94 persen atau dengan kata lain pertumbuhan pada sektor ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor perkebunan sebesar Rp 10.324,76 juta atau 0,73 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp 1.417.790 juta. Pada tahun 2022 proporsi tersebut mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 0,79 persen atau senilai 12.540,60 terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp 1.590.370 juta.

- **Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB diperoleh dengan menghitung persentase kontribusi sektor tersebut terhadap nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi nilai PDRB sektor perkebunan (tanaman pangan) pada total PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah.

Tabel II-123 Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Nilai PDRB (juta Rupiah)	1.417.790	1.501.016	1.498.282	1.550.124	1.590.370	2,94
Nilai PDRB sektor perkebunan tanaman pangan (Juta Rupiah)	28.169,30	28.922,53	29.195,18	28.570,20	29.083,14	0,82
Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)	1,99	1,93	1,95	1,84	1,83	-2,04

Sumber: PDRB Kota Tual Menurut Lapangan Usaha, 2023; Data Olahan 2023.

**) angka sementara*

Pertumbuhan rata-rata tahunan kontribusi PDRB sektor perkebunan (tanaman pangan) terhadap PDRB Kota Tual adalah sebesar 0,82 persen atau dengan kata lain sektor ini mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2018 kontribusi PDRB sektor perkebunan sebesar Rp 28.169,30 juta atau 1,99 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu senilai Rp 1.417.790 juta. Pada tahun 2022 proporsi tersebut mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 1,83 persen atau senilai Rp.29.083,14 juta terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku saat itu sebesar Rp. 1.590.370 juta.

- **Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar**

Produktivitas pangan utama lokal adalah indikator yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pasokan kebutuhan bahan pangan utama lokal. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan hasil panen atau hasil produksi bahan pangan utama lokal dengan luas areal tanam bahan pangan utama lokal tersebut. Perkembangan produktivitas bahan pangan utama lokal Kota Tual selama 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II-124 Produktivitas Bahan Pangan Utama Lokal Per Hektar Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Produksi bahan pangan utama lokal (ton)	211,08	365	558,75	2022,3	1669,4	92,62
Luas Areal bahan pangan utama lokal (ha)	96	229	146	148	133	23,38
Produktivitas bahan pangan utama lokal per hektar (ton/hektar)	2,20	1,59	3,83	13,66	12,77	90,82

Sumber: Dinas Pertanian, 2023; Data Olahan 2023.

Produktivitas bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 92,62 persen. Pada tahun 2018, produktivitas bahan pangan utama lokal sebanyak 2,20 ton/ha yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,77 ton/ha. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hasil produksi pertanian khususnya bahan pangan lokal. Perlu diketahui bahwa Bahan pangan utama lokal di Kota Tual antara lain berupa ketela pohon dan ubi-ubian.

- Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok tani adalah indikator yang memberi gambaran seberapa besar pendampingan Pemerintah terhadap kelompok petani pada suatu daerah. Indikator ini diperoleh dengan menghitung persentase kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah terhadap kelompok petani. Tabel selanjutnya menunjukkan perkembangan cakupan bina kelompok tani Kota Tual selama tahun 2018-2022

Tabel II-125 Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan binaan (kelompok)	85	200	23	50	40	36,05
Jumlah kelompok tani (kelompok)	307	333	347	384	434	9,09

Cakupan bina kelompok tani (%)	27,69	60,06	6,63	13,02	9,22	23,78
--------------------------------	-------	-------	------	-------	------	-------

Sumber: Dinas Pertanian, 2023; Data Olahan 2023

Cakupan bina kelompok tani menunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 23,78 persen. Pada tahun 2018 cakupan bina kelompok tani sebesar 27,69 persen atau terdapat 85 kelompok binaan dari total 307 kelompok tani yang ada. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 40 kelompok tani yang mendapatkan binaan dari total 434 kelompok yang ada atau mencakup 9,22 persen.

D. Perdagangan

Perkembangan pelayanan bidang urusan perdagangan di Kota Tual dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel II-126 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Cakupan bina kelompok pedagang (%)	83,94	50	NA	NA	NA	0
Nilai ekspor bersih perdagangan (US\$)	33.768	119.900	341.687	332.144	148.000	95,45

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, 2023

Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2019 hanya mencakup 50 persen dari total seluruh kelompok pedagang yang memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah, jumlah tersebut turun dari cakupan tahun sebelumnya sebesar 83,94 persen. Nilai ekspor bersih perdagangan adalah indikator menunjukkan selisih nilai ekspor dan nilai impor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kota Tual pada tahun 2022 adalah sebesar US\$148.000, dan pertumbuhan rata-rata tahunan menunjukkan tren positif.

E. Perindustrian

Perkembangan pelayanan umum bidang Perindustrian dapat dilihat melalui indikator cakupan bina kelompok pengrajin sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II-127 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kelompok Pengrajin yang Mendapat Bantuan Binaan Pemerintah	24	20	14	0	3	-40,54

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual, 2023

Perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB. III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

III.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tual tahun 2024-2026 ini dilakukan analisis terhadap kinerja APBD dan neraca keuangan daerah tahun 2018-2023.

Pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 21 tahun 2011). Secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan Pemerintah Kota Tual telah mendapatkan review dari BPK RI dengan hasil Opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan Pemda Kota Tual telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan Pemda Kota Tual yang baik. Secara umum, komponen APBD Kota Tual terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara di daerah diantaranya ditunjukkan oleh capaian indikator Opini BPK. Selama periode 2019- 2022, Pemda Kota Tual memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Tual berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, dan aspek belanja, dan aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan

terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa, secara umum, kinerja Pendapatan Daerah cukup mengalami fluktuasi. Tren pergerakan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 memperlihatkan penurunan, Tahun Anggaran 2021 meningkat kembali dan menurun kembali pada Tahun Anggaran 2022. Namun di sisi lain, rasio realisasi terhadap target Pendapatan Daerah menunjukkan tren yang menurun.

Untuk jelasnya uraian struktur realisasi pendapatan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel III-1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022 (milyar)

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	19,109,294,060.35	20,733,993,813.76	19,516,866,167.85	24,618,879,902.50	23,663,582,663.54
4.1.1	Pajak Daerah	4,426,990,156.00	4,445,851,128.00	5,670,891,542.00	7,806,191,253.00	8,425,777,659
4.1.2	Retribusi Daerah	6,195,524,252.00	8,052,386,344.00	6,171,568,508.00	11,619,030,753.00	8,042,830,893.43
4.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0	0.00	1,533,630,999.00	1,623,552,846.38	1,270,897,238.00
4.1.4	Lain-Lain PAD yang sah	8,486,779,652.35	8,235,756,341.76	6,140,775,118.85	3,570,105,050.12	594,076,873.11
4.2	Pendapatan Transfer	533,443,710,295.86	508,757,249,221.00	514,328,305,625.00	679,492,477,530.00	581,364,537,849.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	524,145,033,609.00	496,059,650,526.00	502,108,011,300.00	666,992,741,544.00	565,721,813,195.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9,298,676,686.86	12,697,598,695.00	12,220,294,325.00	12,499,735,986.00	15,642,724,654.00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	36,783,235,000.00	41,841,723,080.00	30,479,212,000.00	14,232,924,220.02	24,435,301,625.00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	589,336,239,356.21	571,332,966,114.76	564,324,383,792.85	718,344,281,652.52	629,463,422,137.54

2. Kerangka Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam Realisasi APBD Pemerintah Kota Tual selama kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami perkembangan fluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Tual sebesar Rp 591.303.330.563,34 dan menurun menjadi sebesar Rp 522.231.122.922,76 di Tahun Anggaran 2020, kemudian pada Tahun Anggaran 2021 realisasi Belanja Daerah meningkat kembali sebesar Rp 726.117.780.266,28 dan menurun kembali pada tahun 2022 sebesar 621.343.179.386,99.

Tabel III-2 Realisasi Belanja Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	BELANJA	627.588.090.713,61	591.303.330.563,34	522.231.122.922,76	726.117.780.266,28	621.343.179.386,99
05:01	Belanja Operasi	392.821.333.898,61	389.784.155.322,00	322.429.358.855,23	343.584.001.691,28	400.646.122.999,75
05:01:01	Belanja Pegawai	141.188.156.607,00	149.648.370.309,00	147.020.852.200,00	148.583.238.609,00	145.652.656.950,00
05:01:02	Belanja Barang dan Jasa	219.990.892.291,61	224.954.563.013,00	166.310.589.155,23	172.682.743.792,28	209.263.478.873,75
05:01:03	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
05:01:04	Belanja Bunga	164.799.000,00	-	-	-	-
05:01:05	Belanja Hibah	30.977.486.000,00	10.544.414.500,00	5.996.550.000,00	8.837.278.100,00	17.959.003.719
05:01:06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	4.144.334.500,00	2.493.954.500,00	13.480.741.190,00	27.770.993.457,00
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000,00	492.473.000,00	607.413.000,00	0,00	0,00
05:02	Belanja Modal	170.610.589.085,00	117.077.394.661,34	108.387.613.615,53	300.770.596.805,00	156.559.792.993,24
05:03	Belanja Tak Terduga	1.039.878.480,00	431.216.000,00	17.031.513.162,00	7.963.853.906,00	5.377.234.831,00
05:04	Belanja Transfer	63.116.289.250,00	84.010.564.580,00	74.382.637.290,00	73.799.327.864,00	58.760.028.563,00
05:04:01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
05:04:02	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	63.116.289.250,00	84.010.564.580,00	74.382.637.290,00	73.799.327.864,00	58.760.028.563,00
	SURPLUS/DEFISIT	(38.251.851.357,40)	(19.970.364.448,58)	42.093.260.870,09	(7.773.498.613,76)	8.120.242.750,55

3. Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang

Informasi realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan Belanja Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan komponen Pengeluaran Daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Tual selama 4 tahun terakhir.

Secara komprehensif, gambaran kinerja keuangan masa lalu di Kota Tual yaitu sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel III-3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tual Tahun 2018-2022

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.288.123.668,23	31.194.727.032,80	10.748.372.583,54	49.831.351.289,19	36.058.496.195,02
3.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	69.288.123.668,23	31.194.727.032,80	10.748.372.583,54	49.831.351.289,19	36.058.496.195,02
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
3.2.4	Penyertaan Modal Daerah	-	500.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	500.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000
	Pembiayaan NETTO	69.288.123.668,23	30.694.727.032,80	7.748.372.583,54	43.831.351.289,19	24.058.496.195,02
	SILPA	31.036.272.310,83	10.724.362.584,22	49.841.633.453,63	36.057.852.675,43	32.178.738.945,57

III.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan keuangan daerah merupakan proyeksi kondisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah dalam dokumen RPD ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode Tahun Anggaran 2019-2022, maka disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2024-2026.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Mengevaluasi dan menegakan regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
- 5) Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.

- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
- 9) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 10) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 11) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- 12) Meningkatkan pertumbuhan capaian realisasi potensi Pendapatan Daerah
- 13) Mengembangkan inovasi transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah

Strategi pendapatan daerah, meliputi:

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah
- 3) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah
- 4) Pendidikan dan Pelatihan SDM pengelola pendapatan daerah
- 5) Kajian optimalisasi pendapatan daerah
- 6) Pemetaan potensi pendapatan daerah
- 7) Penyusunan strategi pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Kota Tual;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023;
- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh pemerintah Kota Tual;
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

2. Pajak Daerah

(a) Upaya Intensifikasi :

- Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem *online* terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
- Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - ✓ Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - ✓ Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - ✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - (1) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - (2) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - (3) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
- Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - ✓ Wajib pajak *self assessment*;
 - ✓ Wajib pajak PBB-KB;
 - ✓ Wajib pajak PPJ
- Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - ✓ Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - ✓ PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - ✓ Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.
- Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.

(b) Upaya Ekstensifikasi :

- Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - ✓ Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, khususnya pengelolaan pajak daerah;
 - ✓ Melakukan penambahan objek pajak;
 - ✓ Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - ✓ Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - ✓ Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - ✓ Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan;
 - ✓ Pengembangan kerjasama pembayaran Pajak Daerah dengan perbankan, dan *e-commerce*.

3. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu peningkatan pelayanan retribusi daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah.

- Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - ✓ Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - ✓ Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - ✓ Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - ✓ Menerapkan *cash less* dalam pembayaran retribusi dengan *banking system*;
 - ✓ Memulai menerapkan *e-ticketing*;
 - ✓ Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
- Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - ✓ Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.

4. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.

Lebih lanjut lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. penerimaan ini berasal dari penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja komponen ini maka dilakukan upaya antara lain:

- Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.

5. Dana Perimbangan (Transfer)

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak (SDA). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tual untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi provinsi/kabupaten/kota;
- 3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Tual sekaligus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kota Tual;

B. Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama empat tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan

efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2024-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata

masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil;

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.

Prioritas pertama merupakan belanja urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib tersebut berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Meskipun demikian program-program pembangunan yang merupakan pelayanan dasar masyarakat, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran tetap menjadi perhatian penting dalam alokasi belanja.

Prioritas kedua merupakan program prioritas ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan

program/kegiatan unggulan OPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Urusan pemerintahan yang dilaksanakan meliputi 5 (lima) urusan, yaitu: (1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Urusan Sosial. (2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kearsipan. (3) Urusan Pilihan meliputi Urusan Pertanian dan Peindustrian dan Perdagangan. (4) Unsur Penunjang meliputi Urusan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. (5) Unsur Pendukung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan seluruh kecamatan di wilayah Kota Tual.

Prioritas ketiga merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja operasi seperti: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sementara itu, pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

III.3 PROYEKSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III-4 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Tual Tahun 2024-2026

KODE	URAIAN	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN	629.463.422.137,54	533.603.513.000	613.644.039.950	705.690.645.942	811.544.242.834
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.663.582.663,54	29.605.000.000	34.045.750.000	39.152.612.500	45.025.504.375
4.1.01	Pajak Daerah	8.425.777.659	7.105.000.000	8.170.750.000	9.396.362.500	10.805.816.875
4.1.02	Retribusi Daerah	8.042.830.893,43	9.980.000.000	11.477.000.000	13.198.550.000	15.178.332.500
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.270.897.238,00	2.100.000.000	2.415.000.000	2.777.250.000	3.193.837.500
4.1.04	Lain-Lain PAD yang sah	594.076.873,11	10.420.000.000	11.983.000.000	13.780.450.000	15.847.517.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	581.364.537.849,00	486.434.583.000	559.399.770.450	643.309.736.017	739.806.196.420
4.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	565.721.813.195,00	473.484.583.000	544.507.270.450	626.183.361.017	720.110.865.170.
4.2.2	Pendapatan Transfer Provinsi/Daerah	15.642.724.654,00	12.950.000.000	14.892.500.000	17.126.375.000	14.892.500.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.259.300.000,00	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.176.001.625,00	17.563.930.000	20.198.519.500	23.228.297.425	26.712.542.039
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	629.463.422.137,54	533.603.513.000	613.644.039.950	705.690.645.942	811.544.242.834
5	BELANJA	621.343.179.386,99	540.103.513.000	633.751.069.299	721.220.823.920	830.553.947.508
5.1	Belanja Operasi	400.646.122.999,75	412.223.941.455	486.689.562.023	540.692.996.325	622.946.945.774
5.1.1	Belanja Pegawai	145.652.656.950,00	220.721.883.631	253.830.166.175	291.904.691.101	335.690.394.766
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	209.263.478.873,75	183.453.422.624	210.971.436.017	242.617.151.419	279.009.724.132
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	17.959.003.719	6.406.931.000	20.000.000.000	4.000.000.000	5.750.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.770.993.457,00	1.641.704.200	1.887.959.830	2.171.153.804	2.496.826.875
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
5.2	Belanja Modal	156.559.792.993,24	61.294.029.245	70.488.133.631.	92.468.447.903	106.338.715.089
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.047.500.000,00	7.246.738.200	8.333.748.930	9.583.811.269	11.021.382.959
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.535.841.608,00	8.650.916.929	9.948.554.468	11.440.837.638.	13.156.963.284
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.849.771.393,43	23.604.092.776	27.144.706.692	31.216.412.696	35.898.874.600
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.552.280.991,81	21.767.281.340	25.032.373.541	28.787.229.572	33.105.314.007
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	574.399.000,00	25.000.000	28.750.000	33.062.500	38.021.875
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	Belanja Tak Terduga	5.377.234.831,00	5.000.000.000	5.750.000.000	6.612.500.000	7.604.375.000
5.4	Belanja Transfer	58.760.028.563,00	61.585.542.300	70.823.373.645	81.446.879.692	93.663.911.645
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-

KODE	URAIAN	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
5.4.3	Bantuan Keuangan keDesa	58.760.028.563,00	61.585.542.300	70.823.373.645	81.446.879.692	93.663.911.645
5.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT	8.120.242.750,55	(6.500.000.000)	(20.107.029.349)	(15.530.177.978)	(19.009.704.674)
6.	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.058.496.195,02	19.000.000.000	21.850.000.000	25.127.500.000	28.896.625.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.058.496.195,02	19.000.000.000	21.850.000.000	25.127.500.000	28.896.625.000
6.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
6.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.058.496.195,02	19.000.000.000	21.850.000.000	25.127.500.000	28.896.625.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000	12.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	10.000.000.000	-	-	-
6.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-
6.2.4	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000	12.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Pembiayaan NETTO	24.058.496.195,02	6.500.000.000	20.107.029.349	15.530.177.978	19.009.704.674
	SILPA	32.178.738.945,57	0	0	7.097.322.022	7.386.920.326



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB. IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di Maluku. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

IV.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kota Tual akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Kota Tual yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaraan urusan pemerintahan.

IV.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro

- A. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran Tingginya kemiskinan di Kota Tual masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kota Tual pada Tahun 2022 sebesar 20,56 persen. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan karena belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk didalamnya aman, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.
- B. Kualitas Infrastruktur dasar Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur, rendahnya pemenuhan kebutuhan air baku, air limbah dan sanitasi lingkungan; serta terbatasnya sarana dan prasarana transportasi laut
- C. Kualitas Sumberdaya Manusia. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Di sisi lain tantangan bonus demografi dan perubahan industri di era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber RPD Kota Tual Tahun 2024-2026 IV-3 daya manusia di Kota Tual. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Kota Tual dinilai belum memadai ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun 2022 sebesar 68,60 yang masih di bawah nasional sebesar 72,91.
- D. Pertumbuhan ekonomi Perekonomian Kota Tual masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Kota Tual tahun 2022 meningkat positif jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 5,68 persen.

E. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan Capaian nilai SAKIP pada tahun 2022 mendapat nilai CC masih harus terus ditingkatkan terutama dalam pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur. Hal tersebut juga dalam rangka menjawab tantangan ke depan yaitu bagaimana birokrasi mampu menjadi katalisator dalam percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah Kota Tual

IV.1.2 Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Wajib

1. Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Partisipasi pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat di pulau-pulau;
- Kualitas hasil lulusan masih rendah;
- Distribusi dan jumlah tenaga pendidik (guru) dan kependidikan tidak merata ke sekolah-sekolah terutama sekolah yang berada di daerah terpencil;
- Masih rendahnya kompetensi guru;
- Kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan masih kurang;
- Rendahnya minat baca peserta didik di satuan pendidikan;
- Kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan terutama di wilayah pulau-pulau;
- Rendahnya akses pelayanan pendidikan;
- Kurangnya koordinasi pemerintah provinsi pada jenjang pendidikan menengah.

b. Kesehatan

- Distribusi fasilitas kesehatan tidak merata di masing-masing kecamatan terutama di daerah terpencil dan belum memiliki aksesibilitas yang baik;
- Angka kematian ibu melahirkan dan anak masih tinggi;
- Kasus gizi buruk masih tinggi;
- Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular;
- Kualitas kesehatan lingkungan (sanitasi) permukiman penduduk masih rendah;
- Rendahnya kualitas SDM kesehatan;

- Minimnya fasilitas berupa alat-alat kesehatan yang sesuai standar terutama wilayah kecamatan kepulauan;
 - Minimnya aksesibilitas pasien masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan terutama wilayah kecamatan kepulauan;
 - Kurangnya SDM tenaga kesehatan, medis, paramedis dan non kesehatan di RSUD Maren.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Terbatasnya akses air bersih.
 - Belum optimalnya ketersediaan air baku, air limbah dan drainase;
 - Kondisi jalan, jembatan dan drainase belum sepenuhnya baik sesuai dengan kapasitas jalan;
 - Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi;
 - Rendahnya sertifikasi tenaga jasa konstruksi;
 - Kebutuhan akan perumahan di perkotaan makin meningkat, menyebabkan alih fungsi lahan tidak terbandung;
 - Rencana tata ruang wilayah Kota Tual belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat hal ini menyebabkan ruang publik berubah peruntukkan.
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- Masih banyak penduduk yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat keterbatasan pembiayaan perumahan;
 - Kurangnya penataan kawasan permukiman dan rendahnya kualitas permukiman padat penduduk;
 - Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki prasarana dan utilitas umum yang memadai.
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Masih rendahnya kompetensi anggota (Polisi Pamong Praja) dalam pelayanan;
 - Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
 - Keterbatasan sarana prasarana dalam penanganan pelanggaran K3;
 - Kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan masih rendah;

- Masih kurangnya pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya demokrasi;
- Masih kurangnya kemandirian dan kinerja bidang politik;
- Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan konflik sosial seperti huru hara;
- Belum optimalnya pelayanan terkait bencana kebakaran.
- Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM PNS.

f. Sosial

- Meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan seperti narkoba, miras dan HIV/AIDS;
- Ketersediaan data base terkait kemiskinan, PMKS dan PSKS belum baik;
- Belum optimalnya masyarakat miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial;
- Masih terdapat masyarakat miskin yang belum terjangkau dan menerima manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan;
- Penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat guna pengurangan resiko bencana belum optimal;
- Belum adanya panti rehabilitasi untuk penanganan masalah sosial;
- Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan terhadap disabilitas.

2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Koperasi, UKM dan Perdagangan

- Ketersediaan koperasi aktif yang cukup berkualitas masih sedikit;
- Rendahnya minat masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan koperasi;
- Kurangnya peran aparat pemerintahan dalam pembinaan koperasi;
- Kerja sama antar koperasi, UKM dan lembaga keuangan (perbankan) belum terlaksana;
- UKM Non BPR/LKM yang aktif masih sedikit;
- BPR/LKM yang aktif masih sedikit;
- Pengembangan UKM belum didukung dengan optimalisasi peningkatan SDM para pelaku usaha;
- Kurangnya inovasi, penelitian dan pengembangan produk.
- Ketersediaan stok barang dan regulasi terkait ketersediaan Stok barang (Gudang) belum ada;

- Belum memiliki kemampuan dalam export dan import;
 - Belum dimanfaatkannya prasarana pasar secara optimal;
 - Masih rendahnya daya saing untuk produk daerah;
 - Pembinaan terhadap kelompok pedagang belum ada;
 - Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi terkait komoditi perdagangan yang masuk-keluar daerah;
 - Belum tersedianya data dan informasi usha mikro dan kecil.
- b. Ketenagakerjaan
- Tingkat pengangguran masih tinggi;
 - Kurangnya data base ketenagakerjaan daerah;
 - Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui pelatihan berbasis kompetensi;
 - Penyerapan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal masih rendah;
 - Belum adanya gedung dan sarana prasarana BLK sebagai tempat untuk peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat;
 - Ketersediaan lapangan kerja yang belum memadai untuk menunjang jumlah angkatan kerja yang tinggi.
 - Belum terbangunnya kantor PTSP yang memadai dalam melaksanakan pelayanan secara terpadu.
- c. Pangan
- Kurangnya ketersediaan bahan pangan lokal;
 - Rendahnya konsumsi protein dan energi.
 - Belum adanya pemetaan terkait potensi wilayah kerawanan pangan;
 - Masih rendahnya produksi pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai pangan pokok;
 - Belum memiliki kelompok binaan terkait pengolahan bahan lokal;
 - Belum tersedia Penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan.
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- Masih rendahnya kualitas hidup, perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan;
 - Kesejahteraan dan perlindungan anak masih rendah, kualitas anak dan perempuan belum optimal;
 - Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki;

- Penanganan kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
 - Belum adanya tenaga konselor hukum dan tenaga konseling terkait penanganan kasus perempuan dan anak;
 - Pengharus Utama Gender (PUG) belum optimal.
- e. Kepemudaan dan Olahraga
- Fasilitas untuk menampung aktivitas dan kreativitas kepemudaan tidak tersedia;
 - Rendahnya perhatian terhadap olah raga prestasi;
 - SDM bidang olahraga (pembina, pelatih dan olahragawan) masih kurang baik kuantitas maupun kualitas;
 - Masih terbatasnya upaya pembibitan untuk atlet berprestasi dan unggul.
 - Masih minim pemahaman masyarakat akan pentingnya olahraga;
 - Belum adanya pembinaan bagi wirausaha muda dan organisasi olah raga serta atlitnya;
 - Koordinasi antar Lembaga-Lembaga dengan Dinas terkait dalam pembinaan bidang keolahragaan;
 - Belum tersedianya data base tentang kepemudaan.
 - Terbatasnya penyelenggaraan event olahraga dalam kepemudaan.
- f. Lingkungan Hidup
- Kurang optimalnya penanganan terkait persampahan Kota;
 - Belum adanya pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - Penanganan sampah khususnya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya belum dilakukan;
 - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah dan membuangnya ke tempat sampah;
 - Kualitas air makin menurun, kualitas udara (polusi) makin meningkat terutama dalam Kota;
 - Tingginya kerusakan sumber daya alam daerah pesisir dan pulau kecil;
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- g. Perhubungan
- Jumlah trayek belum mencakup semua kawasan pemukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;
 - Pengelolaan terhadap rute dan pemberhentian (halte) bagi angkutan umum belum tertata dengan baik;

- Jumlah terminal sebagai sarana pelayanan transportasi darat belum memadai;
- Pengelolaan terhadap area parkir pada sepadan jalan belum tertata dengan baik;
- Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas, pagar pengaman maupun ketersediaan marka jalan yang memadai;
- Kurangnya fasilitas pelabuhan Feri;
- Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan belum memadai;
- Angkutan yang memenuhi ijin kelaikan jalan masih sedikit;
- Moda transportasi untuk wilayah kecamatan kepulauan belum memadai;
- Aksesibilitas ke daerah terpencil khususnya kecamatan kepulauan belum memiliki pelabuhan laut;
- Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang KIR dan tambat labuh.

3. Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

- Masih rendahnya infrastruktur pariwisata diantaranya seperti akomodasi yang belum memadai dan sesuai dengan standar;
- Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata berbasis pesisir, laut dan pulau kecil dan wisata budaya;
- Masih banyak kawasan wisata dan objek wisata yang belum dikelola secara profesional;
- Rendahnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional, dikarenakan kurangnya perhatian untuk pengembangan daerah yang memiliki potensi pariwisata serta kurangnya promosi pariwisata yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PDRB.
- Masih rendahnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata

b. Perikanan

- Belum adanya data base terkait perikanan;
- Belum optimalisasi potensi perikanan sebagai daya gerak untuk ekonomi daerah yang berkelanjutan;
- Masih terbatasnya sumber daya aparatur bidang perikanan (tenaga penyuluh/pendamping) dalam pengelolaan hasil budidaya dan tangkapan;

- Masih terbatasnya sarana prasarana penangkapan ikan dan pengelolaan hasil tangkapan bagi nelayan;
- Belum adanya rencana dan pemetaan potensi areal budidaya (misalnya: Areal penangkapan);
- Pemberian sarana dan prasarana penangkapan ikan yang belum tepat sasaran (perencanaan tidak sesuai kebutuhan tetapi masih bersifat keinginan);
- Rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, dan terbatasnya akses pemasaran;
- Masih banyak nelayan yang termasuk kategori miskin.
- Kurang optimal dukungan pemerintah terhadap Perusahaan Daerah;
- Kurangnya pendampingan, pelatihan dan pendidikan bagi petani;
- Masih ada Penangkapan dengan bahan peledak.

c. Pertanian

- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian;
- Kurangnya tenaga penyuluh dan pendamping;
- Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan teknologi produksi di tingkat petani/peternak;
- Masih kurangnya produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan;
- Minimnya nilai tambah yang diperoleh para petani/pekebun mutu hasil pertanian yang rendah;
- Ketersediaan pasar dan penanganan produk pasca panen belum maksimal.
- Belum dilakukan pemetaan kesesuaian lahan.

d. Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian seni dan nilai-nilai budaya;
- Belum adanya penyelenggaraan event budaya dan seni;
- Minimnya organisasi/komunitas kesenian dan budaya;
- Kurangnya pembinaan terhadap organisasi/komunitas kesenian dan budaya;
- Belum tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan seni & budaya daerah;
- Lemahnya manajemen grup kesenian dan belum terorganisir dengan baik;
- Belum adanya kurikulum muatan lokal yang baku di sekolah.

4. Penunjang Urusan Pilihan

a. Keuangan

- Tata kelola keuangan dan anggaran daerah belum sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi lebih cenderung mengikuti keinginan.
- Penatausahaan keuangan pada OPD masih belum tertib;
- Sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas khususnya bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah masih terbatas;
- Administrasi kepemilikan aset daerah masih belum tertib;
- Budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik belum optimal;
- Kurangnya koordinasi antar individu maupun instansi (OPD) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Belum optimalnya pengembangan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Sumber pendapatan daerah masih terbatas;
- Penggalian potensi penerimaan daerah belum dioptimalkan;
- Peran BUMD dalam peningkatan PAD masih belum optimal.

IV.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kota Tual terkait dengan peningkatan kapasitas investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). periode Nilai investasi PMDN di Kota Tual cenderung selama 5 tahun terakhir menunjukkan arah positif dengan nilai tertinggi pada angka Rp. 39.179.800.000 di tahun 2022. Namun Kinerja yang positif ini sekiranya masih harus lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang, apalagi kalau dilihat dari segi PMA yang masih belum menunjukkan perkembangan di Kota Tual. Kota Tual masih sangat sulit menjadi target dari para investor asing. Hal ini jelas masih menjadi fokus dan perhatian pemerintah Kota Tual dalam mempromosikan Wajah Kota Tual di Panggung Internasional pada periode mendatang.

IV.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis Internasional/Global meliputi:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
2. Perubahan Iklim (global warming/climate change);
3. Pengarusutamaan Gender;
4. Revolusi Industri 4.0.

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
3. Standar Pelayanan Minimal;
4. Bonus Demografi;
5. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur;
6. Percepatan Penurunan Stunting.

Isu Strategis Regional Maluku meliputi:

1. Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh;
2. Sumber Daya Manusia Unggul dan Kompetitif;
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Berdaya Saing;
4. Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran;
5. Percepatan Penurunan Stunting;
6. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kerentanan Wilayah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
8. Konektivitas serta Sarana dan Prasarana;
9. Minimnya Capaian Vaksinasi COVID-19;
10. Investasi, Pengembangan Pariwisata dan Budaya Daerah;
11. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional;
12. Pengembangan Blok Migas;
13. Pembangunan Ambon New Port.

Isu Strategis Tual meliputi:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Sumberdaya Manusia;
3. Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan;
4. Tata kelola pemerintahan;
5. Kemandirian Ekonomi;
6. Kondisi Saran dan Prasarana dasar dan Wilayahbelum memadai;
7. Kesenjangan Wilayah dan Pemerataan Pembangunan;
8. Pelestarian sumberdaya alam dan Penanganan Bencana;
9. Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama yang Rentan serta Potensi Gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Peningkatan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Masyarakat serta Penguatan Kapasitas Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
11. Percepatan Penurunan Stunting.

Isu Strategis Pembangunan Kota Tual mengacu pada isu strategis provinsi, nasional dan internasional diatas. Untuk mengetahui Isu Strategis Kota Tual secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

IV.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

Tingginya kemiskinan di Kota Tual masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kota Tual pada Tahun 2022 sebesar 20,56 persen. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan karena belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, dan sanitasi layak termasuk didalamnya aman, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.

IV.2.2 Peningkatan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Masyarakat serta Penguatan Kapasitas Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

Kota Tual sebagai bagian dari Provinsi Maluku yang juga terintegrasi sebagai bagian dari Indonesia, harus melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam pembangunan Kota Tual, peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dijadikan isu strategis karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak. Pemerintah Kota Tual akan memprioritaskan ketenteraman umum dalam masyarakat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

IV.2.3 Percepatan Penurunan Stunting

Percepatan Penurunan Stunting merupakan isu nasional yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kota Tual, objeknya dimulai dari Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu Menyusui, Baduta dan Balita dengan melakukan Intervensi Gizi Sensitif seperti Edukasi dan Konseling Perubahan Pelaku, Akses Pangan Bergizi dan juga Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi, Intervensi Gizi Spesifik seperti Pemberian Makanan Tambahan, Tata Laksana Gizi Buruk, Posyandu, Pemeriksaan Kehamilan dan lain sebagainya. dan

Intervensi Pendukung seperti Advokasi Pemerintah Daerah dan Konvergensi Pencegahan stunting di Desa.

IV.2.4 Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien belum sepenuhnya diterapkan, hal ini akan berdampak pada ketidakpuasan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan akan berhasil jika pelayanan publik yang diberikan optimal dan memuaskan masyarakat. Dengan adanya berbagai tuntutan terkait reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan. Meningkatnya gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan dengan menekankan pada pelaksanaan anggaran yang efektif dan digunakan secara baik, Menurunkan prakterk KKN dan perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, partisipatif.



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

BAB. V TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Tahun 2024-2026 merupakan periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2024-2026 bukan merupakan rencana atau janji kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan telah berakhirnya RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota Tual belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan provinsi dan nasional. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Tual harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan strategis daerah selama periode tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tual Tahun 2024-2026 Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Tual Tahun 2005-2025, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tual Tahun 2018-2023. Mengingat RPJPD Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan tujuan dan sasaran, arah umum pembangunan jangka panjang, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJPD KotaTual. Arah umum pembangunan jangka panjang Kota Tual tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan daerah, yaitu **“Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kota Tual Tahun 2005–2025, dirumuskan5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun sistem pengamanan yang mandiri pada masyarakat
2. Membangun masyarakat kewargaan (*civil society*)
3. Penciptaan nilai tambah potensi daerah

4. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
5. Pembangunan yang berorientasi menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan dan mengembangkan budaya pelestarian lingkungan hidup.

V.1 TUJUAN DAN SASARAN

Setelah pelaksanaan masing-masing misi tersebut diatas maka akan mencapai tujuan pembangunan Kota Tual. Dengan mencapai ke-5 (lima) tujuan dibawah ini, maka Visi Pembangunan Kota Tual akan tercapai pula. Adapun lima tujuan pembangunan Kota Tual adalah:

1. Terwujudnya Kota Tual yang aman
2. Terwujudnya masyarakat Kota Tual yang Berbudaya
3. Terwujudnya Kota Tual yang Berdaya Saing
4. Terwujudnya Kota Tual yang Sejahtera
5. Terwujudnya Kota Tual yang Berkelanjutan

Dengan visi diatas, menjadikan corak masyarakat dan daerah Kota Tual yang ingin diwujudkan pada tahun 2025 mendatang adalah daerah yang dihuni oleh masyarakat yang makin sejahtera, yang senantiasa bersikap arif dan berkemampuan produktif dan mempertimbangkan kesinambungan lingkungan hidup daerahnya, serta makin mengindahkan prasyarat terbangunnya tatanan masyarakat berkesadaran hukum tinggi guna mewujudkan sistem sosial dan politik yang demokratis. Untuk memperkuat kondisi sejahtera dan demokratis tersebut, makadi perlukan pula kelangsungan kehidupan agama yang akan menyeimbangkan kebutuhan ragawi dan ukhrowi, yang dibangun oleh penghormatan yang makin baik terhadap kesalehan sosial dan keragaman dalam keyakinan beragam dalam satu kesatuan sistem keagamaan nasional yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ukuran dalam mewujudkan Kota Tual yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya untuk 20 tahun mendatang diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

A. Meningkatnya kesadaran dan kohesifitas sosial (solidaritas).

Ditandai dengan terpeliharanya kehidupan masyarakat dan lingkungan yang harmonis, dinamis, rukun, damai, dan aman baik terhadap diri dan lingkungan (fisik maupun non fisik), baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun

factor manusia, penataan kehidupan sosial ekonomi kedepan, serta penciptaan iklim sosial dan ekonomi yang kondusif.

B. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat.

Ditandai dengan kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab, dan bermotivasi untuk maju dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat istiadat, jati diri dan karakter lokal, menjaga kerukunan dan keharmonisan umat beragama, membangun relasi dan interaksi antar budaya, memperkuat modal sosial, dan tetap memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Tual yang bercirikan kepulauan.

C. Berkembangnya konsep kompetensi inti industry serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kota Tual.

Ditandai dengan terciptanya manusia yang unggul dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi guna memanfaatkan sumber daya alam terutama sumber daya kepulauan dan Kelautan Kota Tual secara bijaksana dan berkelanjutan yang didukung tata kelola pemerintahan (*governance*) yang baik dan bersih serta iklim investasi yang kondusif.

D. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Ditandai dengan terpenuhinya bahan pangan, meningkatnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, berkembangnya ekonomi lokal, terpenuhinya kebutuhan perumahan serta usaha-usaha pengembangan program penanggulangan kemiskinan, menguatnya ketahanan pangan, dan terciptanya lapangan kerja.

E. Meningkatnya keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Ditandai dengan meningkatnya fungsi, daya dukung dan kenyamanan lingkungan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan yang lestari.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Tual menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi, dan misi RPJPD tersebut kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran kedalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran kedalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran kedalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

Penyelenggaraan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya telah membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat target-target yang belum tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Dalam Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tual sampai dengan Tahun 2025 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Tual Tahun 2018–2023, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran akan member arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan dalam tabel 5.1.

Tabel V-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	-					
1.1	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme ASN	Indeks Profesional ASN	70	72	75	78	80	80
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Kota	CC	B	B	BB	BB	BB
		Nilai LPPD Kota	-	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20
1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	54,84	78,00	80,00	80,00	88,00	88,00
1.4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,05	2,1	2,5	3,00	3,1	3,1
2	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	68,60	68,89	69,21	69,53	69,85	69,85
2.1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung Teknologi Informasi Digital	Rata-Rata Lama Sekolah	10,54	10,55	10,56	10,57	10,58	10,58
		Harapan Lama Sekolah	13,99	14,03	14,07	14,11	14,15	14,15
2.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,81	65,94	66,07	66,20	66,33	66,33
2.3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	88,46	88,70	88,90	89,11	89,33	89,33
		IDG	58,56	59,07	59,58	60,09	60,60	60,60
2.4	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,3	55,5	55,6	55,7	55,8	55,8
2.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi dibidang olahraga nasional	Indeks Pembangunan Pemuda	54,34	56,01	57,68	59,35	61,02	61,02
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,68	5,82	6,01	6,3	6,4	6,4
3.1	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	10,34	13,65	16,96	20,27	23,58	23,58

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan	7,32	9,95	12,58	15,21	17,84	17,84
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,66	6,91	7,16	7,41	7,45	7,45
		Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,92	4,97	5,02	5,07	5,12	5,12
3.2	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Indeks Konektivitas	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
3.3	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Jumlah Investasi	100	105	110	115	120	120
4	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	20,56	19,75	19,35	18,95	18,75	1875
		Indeks Gini	-	0,31	0,306	0,302	0,29	0,29
4.1	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks ketahanan pangan	55,89	62,92	69,95	76,98	84,01	84,01
4.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Pendapatan Perkapita (Rupiah)	18.313.814	19.261.385	20.209.589	21.157.793	22.105.997	22.105.997
4.3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11	7,52	6,93	6,34	5,75	5,75
4.4	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Indeks Desa Membangun	0,7724	0,7945	0,8166	0,8387	0,8608	0,8608
5	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kota Berkelanjutan	60,47	54,68	61	64	68	68
		Indeks Resiko Bencana	168,00	165,00	160,00	155,00	150,00	150,00
5.1	Meningkatnya Ketahan Daerah	IndeksKetahanan Daerah	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8
5.2	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	IndeksKualitasLingkunganHidup	-	42	76	78	80	80

Data Olahan Bappeda, 2023.



BAB VI
STRATEGI,
ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN

BAB. VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) Tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut.

VI.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KOTA TUAL TAHUN 2024 - 2026

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tual pada 3 (tiga) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel IV.1 berikut ini :

Tabel VI-1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tual Tahun 2024-2026

No	Visi : “Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Membangun sistem pengamanan yang mandiri pada masyarakat	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
					Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan
					Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalisasi arsip
				Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)
				Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (<i>e-Government</i>)	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
				Meningkatkan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
				Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah
				Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah

No	Visi : “Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Membangun masyarakat kewargaan (<i>civil society</i>)	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Digital	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Meningkatkan minat baca
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan Peningkatan Promosi dan Prevensi kesehatan
				Peningkatan Pelayanan, Advokasi Dan KIE Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas pelayanan,Advokasi dan KIE keluarga berencana
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia Perlindungan perempuan anak dan lansia
			Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah.	Pelestarian Nilai Budaya melalui penyediaan sarana prasarana penunjang dan penguatan kelembagaan
			Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga
3	Penciptaan nilai tambah potensi daerah	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan	Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan guna meningkatkan nilai produksinya.	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya

No	Visi : “Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”						
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
					Peningkatan produksi tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura		
				Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan		
				Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Meningkatkan sarana & prasarana, promosi, keamanan perdagangan & perlindungan konsumen		
				Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi dan UKM	Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		
				Mengembangkan pariwisata unggulan daerah	Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif		
			Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasaran dalam pengembangan wilayah			Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan
						Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan
						Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman
			Meningkatnya Iklim Investasi Daerah			Perluasan jaringan investasi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah
4	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi pangan		

No	Visi : “Mewujudkan Kota Tual Sebagai Kota Kepulauan yang Aman, Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan”				
	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdayasaing	Pelayanan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja
				Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan
			Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa	Penataan pemerintahan desadan pemberdayaan masyarakat desa
				Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa
5	Pembangunan yang berorientasi menjaga keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan dan mengembangkan budaya pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan berkelanjutan	Meningkatnya Ketahan Daerah	Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan , penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana
			Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup

VI.2 PROGRAM PEMBANGUNAN

Penjabaran lebih detail dari tujuan dan sasaran tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tual bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai tiga tahun kedepan dalam RPD Kota Tual Tahun 2024 - 2026.

VI.2.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tual Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPJPD tahun 2020-2025, pada tahap/periode akhir RPJPD Tahun 2025, Kota Tual diharapkan telah mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat modern, minimal sejajar dengan kota maju lainnya.

Adapun prioritas RPJPD untuk tahun 2024-2025, dalam rangka mencapai sasaran pokok tersebut adalah:

1. **Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;** meningkatkan fungsi, pengelolaan dan memperluas cakupan sarana dan prasarana (dasar, wilayah) yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
2. **Pemantapan Daya Saing Sumber Daya Manusia;** Peningkatan akses masyarakat pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, serta perluasan pola perilaku hidup sehat, peningkatan penerapan pendidikan berorientasi IPTEK dan dunia usaha, pemantapan kapasitas dan kerjasama lembaga pendidikan, pelestarian norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, pelestarian peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan,
3. **Pemantapan Daya Saing Perekonomian;** penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri, jasa, dan pariwisata sebagai motor penggerak; meningkatkan investasi guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi;
4. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial;** memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; menjaga ketahanan dan kemandirian pangan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin di kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas terutama bagi keluarga miskin.

5. **Pengelolaan Sumber Daya Alam, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;** Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung, pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya, mitigasi dan penanggulangan bencana.
6. **Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;** Pemantapan kapasitas organisasi masyarakat dan politik, pemeliharaan kesadaran, kepatuhan dan penegakan sertapenataan produk hukum daerah, pemantapan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan member arah yang jelas bagi pemerintah Kota Tual dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPD setiap tahun. Penetapan fokus RPD Tahun 2024-2026 disajikan pada Gambar berikut ini.

Gambar VI-1 Fokus RPD Tahun 2024-2026



VI.2.2 Program Perangkat Daerah

Sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan RPD Kota Tual, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Kepmen Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan Rencana Pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program sebagai berikut: Semua OPD (Sekretariat, Inspektorat, Dinas, dan Badan) melaksanakan program OPD yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui program-program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- j. Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan kecamatan melaksanakan program-program sebagai berikut:

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- c. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah
- g. dan lain-lain.

Tabel VI-2 Program Pembangunan Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	
1	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif				Indeks Reformasi Birokrasi			
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik				Indeks Pelayanan Publik			
		Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang diberikan layanan		Kecamatan	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Kecamatan	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen LPPD	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		SEKDA
					Dokumen Kesejahteraan Sosial			
					Dokumen Produk Hukum Daerah			
			Dokumen Kerjasama Daerah					
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Dokumen RUP		SEKDA	
					Dokumen TPID			
				Program Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi			
			Peningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik		Dukcapil	
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA						
				Persentase Kepemilikan KK				

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
			pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun		Dukcapil
					Persentase Kepemilikan Akte Kematian		
					Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim		
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama		Dukcapil	
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah dengan digitalisasi arsip,	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip		DISARPUS	
		Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	BKPSDM	
					Persentase penempatan ASN sesuai dengan standard kualifikasi jabatan		
					Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	
					Persentase ASN yang berkinerja baik	BKPSDM	

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi		BKPSDM
		Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (<i>e-Government</i>)	Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah		KOMINFO
				Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik		KOMINFO
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik		KOMINFO
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI)		KOMINFO
		Meningkatkan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan	Peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman)		SATPOL PP

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
		masyarakat					
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		KESBANG
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif		KESBANG
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		KESBANG
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani		KESBANG
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Nilai SAKIP		
		Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran,	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran,	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Persentase Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKPD		BAPPEDA

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
		pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan Daerah.	pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Pembangunan Daerah			
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		BAPPEDA
					Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan		BPKAD
					Jumlah Laporan Keuangan yang diterkonsolidasi		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materialitas)		BPKAD
		Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti		INSPEKTORAT
					Opini BPK atas LKPD Pemkot Tual		
					Level Kapabilitas APIP Kota		

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
					Tual		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Pemkot Tual		INSPEKTORAT
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD		SEKRETARIAT DPRD
					Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD		
2	Terwujudnya Masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter				Indeks Pembangunan Manusia		
2.1	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berdayasaing yang didukung Teknologi Informasi Digital				Rata-Rata Lama Sekolah		
					Harapan Lama Sekolah		
		Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Pembangunan Sarana prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD		DIKBUD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan		
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini		
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Merdeka		DIKBUD

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana		DIKBUD
			Meningkatkan minat baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca		DISARPUS
2.2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan				Angka Harapan Hidup		
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar		DINKES
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Sesuai Standar		DINKES
			Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standard kompetensi		DINKES
		Peningkatan Pelayanan, Advokasi Dan KIE	Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia		DINAS P3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
		KB	berencana		15-49 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)		
				Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		DINAS P3AP2KB
2.3	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender				IPG IDG		
		Meningkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia	Penguatan kelembagaan dan jejaring perempuan, anak dan lansia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsif Gender		DINAS P3AP2KB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga berwirausaha Rata-rata usia kawin Pertama		DINAS P3AP2KB

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak		DINAS P3AP2KB
			Perlindungan perempuan anak dan lansia	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan		DINAS P3AP2KB
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan		DINAS P3AP2KB
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan		DINAS P3AP2KB
2.4	Meningkatkannya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal				Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Kemitraan pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam apresiasi kebudayaan daerah.	Pelestarian Nilai Budaya melalui penyediaan sarana prasarana penunjang dan penguatan kelembagaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Objek Pengembangan Kebudayaan yang dikembangkan		DIKBUD
				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan		DISARPUS

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
2.5	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional				Indeks Pembangunan Pemuda		
		Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya	Peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga penyelenggaraan pertandingan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		DISPORA
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga		DISPORA
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pelajar yang aktif di pramuka		DISPORA
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif				Laju Pertumbuhan Ekonomi		
3.1	Meningkatnya Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan				Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan		
					Laju pertumbuhan sektor perdagangan		
					Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		
					Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		
		Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi tanaman	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		DINAS PERIKANAN
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		DINAS PERIKANAN

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
		pangan dan holtikultura, perkebunan dan perikanan guna meningkatkan nilai produksinya.		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)		DINAS PERIKANAN
			Peningkatan produksi tanaman perkebunan, pangan dan holtikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Kg)	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian		DINAS PERTANIAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)		DINAS PERTANIAN
					Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan		DINAS PERTANIAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan		DINAS PERTANIAN
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani		DINAS PERTANIAN
	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah	Pengelolaan industri kecil melalui pendataan, pembinaan dan pelatihan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri		DISPERINDAG	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan		DISPERINDAG	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem		DISPERINDAG	

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Industri Nasional	informasi industri nasional		
		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Meningkatkan sarana & prasarana, promosi, keamanan perdagangan & perlindungan konsumen	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi perizinan pendaftaran perusahaan		DISPERINDAG
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Nilai Inflasi Daerah		DISPERINDAG
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir		DISPERINDAG
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar		DISPERINDAG
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang		DISPERINDAG
		Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan Koperasi dan UKM	Melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam		DISKOPUMKM
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi		DISKOPUMKM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		DISKOPUMKM
				Program Pendidikan Dan Latihan	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan		DISKOPUMKM

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Perkoperasian	dan latihan perkoperasian		
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan		DISKOPUMKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pemberdayaan usaha mikro		DISKOPUMKM
				Program Pengembangan UMKM	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil		DISKOPUMKM
		Mengembangkan pariwisata unggulan daerah	Melaksanakan pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan		DINAS PARIWISATA
				Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan		DINAS PARIWISATA
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kreatifitas Usaha Ekonomi yang Dihasilkan		DINAS PARIWISATA
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Jumlah wisausaha kreatif baru		

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Ekonomi Kreatif			
3.2	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah				Indeks Konektivitas		
		Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentasi Kemantapan Jalan Kota		PUPR
		Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai	Penyediaan infrastruktur transportasi dan fasilitas perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan		DISHUB
				Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai atau laut		DISHUB
		Pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Penataan, pengendalian pembangunan perumahan dan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir		PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentasi Rumah Tangga yang terlayani Air Minum		PUPR
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentasi Volume sampah yang tertangani		PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentasi Rumah Tangga yang terlayani Air Limbah		PUPR

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Sistem Air Limbah			
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengurangan Genangan		PUPR
				Program Pembangunan Permukiman	Persentase pemenuhan Sistem jaringan sarana dan prasarana permukiman		PUPR
				Program Pengembangan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi bangunan gedung yang diterbitkan		PUPR
				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentasi bangunan yang ditata dan dipelihara		PUPR
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		PUPR
				Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Layak Huni yang Tertangani		DINAS PERKIM
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani		DINAS PERKIM
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha		DINAS PERKIM
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian		DINAS PERKIM

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
3.3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah				Jumlah Investasi		
		Perluasan jaringan investasi	Menjalin kerjasama investasi antar daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal		DINAS PMPTSPDAN NAKER
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi		DINAS PMPTSPDAN NAKER
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi		DINAS PMPTSPDAN NAKER
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP		DINAS PMPTSPDAN NAKER
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pendaftaran Perusahaan melalui aplikasi OSS		DINAS PMPTSPDAN NAKER
4	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat				Persentase Penduduk Miskin		
					Indeks Gini		
4.1	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan				Indeks ketahanan pangan		
		Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan	Mengendalikan sistem stok bahan pangan, menyediakan sarpras pendukungnya & memperbaiki pola konsumsi pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok (Kg/kapita/tahun)		DINAS KETAHANAN PANGAN
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Non Terigu		DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Masyarakat			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Tertanganinya Daerah kerawanan pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN
4.2	Meningkatnya kesejahteraan sosial				Pendapatan perkapita		
		Peningkatan kualitas masyarakat golongan miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan sosial		DINSOS
					Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar		DINSOS
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		DINSOS
				Program	Cakupan kelompok		DINAS

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	ketahanan yang aktif Persentase keluarga berwirausaha Rata-rata usia kawin Pertama		P3AP2KB
4.3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berkompetensi dan berdaya saing				Tingkat Pengangguran terbuka		
		Pelayanan bagi pencari kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		DINAS PMPTSP NAKER
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		DINAS PMPTSP NAKER
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		DINAS PMPTSP NAKER
		Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelolakerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		DINAS PMPTSP NAKER
4.4	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan				Indeks desa membangun		
		Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka	Penataan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Program Penataan Desa	Persentase tata pemerintahan desa		DINAS PMD
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa		DINAS PMD

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
		otonomi desa		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentasi Desa Tertib Administrasi sesuai aturan Jumlah Dokumen Profil Desa		DINAS PMD
		Pembentukan dan penguatan kelembagaan usaha masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di desa	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif		DINAS PMD
5	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan berkelanjutan				Indeks Kota Berkelanjutan		
					Indeks Resiko Bencana		
5.1	Meningkatnya Ketahanan Daerah				Indeks Ketahanan Daerah		
		Peningkatan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW		PUPR
				Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		BPBD
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan		DINAS SOSIAL

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
					sosial selama masa tanggap darurat		
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
5.2	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		LH
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup		LH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan		LH
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan limbah B3		LH

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Urusan	OPD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
				Beracun (Limbah B3)			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kota Tual		LH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah lembaga/keompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		LH
				Program Pengelolaan Persampahaan	Persentase sampah yang tertangani		LH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB. VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab OPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel VII-1 Kapasitas Rril Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Kota Tual Tahun 2024-2026

No	Jenis Belanja	Kondisi Awal		Proyeksi		
		2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	BELANJA					
5.1	Belanja Operasi	428.974.690.373	412.223.941.455	486.689.562.023	540.692.996.325	622.946.945.774
5.1.1	Belanja Pegawai	151.408.368.328	220.721.883.631	253.830.166.175	291.904.691.101	335.690.394.766
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	227.972.224.903	183.453.422.624	210.971.436.017	242.617.151.419	279.009.724.132
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	20.704.737.142	6.406.931.000	20.000.000.000	4.000.000.000	5.750.000.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.889.360.000	1.641.704.200	1.887.959.830	2.171.153.804	2.496.826.875
5.2	Belanja Modal	159.724.093.041	61.294.029.245	70.488.133.631.	92.468.447.903	106.338.715.089
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.127.600.590	7.246.738.200	8.333.748.930	9.583.811.269	11.021.382.959
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.052.814.160	8.650.916.929	9.948.554.468	11.440.837.638.	13.156.963.284
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.541.038.011	23.604.092.776	27.144.706.692	31.216.412.696	35.898.874.600
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.425.719.280	21.767.281.340	25.032.373.541	28.787.229.572	33.105.314.007
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	576.921.000	25.000.000	28.750.000	33.062.500	38.021.875
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	Belanja Tak Terduga	6.500.000.000	5.000.000.000	5.750.000.000	6.612.500.000	7.604.375.000
5.4	Belanja Transfer	60.930.758.200	61.585.542.300	70.823.373.645	81.446.879.692	93.663.911.645
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
5.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	60.930.758.200	61.585.542.300	70.823.373.645	81.446.879.692	93.663.911.645
5.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT	(24.045.790.675)	(6.500.000.000)	(20.107.029.349)	(15.530.177.978)	(19.009.704.674)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual Tahun, 2023.

Tabel VII-2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	CC	CC	B	52.652.719.851,00	B	57.917.991.836,10	BB	63.709.791.019,71	BB	174.280.502.706,81
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	93,59%	93,69%	93,79%	49.541.060.466,00	93,89%	54.495.166.512,60	94%	59.944.683.163,86	94%	163.980.910.142,46
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan SMP	73,36%	73,46%	73,56%		73,66%		73,80%		73,80%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	85%	90%	95%		100%		100%		100%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95,36%	95,56%	95,76%	5.766.345.108,00	95,96%	6.342.979.618,80	96,16%	6.977.277.580,68	96,36%	19.086.602.307,48
		Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4	4	4	930.503.595,00	4	1.023.553.954,50	4	1.125.909.349,95	16	3.079.966.899,45
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	70%	75%	78%	102.280.000,00	80%	112.508.000,00	85%	123.758.800,00	85%	338.546.800,00
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	0,08	0,082	0,085	8.311.845.400,00	0,087	9.143.029.940,00	0,09	10.057.332.934,00	0,09	27.512.208.274,00
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	70%	75%	76%	253.776.000,00	78%	279.153.600,00	80%	307.068.960,00	80%	839.998.560,00
1.02	DINAS KESEHATAN											
1.02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	35.272.000.000,00	B	35.450.000.000,00	BB	35.881.000.000,00	BB	106.603.000.000,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota											
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,02	0,02	0,03	44.170.847.700,00	0,04	16.561.632.470,00	0,05	12.850.395.717,00	0,05	73.582.875.887,00
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	80%	81%	82%		83%		85%		85%	
		Presentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang sesuai standar	60%	70%	75%		80%		85%		85%	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Tenaga Kesehatan yang memiliki standar kompetensi	100%	100%	100%	75.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	95.000.000,00	100%	255.000.000,00
1.02.04	Program Sediaan Faarmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	70	75	80	115.000.000,00	85	130.000.000,00	90	145.000.000,00	90,00	390.000.000,00
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	C	B	7.403.011.520	BB	9.053.312.672	A	9.811.643.939	A	26.267.968.131
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	99,75%	100%	100%	3.031.350.000	100%	3.334.485.000	100%	3.667.933.500	100%	10.033.768.500
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Pnyediaan Air Minum	Persentasi Rumah Tangga yang terlayani Air Minum	73,34	75,84	78,34	9.700.000.000	80,84	10.670.000.000	83,34	11.132.000.000	83,34	32.107.000.000
1.03.04	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentasi Volume sampah yang tertangani	60%	65%	70%	900.000.000	73%	970.000.000	75%	1.047.000.000	75%	2.917.000.000
1.03.05	Pengelolaan Dan	Persentasi Rumah	93,00%	94,00%	95,00%	5.977.900.000	96,00%	6.225.690.000	97,00%	6.628.259.000	97,00%	18.831.849.000

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Pengembangan Sistem Air Limbah	Tangga yang terlayani Air Limbah										
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengurangan Genangan	90%	92%	94%	763.000.000	96%	839.300.000	97%	923.230.000	97%	2.525.530.000
1.03.07	Program Pembangunan Permukiman	Persentase pemenuhan Sistem jaringan sarana dan prasarana permukiman	75%	80%	83%	1.980.000.000	87%	2.178.000.000	90%	2.395.800.000	90%	6.553.800.000
1.03.08	Program Pengembangan Bangunan Gedung	Jumlah Regulasi bangunan gedung yang diterbitkan	1	1	1	5.621.500.000	1	6.183.650.000	1	6.802.015.000	1	18.607.165.000
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Persentase bangunan yang ditata dan dipelihara	75%	80%	83%	8.634.307.000	87%	9.497.737.700	90%	10.447.511.470	90%	28.579.556.170
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kota	70,53%	71,33%	72,14%	50.500.000.000	72,94%	55.550.000.000	73,75%	61.105.000.000	73,75%	167.155.000.000
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00	1,00	1,00	350.000.000	1,00	385.000.000	1,00	423.500.000	1,00	1.158.500.000
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	1.800.000.000	100%	880.000.000	100%	968.000.000	100%	2.648.000.000
1.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NILAI SAKIP	CC	CC	B	2.475.245.036,70	BB	2.621.129.540,37	BB	2.883.242.494,41	BB	8.193.061.071,48
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni yang terlayani	6287	6347	6447	357.974.000,00	6547	393.771.400,00	6647	433.148.540,00	6647	1.184.893.940,00
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh yang Tertangani	45%	48%	50%	11.850.000.000,00	60%	13.805.000.000,00	70%	15.845.500.000,00	70%	41.500.500.000,00
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni diluar Kawasan Kumuh dibawah 10 ha	70%	73%	75%	7.800.000.000,00	78%	8.580.000.000,00	80%	9.438.000.000,00	80%	25.818.000.000,00
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian	1	1	27	725.000.000,00	27	797.500.000,00	27	877.250.000,00	81	2.399.750.000,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
1.05	SATPOL PP											
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.995.176.220	BB	8.324.693.842	BB	3.722.163.226	BB	15.020.253.288
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70%	75%	80%	8.166.852.400	85%	8.928.537.640	90%	9.821.391.404	90%	27.056.781.444
1.05	BPBD											
1.05.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	1.703.000.000,00	B	1.873.300.000,00	BB	2.060.630.000,00	BB	3.325.458.000,00
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	89.460	89.732	89.930	330.000.000,00	90.147	363.000.000,00	90.356	399.300.000,00	90.356	1.092.300.000,00
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	89.460	89.732	89.930		90.147		90.356		90.356	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	89.460	89.732	89.930		90.147		90.356		90.356	
1.06	SOSIAL											
1.06.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.761.861.000	B	6.163.597.000	BB	6.779.956.700	BB	18.377.014.700
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menerima bantuan sosial melalui pemberdayaan sosial	45%	46%	47%	257.835.000	48%	283.618.500	50%	311.980.350,00	50%	853.433.850
		Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	45%	46%	47%		48%		50%		50%	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar,	45%	45,6%	46%	179.186.000	47%	197.104.600	48%	216.815.060	48%	593.105.660

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
		anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima bantuan sosial kebutuhan dasar										
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat (DTKS) yang menerima jaminan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100%	879.963.000	100%	1.935.918.600	100%	2.129.510.460	100%	5.825.355.060
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	853.926.000	100%	1.064.650.400	100%	1.171.115.440	100%	3.203.629.840
1.05	DINAS PEMADAM KEBAKARAN											
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	C	CC	B	2.018.059.373	BB	2.219.865.310,30	BB	2.674.171.841,33	BB	6.725.540.354,00
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	-	-	100%	2.031.761.400	100%	2.234.937.540	100%	2.458.431.294	100%	6.345.130.234
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK dan KB											
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	C	CC	B	3.835.456.034	BB	4.219.001.637	BB	4.640.901.801	B	12.695.359.473
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD Responsif Gender	55%	60%	65%	131.629.850	70%	144.792.835	75%	159.272.119	75%	435.694.804

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	55%	60%	65%	176.424.050	70%	194.066.455	75%	213.473.101	75%	583.963.606
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan	70%	75%	80%	200.503.050	85%	220.553.355	90%	242.608.691	90%	663.665.096
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	48.400.000	100%	53.240.000	100%	58.564.000	100%	160.204.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase forum anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	56%	57%	58%	197.066.650	59%	216.773.315	60%	238.450.647	60%	652.290.612
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	65%	70%	75%	55.410.289.000	80%	60.951.317.900	85%	67.046.449.690	85%	183.408.056.590
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	3,3	3,1	2,8	560.995.930	2,6	617.095.523	2,4	678.805.075	2,4	1.856.896.528
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	1	2		3		3		9	
		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah	6.125	6.525	7.025	1.862.768.380	7.525	2.049.045.218	8.025	2.253.949.740	35.225	6.165.763.338

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
		usia 15-49										
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	16%	15%	14%		12%		10%		10%	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga berwirausaha	-	45%	47%	212.984.200	48%	234.282.620	50%	257.710.882	50%	704.977.702
		Rata-rata usia kawin Pertama	19	20	21		22		23			
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN											
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP OPD	C	CC	B	1.358.771.761	BB	1.494.648.937	BB	1.644.113.831	BB	4.497.534.529
2.090.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan Pokok (Kg/kapita/tahun)	381,79	431,15	481,70	1.334.000.000	501,63	1.467.400.000	553,72	1.614.140.000	553,72	4.415.540.000
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras (Kg/kapita/Per Hari)	0,3	0,4	0,5	904.000.000	0,6	994.400.000	0,7	1.093.840.000	0,7	2.992.240.000
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan di kota tua	20	40	60	75.000.000	80	82.500.000	100	90.750.000	100	248.250.000
2.11	LINGKUNGAN HIDUP											
1.11.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	C	CC	B	3.656.997.000,00	BB	4.022.696.700,00	BB	4.424.966.370,00	BB	12.104.660.070,00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1	0	1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000	3	1.158.500.000
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup	1	1	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	4	33.275.000
2.11.04	Program Pengelolaan	Jumlah pengelolaan	1	1	1	370.000.000	1	407.000.000	1	447.700.000	4	1.224.700.000

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Keanekaragaman Hayati	keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan										
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase tindakan verifikasi terhadap permohonan perizinan berusaha pengelolaan Limbah B3	70%	75%	78%	30.000.000	80%	33.000.000	85%	36.300.000	85%	99.300.000
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha diterbitkan Pemerintah Kota Tual	70%	73%	80%	35.000.000	85%	38.500.000	90%	42.350.000	90%	115.850.000
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Jumlah lembaga/keompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	1	1	3	70.000.000	3	77.000.000	4	84.700.000	11	231.700.000
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahaan	Persentase sampah yang tertangani	98,04	96,34	99,71	15.606.000.000	99,29	17.166.600.000	99,78	18.883.260.000	99,78	51.655.860.000
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.548.367.140,00	B	2.945.958.730,00	BB	3.240.554.603,00	BB	8.864.657.633,00
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	45.028	46.550	47.950	331.799.600,00	49.403	364.979.560,00	50.880	401.477.516,00	194.783	1.098.256.676,00
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	44,53%	64,53	84,53		100%		100%		100%	
		Persentase Kepemilikan KK	98,64%	98,80%	98,90%		99%		99,89%		100%	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	97,83%	98,80%	98,90%	207.414.240,00	99%	228.155.664,00	99,89%	250.971.230,40	100%	686.541.134,40

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
		Persentase Kepemilikan Akte Kematian	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
		Persentase Penerbitan Akte Perkawinan Non Muslim	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	6	7	33.000.000,00	8	36.300.000,00	9	39.930.000,00	9	109.230.000,00
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.861.713.860,00	B	3.147.885.246,00	BB	3.462.673.770,60	BB	10.101.172.876,60
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase tata pemerintahan desa	75%	77%	79%	500.000.000,00	82%	550.000.000,00	85%	605.000.000,00	85%	1.655.000.000,00
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	70%	72%	75%	600.000.000,00	77,5%	660.000.000,00	80%	726.000.000,00	80%	1.986.000.000,00
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai aturan	75%	77%	79%	1.800.000.000,00	82%	1.980.000.000,00	85%	2.178.000.000,00	85%	5.958.000.000,00
		Jumlah Dokumen Profil Desa	30	30	30		30		30			
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	80%	83%	85%	1.300.000.000,00	85%	1.430.000.000,00	87%	1.573.000.000,00	90%	4.303.000.000,00
2.15	PERHUBUNGAN											
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP	CC	CC	B	206.891.890.400,00	BB	227.602.579.440,00	BB	250.367.837.384,00	BB	685.034.307.224,00
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas sungai atau laut	2,5	2,5	2,5	500.000.000,00	2,5	600.000.000,00	2,5	682.500.000,00	2,5	1.782.500.000,00
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kab/Kota	Rasio konektivitas angkutan jalan	0,88	0,88	0,88	4.156.000.000,00	0,88	4.627.600.000,00	0,88	5.115.360.000,00	0,88	13.898.960.000,00
2.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.707.867.800,00	B	2.978.654.580,00	BB	3.276.520.038,00	BB	8.963.042.418,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota											
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi	Indeks Keuasan Masyarakat terhadap ruang Informasi Publik	70	75	80	691.600.000,00	85	760.760.000,00	90	836.836.000,00	90	2.289.196.000,00
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	20	20	30	8.512.250.000,00	30	1.683.475.000,00	50	1.547.522.500,00	50	11.743.247.500,00
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	0	0	30	109.200.000,00	30	120.120.000,00	50	132.132.000,00	50	361.452.000,00
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Kematangan keamanan Informasi (Indeks KAMI)	0	0	10	49.000.000,00	50	241.200.000,00	70	265.320.000,00	70	555.520.000,00
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	1.824.155.695,00	B	2.006.571.264,50	BB	3.096.681.966,95	BB	6.037.955.350,45
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi pelayanan izin usaha simpan pinjam	0	0	60%	30.000.000,00	80%	33.000.000,00	100%	36.300.000,00	100%	99.300.000,00
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	0	0	46%	193.319.000,00	62%	212.650.900,00	76%	233.915.990,00	76%	639.885.890,00
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	0	0	41,90%	30.000.000,00	46,09%	33.000.000,00	50,70%	36.300.000,00	50,70%	99.300.000,00
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	30%	30%	35%	880.800.000,00	40%	968.880.000,00	45%	1.065.768.000,00	45%	1.965.528.000,00
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	30%	30%	35%	242.000.000,00	40%	266.200.000,00	45%	292.820.000,00	45%	801.020.000,00
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Persentase Pemberdayaan usaha	12,77%	12,77%	14,05%	5.756.683.400,00	15,45%	6.332.351.740,00	17%	6.965.586.914,00	17%	19.054.622.054,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	mikro										
2.17.08	Program Pengembangan (UMKM)	Persentase pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil	0	0	35%	906.261.000,00	40%	996.887.100,00	45%	1.096.575.810,00	45%	2.999.723.910,00
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA											
2.18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.997.670.072,00	B	3.297.437.079,00	BB	3.627.180.786,90	BB	9.922.287.937,90
2.7.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	12	12	12	80.000.000,00	12	88.000.000,00	12	96.800.000,00	48	264.800.000,00
2.7.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	30	30	30	1.460.000.000,00	30	1.606.000.000,00	30	1.766.600.000,00	120	4.832.600.000,00
2.7.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	90	90	90	569.000.000,00	90	625.900.000,00	90	688.490.000,00	360	1.883.390.000,00
2.18.01	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0	0	50%	4.652.000.000,00	52%	5.117.200.000,00	55%	5.628.920.000,00	55%	15.398.120.000,00
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase minimal pemberian insentif penanaman modal	10%	10%	10%	230.000.000,00	10%	253.000.000,00	10%	278.300.000,00	10%	761.300.000,00
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi	42%	45%	50%	98.440.000,00	55%	108.284.000,00	60%	119.112.400,00	60%	325.836.400,00
2.18.05	Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	50%	55%	60%	457.000.000,00	65%	502.700.000,00	70%	552.970.000,00	75%	1.512.670.000,00
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pendaftaran Perusahaan melalui aplikasi OSS	94%	95%	96%	559.463.000,00	97%	615.409.300,00	98%	676.950.230,00	98%	1.851.822.530,00
2.19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA											

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NILAI SAKIP	CC	CC	B	3.537.163.167,00	B	3.890.879.483,70	BB	4.279.967.432,07	BB	11.708.010.082,77
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakata	8.3774	9.6340.	10.8906	2.883.950.000,00	12.1472	5.145.690.000,00	12.5661	5.660.259.000,00	12.5661	15.483.849.000,00
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	20%	40%	60%	2.856.500.000,00	80%	1.712.150.000,00	100%	1.883.365.000,00	100%	6.452.015.000,00
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pelajar yang aktif di pramuka	20%	25%	30%	1.829.000.000,00	35%	2.011.900.000,00	40%	2.213.090.000,00	40%	6.053.990.000,00
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH											
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	2.062.533.600,00	B	2.257.418.890,00	BB	2.482.560.779,00	BB	6.802.513.269,00
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca	40%	45%	50%	15.579.400,00	55%	17.137.340,00	60%	18.851.074,00	60%	51.567.814,00
2.24.04	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	73,34	75,84	78,34	4.383.000,00	80,84	4.821.300,00	83,34	5.303.430,00	83,34	14.507.730,00
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25	DINAS PERIKANAN											
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	4.671.308.780	BB	5.138.439.658	BB	5.652.283.624	BB	15.462.032.062
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	30.088,17	30.990,82	31.920,54	3.575.000.000	32.878,16	4.182.500.000	33.864,50	4.600.750.000	129.654,01	12.358.250.000
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12.819,21	13.460,17	14.133,18	655.208.705	14.839,84	720.729.576	15.581,83	792.802.533	58.015,02	2.168.740.814
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)	620,75	639,37	658,55	440.000.000	678,31	484.000.000	698,66	532.400.000	2.675	1.456.400.000
3.26	DINAS PARIWISATA											
03.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	3.219.840.233	B	3.558.240.469	BB	3.922.703.435	BB	10.700.784.137

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
03.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan	-	-	6	1.150.000.000	6	1.205.000.000	6	1.264.300.000	18	3.619.300.000
03.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan	-	-	1000	890.000.000	1100	979.000.000	1210	1.076.900.000	3310	2.945.900.000
03.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kreatifitas Usaha Ekonomi Yang Dihasilkan	-	-	10	150.000.000	11	165.000.000	12	181.500.000	23	496.500.000
03.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah wisausaha kreatif baru	-	-	2	620.000.000	3	682.000.000	4	750.200.000	9	2.010.200.000
3.27	DINAS PERTANIAN											
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Dinas Pertanian	CC	CC	B	3.831.902.186	B	4.215.092.405	BB	4.636.601.645	BB	12.683.596.236
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Kg)	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	12.574,11	12.682,16	13.461,94	1.397.286.100	14.241,71	1.537.014.710	15.021,49	1.690.716.181	67.981,41	4.625.016.991
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	1,23	1,30	1,45	660.000.000	1,50	726.000.000	1,65	798.600.000	1,65	2.184.600.000
		Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan	3	1	1		1		1		4	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	50%	55%	60%	12.000.000	65%	13.200.000	70%	14.520.000	70%	39.720.000
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	60%	65%	70%	313.720.000	75%	345.092.000	80%	379.601.200	80%	1.038.413.200
3.30	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											
1.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	5.888.331.129	B	6.587.164.242	BB	7.245.880.666	BB	10.754.425.227
3.30.02	Program Perizinan Dan	Persentase fasilitasi	75%	80%	85%	150.000.000	90%	165.000.000	95%	181.500.000	95%	447.025.000,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Pendaftaran Perusahaan	perizinan pendaftaran perusahaan										
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Nilai Inflasi Daerah	3,45	3,30	3,15	1.544.514.800	3,00	1.698.966.280	2,97	1.868.862.908	2,97	4.961.939.988,00
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	0,1	0,2	0,3	1.000.000.000	0,4	1.100.000.000	0,5	1.210.000.000	0,5	3.310.000.000,00
3.30.06	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	45%	50%	55%	219.700.000,00	60%	241.670.000,00	65%	265.837.000,00	70%	489.727.000,00
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	20%	25%	30%	700.000.000,00	35%	770.000.000,00	40%	847.000.000,00	40%	931.700.000,00
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen regulasi perencanaan dan pembangunan industri	1	1	1	1.438.090.000,00	1	1.581.899.000	1	1.740.088.900	4	3.770.577.900
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan	40%	45%	50%	100.000.000,00	55%	110.000.000	60%	121.000.000	60%	331.000.000
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pelaku industri yang mengakses sistem informasi industri nasional	70%	75%	80%	150.000.000,00	85%	165.000.000	90%	181.500.000	90%	496.500.000
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	47.631.325.209,00	B	52.396.120.230,00	BB	57.426.582.152,10	BB	157.454.027.591,10
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Kesejahteraan Sosial	30	30	30	15.830.000.000,00	30	17.413.000.000,00	30	19.154.300.000,00	120	52.397.3000.000,00
		Dokumen LPPD	1	1	1	8.587.100.000,00	1	9.445.810.000,00	1	10.390.391.000,00	4	28.423.301.000,00
		Dokumen Produk Hukum Daerah	-	10	6	574.784.604,00	6	632.263.064,00	10	695.489.370,84	32	765.038.307,92
		Dokumen Kerjasama Daerah	16	2	4	406.146.100,00	4	446.760.710,00	4	491.436.781,00	14	1.344.343.591,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	4	102.949.500,00	4	113.244.450,00	4	124.568.895,00	16	340.762.845,00
		Dokumen RUP Kota Tual	1	1	1	241.521.500,00	1	265.673.650,00	1	292.241.015,00	4	799.436.165,00
		Dokumen TPID	5	5	5	104.432.612,00	5	114.875.873,20	5	126.363.460,52	20	345.671.945,72
4.01.04	Program Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi	70%	75%	80%	1.300.714.900,00	85%	1.430.786.390,00	90%	1.573.865.029,00	90%	3.288.007.698,52
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	7.623.723.828,00	B	8.386.096.210,80	BB	9.224.705.831,88	BB	25.234.525.870,68
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	100 %	14.290.900.000,00	100 %	15.719.990.000,00	100 %	17.291.989.000,00	100%	47.302.879.000,00
		Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	100 %		100 %		100%			
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	BAPPEDA											
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Bappeda	C	C	B	2.916.557.718,00	B	3.183.321.089,80	BB	3.718.030.798,78	BB	9.813.297.966,58
5.01.02	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78%	80%	82%	1.245.180.000,00	84%	1.149.698.000,00	86%	1.754.167.800,00	86%	3.949.045.800,00
		Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	78%	80%	82%		84%		86%			
		Persentase Capaian kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur	78%	80%	82%		84%		86%			

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
		dan Kewilayahan										
5.01.03	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Progam RPJMD kedalam RKP	64%	83%	100%	531.760.000,00	100%	584.936.000,00	100%	643.429.600,00	100%	1.760.125.600,00
5.02	BAPENDA											
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	3.703.127.410	B	4.073.440.151	BB	4.480.784.166	BB	12.257.351.727
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35,61%	40%	43%	899.055.735	45%	988.961.309	50%	1.087.857.439	50%	2.975.874.483
5.02	BPKAD											
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	6.876.854.720,00	B	7.672.540.192,10	BB	8.655.794.211,50	BB	23.205.189.123,60
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	1.545.913.860,00	WTP	1.700.505.246,00	WTP	1.870.555.770,60	WTP	5.116.974.876,60
		Jumlah Laporan Keuangan yang diterkonsolidasi	1	1	1		1		1		4	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90%	92%	94%	480.908.500,00	96%	528.999.350,00	98%	581.899.285,00	98%	1.591.807.135,00
5.03	BKPSDM											
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	3.902.945.100,00	B	4.293.239.610,00	BB	4.722.563.571,00	BB	12.918.748.281,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengadaan ASN sesuai dengan formasi jabatan	100%	100%	100%	1.839.438.500,00	100%	1.978.974.140,00	100%	2.221.871.554,00	100%	6.040.284.194,00
		Persentase penempatan ASN sesuai dengan standar	60%	60,4%	60,7%		60,9%		70%		70%	

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
		kualifikasi jabatan										
		Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	70%	73%	75%		78%		80%		80%	
		Persentase ASN yang berkinerja baik	50%	55%	60%		65%		70%		70%	
5.03.04	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi	90%	93%	95%	1.481.378.020,00	97%	1.629.515.822,00	99%	1.792.467.404,20	99%	4.903.361.246,20
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SAKIP-PD	A	A	A	4.377.016.920,00	A	4.484.718.612,00	A	4.933.190.473,20	A	14.662.922.005,20
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	90%	91%	92%	1.069.508.500,00	93%	1.176.459.350,00	95%	1.294.105.285,00	95%	2.878.073.135,00
		Level Kapabilitas APIP Kota Tual	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	
		Opini BPK atas LKPD Pemkot Tual	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Maturitas SPIP Pemkot Tual	Level 3	Level 3	Level 3	600.000.000,00	Level 3	660.000.000,00	Level 3	726.000.000,00	Level 3	1.986.000.000,00
VII	UNSUR KEWILAYAH											
7.1	KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	385.230.762,00	B	423.753.835,00	BB	466.129.213,00	BB	1.275.113.810,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	218.097.660,00	100%	239.907.426,00	100%	22.321.668,00	100%	480.326.754,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Cakupan Pemberdayaan	50%	55%	60%	319.650.000,00	65%	351.115.000,00	70%	386.226.500,00	70%	1.056.991.500,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan										
7.1	KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	1.422.168.000,00	B	1.509.384.800,00	BB	1.710.323.280,00	BB	4.641.876.080,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	218.097.660,00	100%	239.907.426,00	100%	263.898.168,60	100%	721.903.254,60
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	319.650.000,00	85%	351.115.000,00	90%	386.226.500,00	90%	1.056.991.500,00
7.1	KELURAHAN KETSUBLAK											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	1.283.752.800,00	B	1.412.128.080,00	BB	1.553.340.888,00	BB	4.249.221.768,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	810.000.000,00	85%	891.000.000,00	90%	980.100.000,00	90%	2.681.100.000,00
7.1	KELURAHAN MASRUM											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	351.118.800,00	B	386.230.680,00	BB	424.853.748,00	BB	1.162.203.228,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	805.000.000,00	85%	885.500.000,00	90%	974.050.000,00	90%	2.664.550.000,00
7.1	KELURAHAN LODAR EL											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	CC	CC	B	351.118.800,00	B	386.230.680,00	BB	424.853.748,00	BB	1.162.203.228,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	805.000.000,00	85%	885.500.000,00	90%	974.050.000,00	90%	2.664.550.000,00
7.1	KECAMATAN TAYANDO TAM											

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	508.000.000,00	B	558.800.000,00	BB	614.680.000,00	BB	1.681.480.000,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	34.000.000,00	100%	37.400.000,00	100%	41.140.000,00	100%	112.540.000,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50%	55%	60%	28.000.000,00	65%	30.800.000,00	70%	33.880.000,00	70%	92.680.000,00
7.1	KECAMATAN PULAU PULAU KUR											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	1.370.376.162,00	B	1.507.413.778,20	BB	1.658.155.156,02	BBB	4.535.945.096,22
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	480.446.700,00	100%	528.491.370,00	100%	576.501.668,00	100%	1.585.439.738,00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50%	55%	60%	187.000.000,00	65%	205.700.000,00	70%	226.270.000,00	70%	618.970.000,00
7.1	KECAMATAN KUR SELATAN											
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	B	1.411.954.498,24	B	1.661.851.387,06	BB	1.828.036.525,47	BB	5.000.661.900,77
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Masyarakat yang diberikan layanan	100%	100%	100%	249.091.205,00	100%	274.000.325,50	100%	301.400.357,45	100%	824.491.887,95
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60%	65%	70%	232.162.942,00	75%	255.379.236,20	80%	280.917.159,82	80%	768.459.338,02
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	CC	CC	B	1.545.794.756,00	B	1.700.374.231,60	BB	1.870.411.654,76	BB	5.116.580.642,36
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pendidikan politik dan	150	150	250	1.233.057.400,00	255	1.356.363.140,00	265	1.491.999.454,00	1370	4.081.419.994,00

No	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir	
			2022	2023	2024		2025		2026		Target	Rp (juta)
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
	Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	pengembangan etika serta budaya politik										
08.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif	0	0	55	76.700.000,00	60	84.370.000,00	65	92.807.000,00	65	253.877.000,00
08.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1	1	1	342.887.000,00	4	489.175.700,00	4	616.893.270,00	10	1.448.955.970,00
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani	4	4	4	417.537.000,00	4	459.290.700,00	4	505.219.770,00	16	1.382.047.470,00



BAB VIII

PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA

BAB. VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja daerah dalam RPD Kota Tual Tahun 2024-2026 dijadikan dasar oleh OPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

VIII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran periode 2024-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian tiga tahun mendatang sebagai berikut:

Tabel VIII-1 Indikator Kinerja Utama Kota Tual Tahun 2024-2026

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	IPM	68,60	68,89	69,21	69,53	69,85	69,85
2	Pertumbuhan ekonomi	5,68	5,82	6,01	6,3	6,4	6,4
3	Angka Kemiskinan	20,56	19,75	19,35	18,95	18,75	18,75
4	Indeks Gini	-	0,31	0,306	0,302	0,29	0,29
5	Indeks Resiko Bencana	168,00	165,00	160,00	155,00	150,00	150,00
6	Rata-Rata Lama Sekolah	10,54	10,55	10,56	10,57	10,58	10,58
7	Harapan Lama Sekolah	13,99	14,03	14,07	14,11	14,15	14,15
8	Angka Harapan Hidup	65,81	65,94	66,07	66,20	66,33	66,33
9	IPG	88,46	88,70	88,90	89,11	89,33	89,33
10	IDG	58,56	59,07	59,58	60,09	60,60	60,60
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,3	55,5	55,6	55,7	55,8	55,8
12	Indeks Pembangunan Pemuda	54,34	56,01	57,68	59,35	61,02	61,02
13	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	10,34	13,65	16,96	20,27	23,58	23,58
14	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	7,32	9,95	12,58	15,21	17,84	17,84
15	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,66	6,91	7,16	7,41	7,45	7,45
16	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,92	4,97	5,02	5,07	5,12	5,12
17	Indeks Konektivitas	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366
18	Jumlah Investasi	100	105	110	115	120	120
19	Indeks ketahanan Pangan	55,89	62,92	69,95	76,98	84,01	84,01
20	Pendapatan Per Kapita	18.313.814	19.261.385	20.209.589	21.157.793	22.105.997	22.105.997
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11	7,52	6,93	6,34	5,75	5,75
22	Indeks Desa Membangun	0,7724	0,7945	0,8166	0,8387	0,8608	0,8608
23	Indeks Ketahanan Daerah	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	42	76	78	80	80
25	Indeks Profesional ASN						
26	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	B	B	BB	BB	BB

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Awal		Target Capaian Kinerja			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
27	Nilai LPPD Kota	-	3,90	4,00	4,10	4,20	4,20
28	Indeks Pelayanan Publik	54,84	78,00	80,00	80,00	88,00	88,00
29	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,05	2,1	2,5	3,00	3,1	3,1

VIII.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau *impact*. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator kinerja daerah Kota Tual Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tual Tahun 2024-2026

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
I	PENDIDIKAN						
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Dalam Pendidikan SD	93,59%	93,69%	93,79%	93,89%	94%	94%
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Dalam Pendidikan SMP	73,36%	73,46%	73,56%	73,66%	73,80%	73,80%
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	85%	90%	95%	100%	100%	100%
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	95,36%	95,56%	95,76%	95,96%	96,16%	96,16%
5	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Merdeka	70%	75%	78%	80%	85%	85%
6	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	97,22	97,50	98,00	98,50	99,00	99,00
7	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	70%	75%	76%	78%	80%	80%
II	KESEHATAN						
1	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat	80%	81%	82%	83%	85%	85%
3	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Sesuai Standar	60%	70%	75%	80%	85%	85%
6	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Standar Kompetensi	100%	100%	100%	85%	90%	90%
7	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan	70%	75%	80%	85%	90%	90%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III	PUPR						
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir	99,75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Minum	73,34	75,84	78,34	80,84	83,34	83,34
3	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	60%	65%	70%	73%	75%	75%
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Air Limbah	93%	94%	95%	96%	97%	97%
5	Persentase Pengurangan Genangan	90%	92%	94%	96%	97%	97%
6	Persentase Pemenuhan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Permukiman	75%	80%	83%	87%	90%	90%
7	Jumlah Regulasi bangunan gedung yang diterbitkan	1	1	1	1	1	4
8	Persentase bangunan yang ditata dan dipelihara	75%	80%	83%	87%	90%	90%
9	Persentase Kemantapan Jalan Kota	70,53%	71,33%	72,14%	72,94%	73,75%	73,75%
10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
1	Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertangani	45%	48%	50%	60%	70%	70%
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha	70%	73%	75%	78%	80%	80%
3	Jumlah PSU yang Dibangun untuk Menunjang Fungsi Hunian	1	1	27	27	27	81
4	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terlayani	6287	6347	6447	6547	6647	6647
V	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
1	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman)	70%	75%	80%	85%	90%	90%
V	SOSIAL						
1	Persentase Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Menerima Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Sosial	45%	46%	47%	48%	50%	50%
2	Persentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	45%	46%	47%	50%	50%	50%
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	45%	45,6%	46%	47%	48%	48%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Menerima Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar						
4	Persentase Masyarakat (DTKS) yang Menerima Jaminan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VI	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	89.460	89.732	89.930	90.147	90.356	90.356
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	89.460	89.732	89.930	90.147	90.356	90.356
3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89.460	89.732	89.930	90.147	90.356	90.356
VII	PEMADAM KEBAKARAN						
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	-	-	100%	100%	100%	100%
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
I	LINGKUNGAN HIDUP						
1	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1	0	1	1	1	3
2	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	4
3	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	1	1	1	1	1	4
4	Persentase Tindakan Verifikasi Terhadap Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan Limbah B3	70%	75%	78%	80%	85%	85%
5	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Perizinan Berusaha Diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	70%	73%	80%	85%	90%	90%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	1	1	3	3	4	11
7	Persentase sampah yang tertangani	98,04%	96,34%	99,71%	99,29%	99,78%	99,78%
II	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP Elektronik	89.460	89.732	94.219	98.930	103.876	103.876
2	Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	44,53%	64,53%	84,53%	100%	100%	100%
3	Persentase Kepemilikan Kk	98,64%	98,80%	98,90%	99%	99,89%	100%
4	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	97,83%	98,80%	98,90%	99%	99,89%	100%
5	Persentase Kepemilikan Akte Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan NonMuslim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	5	6	7	8	9	9
III	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
1	Presentase Tata Pemerintahan Desa	75%	77%	79%	82%	85%	85%
2	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	70%	72%	75%	77,5%	80%	80%
2	Persentasi Desa Tertib Administrasi Sesuai Aturan	75%	77%	79%	82%	85%	85%
3	Jumlah Dokumen Profil Desa	30	30	30	30	30	30
4	Persentasi LKD (RT, RW, Karang Taruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	80%	83%	85%	85%	87%	87%
IV	KOPERASI DAN UKM						
1	Persentase Rekomendasi Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	0	0	60%	80%	100%	100%
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	46%	62%	76%	76%
3	Persentase Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0	0	41,90%	46,09%	50,70%	50,70%
4	Persentase Koperasi yang Mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30%	30%	35%	40%	45%	45%
5	Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan	30%	30%	35%	40%	45%	45%
6	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	12,77%	12,77%	14,05%	15,45%	17%	17%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Persentase Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	0	0	35%	40%	45%	45%
V	PERHUBUNGAN						
1	Rasio Konektivitas Sungai Atau Laut	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
VI	PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA						
1	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	12	12	12	12	12	48
2	Jumlah Peserta Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	30	30	30	30	30	120
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	90	90	90	90	90	360
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	50%	52%	55%	55%
5	Persentase Minimal Pemberian Insentif Penanaman Modal	52%	52%	52%	10%	10%	10%
6	Persentase Minat Investasi	10%	10%	10%	55%	60%	60%
7	Persentase Kepatuhan Investor Terhadap Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP	55%	55%	55%	65%	70%	75%
8	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Pendaftaran Perusahaan melalui aplikasi OSS	94%	95%	96%	97%	98%	98%
10	Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	12	12	12	12	12	48
VII	PEMUDA, DAN OLAHRAGA						
1	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	8.3774	9.6340.	10.8906	12.1472	12.5661	12.5661
2	Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	20%	40%	60%	80%	100%	100%
3	Persentase pelajar yang aktif di pramuka	20%	25%	30%	35%	40%	40%
VIII	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						
1	Tingkat Kegemaran Membaca	40%	45%	50%	55%	60%	60%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan	73,34	75,84	78,34	80,84	83,34	83,34
IX	KOMINFO						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ruang Informasi Publik	70%	75%	80%	85%	90%	90%
2	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	20%	20%	30%	30%	50%	50%
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik	0%	0%	30%	30%	50%	50%
4	Persentase Tingkat Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	0%	0%	10%	50%	70%	70%
X	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Persentase OPD Responsif Gender	55%	60%	65%	70%	75%	75%
2	Persentase Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	55%	60%	65%	70%	75%	75%
3	Persentase Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Keluarga bagi Perempuan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
4	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Forum Anak, Termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	56%	57%	58%	59%	60%	60%
6	Persentase Pendampingan Khusus terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan	65%	70%	75%	80%	85%	85%
7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	6.125	6.525	7.025	7.525	8.025	35.225
8	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	16%	15%	14%	12%	10%	10%
9	Persentase Keluarga Berwirausaha	-	45%	47%	48%	50%	50%
10	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	19	20	21	22	23	23
11	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)	3,3	3,1	2,8	2,6	2,4	2,4
12	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	1	2	3	3	9

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
XI	KETAHANAN PANGAN						
1	Ketersediaan pangan Pokok (Kg/kapita/tahun)	381,79	431,15	481,70	501,63	553,72	553,72
2	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Lokal Non Beras (Kg/kapita/Per Hari)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
3	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan di Kota Tual	20	40	60	80	100	100
C	URUSAN PILIHAN						
I	PERIKANAN						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	30.088,17	30.990,82	31.920,54	32.878,16	33.864,50	129.654,01
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12.819,21	13.460,17	14.133,18	14.839,84	15.581,83	58.015,02
3	Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)	620,75	639,37	658,55	678,31	698,66	2.675
II	PARIWISATA						
1	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang Dikembangkan	-	-	6	6	6	18
2	Jumlah Kreatifitas Usaha Ekonomi yang Dihasilkan	-	-	10	11	12	33
3	Jumlah Destinasi Pariwisata Daerah yang dipromosikan	-	-	6	6	6	18
4	Jumlah Kreatifitas Usaha Ekonomi yang Dihasilkan	-	-	10	11	12	23
5	Jumlah wisausaha kreatif baru	-	-	2	3	4	9
III	PERTANIAN						
1	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian (Kg)	12.574,11	12.682,16	13.461,94	14.241,71	15.021,49	67.981,41
2	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	1,23	1,30	1,45	1,50	1,65	1,65
3	Jumlah Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dan Dikembangkan	3	1	1	1	1	4
4	Persentase Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	50%	55%	60%	65%	70%	70%
5	Cakupan Bina Kelompok Petani	60%	65%	70%	75%	80%	80%
IV	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						
1	Persentase Fasilitasi Perizinan Pendaftaran Perusahaan	75%	80%	85%	90%	95%	95%
2	Nilai Inflasi Daerah	3,45	3,30	3,15	3,00	2,97	2,97
3	Persentase Pelaku Usaha yang Menjadi Eksportir	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5
4	Persentase Alat Metrologi yang Sesuai Standar	45%	50%	55%	60%	65%	70%

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang						
6	Jumlah Dokumen Regulasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	1	1	1	1	1	1
7	Persentase saran teknis terhadap izin yang dikeluarkan	40%	45%	50%	55%	60%	60%
8	Persentase Pelaku Industri yang Mengakses Sistem Informasi Industri Nasional	70%	75%	80%	85%	90%	90%
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	SEKRETARIAT DPRD						
1	Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
II	SETDA						
	Perekonomian dan Pembangunan						
1	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	4	4	4	16
2	Dokumen RUP Kota Tual	1	1	1	1	1	4
3	Dokumen TPID	5	5	5	5	5	20
	Kesejahteraan Rakyat						
1	Dokumen Kesejahteraan Sosial	30	30	30	30	30	12
2	Dokumen LPPD	1	1	1	1	1	4
3	Dokumen Kesejahteraan Sosial	-	10	6	6	10	32
4	Dokumen Produk Hukum Daerah	16	2	4	4	4	14
5	Dokumen Kerjasama Daerah	30	30	30	30	30	120
	ORGANISASI						
1	Cakupan Penataan Organisasi	70%	75%	80%	85%	90%	90%
E	UNSUR PENGAWASANURUSAN PEMERINTAHAN						
I	INSPEKTORAT						
1	Level Kapabilitas APIP Kota Tual	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Selesai Ditindaklanjuti	90%	91%	92%	93%	95%	95%
3	Opini BPK atas LKPD Pemkot Tual	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Level Maturitas SPIP Pemkot Tual	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
F	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PERENCANAAN						
1	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78%	80%	82%	84%	86%	86%
2	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	78%	80%	82%	84%	86%	86%
3	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	78%	80%	82%	84%	86%	86%
4	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran Program pembangunan daerah	64%	83%	100%	100%	100%	100%
II	BPKAD						
1	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah Laporan Keuangan yang terkonsolidasi	1	1	1	1	1	4
3	Persentase Keakuratan Penatausahaan Aset (Materealitas)	90%	92%	94%	96%	98%	98%
III	PENDAPATAN DAERAH						
1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35,61%	40%	43%	45%	50%	50%
IV	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT						
1	Persentase Pengadaan ASN Sesuai Dengan Formasi Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penempatan ASN Sesuai dengan Standar Kualifikasi Jabatan	60%	60,4%	60,7%	60,9%	70%	70%
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	70%	73%	75%	78%	80%	80%
4	Persentase ASN yang Berkinerja Baik	50%	55%	60%	65%	70%	70%
5	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi	90%	93%	95%	97%	99%	99%
G	UNSUR PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN						
I	KECAMATAN						
A	KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN						

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentase Masyarakat yang diberikan Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA						
1	Presentase Masyarakat yang diberikan Layanan	70%	70%	70%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	KECAMATAN PULAU PULAU KUR						
1	Presentase Masyarakat yang Diberikan Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	KECAMATAN TAYANDO TAM						
1	Presentase Masyarakat yang Diberikan Layanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E	KECAMATAN KUR SELATAN						
1	Presentase Masyarakat yang Diberikan Layanan	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
F	KELURAHAN MASRUM						
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
G	KELURAHAN KETSOBLAK						
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
H	KELURAHAN LODAR EL						
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
H	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
I	BADAN KESBANGPOL						
1	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	150	150	250	255	265	1370
2	Cakupan Ormas yang di bina kategori aktif	-	-	55	60	65	65
3	Jumlah orang yang dibina dilingkup bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1	1	1	4	4	10
4	Jumlah Potensi Konflik Sosial yang Tertangani	4	4	4	4	4	16